



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Bypass Kel. Tamalate, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

email : bappedagtloprov@gmail.com

Nomor : 050 /Bappeda/050 /IX/2018
Lampiran : 1 (satu) Dokumen.
Perihal : Pengantar Dokumen RAD SDGs/TPB
Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 27 September 2018

Kepada.

Yth. **Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementertian PPN/Bappenas Cq. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air**

Di -

Jakarta.

Menindaklanjuti Perpres No 59 Tahun 2017, di sampaikan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2018 bersama lampiran Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022.

Demikian disampaikan, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

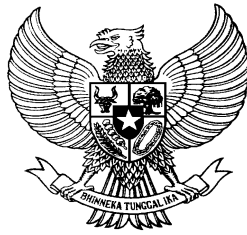
KEPALA BAPPEDA

Budiyanto Sidiki, S. Sos, M. Si

NIP. 197403111993031001

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Gubernur Gorontalo
3. Yth. Leader Sekretariat Nasional SDG's
4. Arsip



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo perlu menetapkan kebijakan daerah dalam sebuah rencana aksi daerah;
- b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 (lima) Tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAANN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI GORONTALO

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai tahun 2030;
6. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB Tahun 2017 hingga Tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional;
7. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional;
8. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD-TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah;
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pencapaian TPB.
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/ SDGs, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah penilaian sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan sasaran daerah Provinsi Gorontalo periode Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RAD TPB adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 4

Sasaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. perangkat daerah/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tugas, tata kerja dan tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan tim pakar dalam tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Gorontalo.
- b. Penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB.

Pasal 6

Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB bertugas :

- a. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta pelaksanaan pencapaian TPB; dan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB.

Pasal 7

(1) Tim Koordinasi TPB terdiri atas :

- a. Dewan Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Kelompok Kerja
- d. Tim Sekretariat TPB/SDGs,

(2) Tim Sekretariat TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) RAD TPB dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tahapan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- (3) Tahap awal pelaksanaan RAD TPB Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Sekretariat SDGs Daerah dalam hal ini Bappeda Provinsi Gorontalo
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Kepala perangkat daerah/Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB kepada Ketua Tim Koordinasi TPB/SDGs yaitu Sekretaris Daerah sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD TPB, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Juli 2018
GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR ... 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Terhadap Visi dan Misi Gubernur

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Hasil review RPJPD 2007 – 2022 dirumuskan beberapa arahan dan tantangan dalam RPJMD 2017-2022 adalah:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung antara lain dengan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja dan UMKM, pariwisata, akselerasi pertumbuhan industri pengolahan, dan peningkatan investasi;
- b. Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam, yang diprioritaskan pada ketahanan pangan, energy dan ketahanan air;
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, dengan prioritas pada pemenuhan infrastruktur dasar, penyediaan transportasi, dan peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dan informasi;
- d. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, Peningkatan kualitas pelayanan public, Penerapan *e-government* untuk mendukung pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, Peningkatan Kapasitas manajemen kinerja pembangunan, Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah, dan Membangun Kemitraan dan kerjasama

- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dengan prioritas kebijakan kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan percepatan pengurangan kemiskinan;
- f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan konservasi hutan serta mitigasi bencana alam;
- g. Pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah, dengan prioritas pada penguatan konektivitas daerah untuk mencapai keseimbangan pembangunan, pengembangan desa tertinggal dan pengembangan wilayah strategis.

Arahan-arahan pembangunan tersebut secara operasional diuraikan dalam RPJMD 2017-2022 yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022, dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi diakhir tahun 2016, melalui Visi pembangunan tahun 2017-2022 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung 2 (dua) aspek yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Gorontalo Maju dan Unggul, yaitu Kondisi daerah yang maju, dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata,

pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan.

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 sejalan dengan Agenda pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 merupakan penjabaran operasional dari Nawacita, menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dirumuskan dengan memperhatikan elemen strategis yang salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan.

Ditingkat global tercetus kesepakatan yang dikenal dengan agenda 2030 yang disepakati oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda 2030 terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang, yang mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Agenda 2030 dikenal juga sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan TPB/SDGs tersebut.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. *People* (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. *Planet* (Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. *Prosperity* (Kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. *Peace* (Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. *Partnership* (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan 169 Target yang tercakup

dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Tujuan global tersebut sebagai berikut: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar. Provinsi Gorontalo sampai tahun 2015 telah mencapai sebagian besar target MDGs, dari 73 indikator 67,13% telah tercapai selebihnya 32,87% tidak tercapai.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Gorontalo berupaya semaksimal mungkin, untuk terlibat dan melibatkan diri secara langsung dalam upaya pencapaian TPB/SDGs. Beberapa agenda pembangunan

dalam RPJMD Provinsi Gorontalo merupakan kontribusi positif dalam upaya Indonesia dalam mengupayakan kepentingan strategis nasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan global.

Keselarasan antara RPJMD Provinsi Gorontalo dan agenda pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai berikut:

Tabel 1.
Keselarasan antara RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	SDGs	Sasaran	RPJMD
1	[TUJUAN 1] Mengakhiri segala bentuk Kemiskinan di mana pun	Menurunnya tingkat kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Untuk Rakyat • Program Kesejahteraan Sosial • Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan • Program Peningkatan Hidup Perempuan dan Partisipasi masyarakat serta perlindungan perempuan dan anak • Program Kesejahteraan Rakyat • Program Pendidikan Untuk Rakyat • Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan (penyediaan listrik RT tidak mampu) • Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat miskin, korban bencana dan

No	SDGs	Sasaran	RPJMD
			dampak pembangunan provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir • Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin • Program Peningkatan Produksi Pertanian/ populasi ternak Berkelanjutan • Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi • Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan provinsi • Program Peningkatan Kawasan Permukiman
2	[TUJUAN 2] Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Produksi Pertanian/ populasi ternak • Program Penanganan lahan pertanian berkelanjutan • Program pengembangan distribusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta penguatan cadangan pangan • Program penyediaan

No	SDGs	Sasaran	RPJMD
			<p>pangan asal hewan yang aman sehat utuh dan halal (PAH ASUH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; • Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan • Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir • Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan • Program Pengembangan analisis/kajian Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan • Program pengembangan distribusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta penguatan cadangan pangan • Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

No	SDGs	Sasaran	RPJMD
3	[TUJUAN 3] Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Dan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat • Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan • Program Peningkatan Mutu Akses dan Mutu Fasyankes • Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS • Peningkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS • Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan • Program Peningkatan Layanan KB
4	[TUJUAN 4] Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Menengah • dan pendidikan khusus • Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pemuda dan Olahraga • Program Pembinaan Pemuda • dan Olahraga

No	SDGs	Sasaran	RPJMD
5	[TUJUAN 5] Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Hidup Perempuan dan Partisipasi masyarakat serta perlindungan perempuan dan anak • Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
6	[TUJUAN 6] Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih Dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi • Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan provinsi • Program Peningkatan Kawasan Permukiman
7	[TUJUAN 10] Mengurangi kesenjangan intra Dan antarnegara	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Program Pengembangan Perdesaan • 2. Program Pengembangan kawasan Strategis • 3. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (khusus jalan strategis provinsi, akses pariwisata, pertanian, transmigrasi) • 4. Program Pembangunan dan

No	SDGs	Sasaran	RPJMD
8	[TUJUAN 13] Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup yang lestari untuk mitigasi bencana	<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Serta Kawasan Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan • 6. Program Penataan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • Program Kedaruratan Dan Logistik • Program Pengembangan kawasan Strategis • Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (khusus jalan strategis provinsi, akses pariwisata, pertanian, transmigrasi) • Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Serta Kawasan Perdesaan • Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan • 6. Program Penataan Administrasi kependudukan dan

No	SDGs	Sasaran	RPJMD
			<p> pencatatan sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan • Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
9	<p>[TUJUAN 15]</p> <p>Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayat</p>	<p>Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup yang lestari untuk mitigasi bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan • Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
10	<p>[TUJUAN 16]</p> <p>Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan</p>	<p>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan • Program Pengembangan Aparatur • Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur • Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen ASN • Program Pengembangan Kompetensi Manajerial • Program Peningkatan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur • Program Pengembangan Kapasitas, Mutu dan Kerjasama Kediklatan

No	SDGs	Sasaran	RPJMD
			<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Aplikasi, Sistem Informasi & Jurnal Ilmiah Kediklatan • Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil • Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan di Provinsi Gorontalo dan Nasional

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

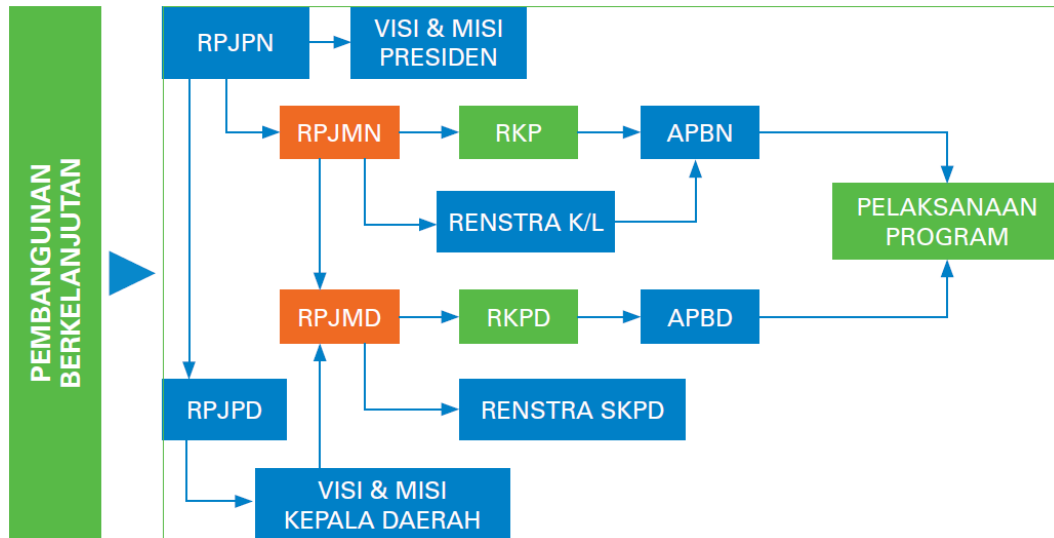
Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden.

Provinsi Gorontalo juga telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 -2022. Hal ini juga menjadi sesuatu yang beriringan sehingga substansi yang dimasukkan kedalam Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Gorontalo sesuai dengan apa yang ada dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo.

Rencana aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Gorontalo adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target baik daerah maupun secara nasional. Dengan rencana aksi daerah tersebut diharapkan pihak-pihak terkait ditingkat daerah maupun nasional, memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs secara bersama.

TPB/SDGs telah menjadi komitmen internasional dan Indonesia secara khusus untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMN tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

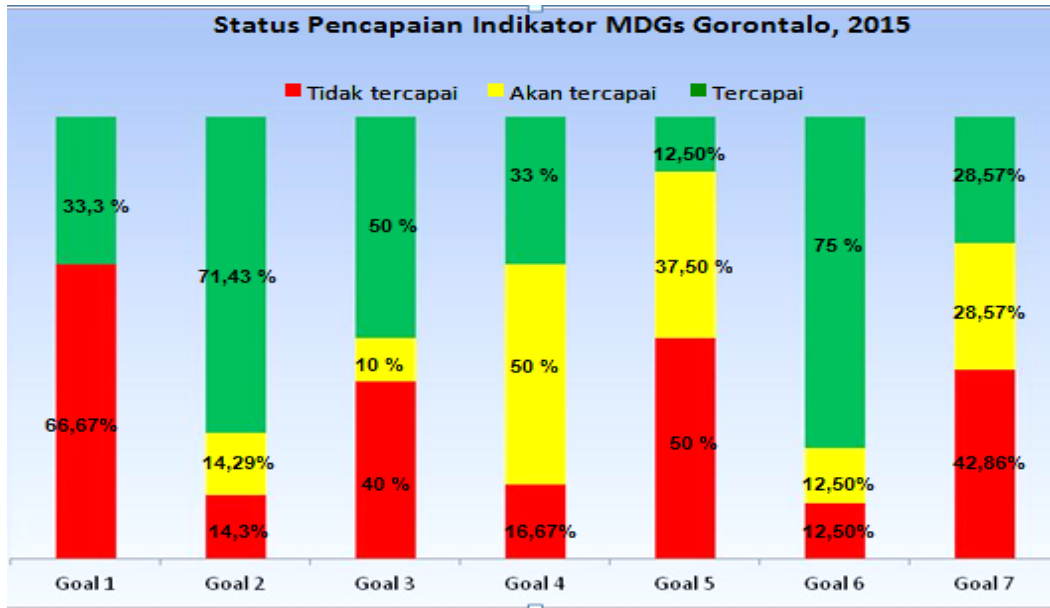


Gambar 1. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan di Provinsi Gorontalo dan Nasional

Di tingkat Daerah Provinsi Gorontalo, RPJMD 2018-2022 merupakan dokumen yang menjadi referensi bagi pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun rencana strategis, program dan kegiatan di daerah, termasuk penganggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat daerah maupun nasional dapat dilihat pada Gambar 1.

1.2 TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

Kesepakatan global yang dihasilkan dalam *World Summits* pada bulan September 2000 tercantum dalam *Millennium Declaration*, melahirkan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs). Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Millenium (MDGs) Provinsi Gorontalo tahun 2011-2015 merupakan salah satu bentuk dukungan riil bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan/program pencapaian target tujuan MDGs dan sekaligus menjadi dokument penting bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan millenium yang terdapat dalam target-target MDGs di tingkat Nasional. Beberapa Tujuan dan Target MDGs telah dicapai oleh Provinsi Gorontalo.



Gambar 2. Pencapaian MDGs Provinsi Gorontalo

Sementara itu, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat dicapai pada akhir tahun 2015 yaitu: 1) kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, 2) Angka Kematian Ibu, 3) prevalensi HIV dan AIDS, 4) tutupan lahan, 5) air minum layak perdesaan, dan 6) sanitasi layak perdesaan. Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan TPB/SDGs.

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs yang telah disusun sebelumnya. Beberapa Tujuan dan Target serta Indikator ditransformasi menjadi lebih luas. Penanggulangan Kemiskinan sebagai Tujuan 1 MDGs, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB/SDGs bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “Zero Goal”. Target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*).

Transformasi lainnya adalah pengembangan Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs dikembangkan menjadi 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.

Meski menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, serta dengan budaya dan kondisi geografis beragam, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67 indikator MDGs telah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015. Tujuh indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi: 1) kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari, 2) akses pendidikan dasar, 3) kesetaraan gender dalam pendidikan, 4) Angka Kematian Bayi dan Balita, 5) pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria, 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan 7) permukiman kumuh perkotaan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama seluruh elemen masyarakat (LSM, lembaga-lembaga usaha melalui CSR, maupun secara personal) telah berupaya keras menuntaskan seluruh tujuan dari MDGs agar mendapatkan pencapaian maksimal. Pencapaian MDGs dikuatkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs. Hal ini telah memberi arah bagi pencapaian target MDGs hingga tahun 2015. Dari 92

indikator MDGs sebanyak 73 indikator sudah dapat dikumpulkan datanya yang menjadi dasar dalam penyusunan program disetiap SKPD. Diakhir tahun pencapaian MDGs (2015), Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mampu memilah 73 indikator dari keseluruhan indikator MDGs, dari 73 indikator yang telah tercapai 67.13 persen, tidak tercapai 32,87 persen.

1.3 Komitmen Daerah Terhadap Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Sejak Deklarasi Millenium PBB atau lebih dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) pada tahun 2000, sampai dengan kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) menjadi agenda global 2030, yang berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030, Provinsi Gorontalo tetap berkomitmen dan konsisten menjalankan berbagai macam program dan kegiatan dalam upaya mencapai target goals (tujuan).

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu wilayah otonom yang ke 32 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memandang pelaksanaan TPB/SDGs merupakan sebuah kewajiban dan keharusan mengimplementasi pembangunan menuju masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan. Provinsi Gorontalo memiliki tanggung jawab besar dan berkomitmen tinggi dan sangat kuat serta sekaligus menjadi provinsi terdepan pada pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs dalam upaya mentransformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Komitmen implementasinya didasarkan pada kemampuan dan komitmen kuat daerah dalam merealisasikan seluruh target tersebut sampai tahun 2030 dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya penting bagi masyarakat Gorontalo yang terefleksi dari sinergitas antara RPJMD dengan TPB/SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi nyata Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan

pencapaian TPB/SDGs Indonesia maupun sebagai bagian dari komunitas dunia global.

Sampai tahun 2015, Implementasi realisasi terhadap Pencapaian target tujuan MDGs di Provinsi Gorontalo menghasilkan beberapa indikator tujuan dapat dicapai dengan baik, tetapi beberapa target dan indikator, masih perlu upaya yang lebih keras untuk dapat mencapainya. Upaya pencapaian target tujuan dan indikator TPB/SDGs Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022, beberapa masalah dan tantangan masih perlu dibenahi untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama stakeholder lainnya di daerah untuk bersama-sama mewujudkan berbagai target capaian pada goals/tujuan pembangunan tersebut.

Untuk lebih mengakselerasi pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs, komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 379/28/II/2017 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Gorontalo Tahun 2017; dan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 349/28/X/2017 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Gorontalo Tahun 2017, yang merupakan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo atas dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 349/28/X/2017 menjelaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Gubernur bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah di Daerah dan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah 2017-2022 merupakan langkah awal selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2030 tahap pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs Provinsi Gorontalo. Koordinasi antar instansi atau OPD terkait terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs melalui

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Tahun 2017-2022. Pelibatan semua pihak (pemerintah daerah, DPRD, filantropi dan bisnis, pakar dan akademisi, ormas dan media) untuk bersinergi memaksimalkan kinerja sesuai peran, fungsi dan kemampuan para stakeholder. Lembaga-lembaga baik pemerintah, swasta, ormas diharapkan dapat bekerja bersama dan lebih baik secara strategis maupun operasional.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Gorontalo mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

- 1. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;** Dokumen Perpres No. 59 Tahun 2017 merupakan dasar hukum dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.
- 2. RPJMD Tahun 2018-2022;** Dokumen RPJMD Tahun 2018-2022 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan pencapaian target TPB/SDGs. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian TPB/SDGs.
- 3. Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 -2022;** Dokumen Rencana strategis OPD yang terkait langsung dengan TPB/SDGs diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan pencapaian target TPB/SDGs. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam Renstra OPD bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan RPJMD tahun 2018-2022. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMD tahun 2018-2022.

Dokumen RKPD tahunan diperlukan dalam penetapan indikator, target, dan anggaran. Perbaikan target dan anggaran tahunan dalam RPJMD 2018-2022 diakomodasi dalam RKPD tahunan termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran terkait pencapaian target TPB/SDGs Provinsi Gorontalo.

4. **Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi Gorontalo; ...**
5. **Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia;** Laporan 15 tahun Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia 2015 merupakan laporan lengkap yang berisikan capaian indikator MDGs dari setiap tujuan dan target selama periode tahun 2000 sampai tahun 2015. Pada laporan tersebut dijelaskan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia serta program-program yang telah dilaksanakan. Dilaporkan pula tentang pembelajaran dari praktek-praktek baik untuk memperkuat agenda TPB/SDGs. Pada bagian akhir dari laporan ini, diidentifikasi berbagai indikator yang perlu dilanjutkan antara lain penurunan kemiskinan, penurunan angka kematian Ibu, penurunan prevalensi penyakit HIV dan AIDS, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi layak terutama pada daerah perdesaan.
6. **Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2017-2018;**
7. **Dokumen Kebijakan Lain yang terkait:**
 - a. Dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, adalah dokumen yang disepakati secara global pada tanggal 25 September 2015 sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tahun 2030. Dokumen ini merupakan pedoman penting atas berbagai masalah global terutama terkait dengan 3 (tiga) dimensi penting pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dokumen ini memuat 17 tujuan (*goals*) dan 169 target, kesemua tujuan dan target tersebut menjelaskan bahwa TPB/SDGs merupakan aksi dunia untuk menciptakan dunia bebas dari kemiskinan; kelaparan dan penyakit; dunia yang menghormati HAM; keadilan dan kesetaraan serta dunia yang tiap negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- b. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2014-2020. RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang: pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; pengelolaan limbah; dan kegiatan pendukung lain. RAN-GRK merupakan pedoman bagi Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK. RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.
- c. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI) 2014-2024. RAN-API merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (*climate proof/ resilient development*) di tingkat nasional. Tujuan khusus penyusunan RAN-API adalah untuk: (i) Memberikan arahan untuk pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan nasional; (ii) Menyediakan arahan bagi aksi adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015-2019), dan jangka panjang (2020-2025); (iii) Menyediakan arahan bagi langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan, agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan internasional; (iv) Sebagai arahan bagi sektor dan daerah dalam

mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif.

- d. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB). Dokumen JAKSTRA merupakan dokumen acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia menjadi lebih terarah, terkoordinasi dan terpadu, yang disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Naskah Akademik Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), dan SENDAI Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
- e. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019. RAN-HAM Merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia tahun 2015-2019 dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.
- f. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025. Dokumen ini memuat visi, misi, sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan piranti anti-korupsi. Stranas PPK mempunyai 6 (enam) strategi yaitu (1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan; (3) Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundangan undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait; (4) Melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; (5) Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi; dan (6) Meningkatkan

koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

- g. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019. RAN-PG merupakan rencana aksi nasional dengan pendekatan multisektor untuk meningkatkan keadaan pangan dan gizi masyarakat Indonesia. Dokumen ini memuat fokus perbaikan pangan dan gizi masyarakat serta intervensi yang akan dilakukan baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Dokumen tersebut berisi kerangka logis tentang dampak yang akan dicapai, output, program dan kegiatan serta instansi penanggung jawab.
- h. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*. Dokumen IBSAP merupakan acuan nasional tentang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (kehati) Indonesia. Dokumen ini disusun berdasarkan kerangka global *Aichi Targets*, Dokumen RPJMN 2015-2019, dan Dokumen Renstra K/L terkait. Dokumen IBSAP memuat pemutakhiran data kehati Indonesia, kebijakan dan strategi pengelolaan kehati, target nasional, dan rencana aksi pengelolaan kehati serta rencana pengelolaan kehati paska tahun 2020.

Komitment Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs dilengkapi dengan Landasan Hukum lain yang akan memperkuat dan mengharmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing indikator Tujuan TPB/SDGs. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

1.4 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo tidak dapat dipisahkan dari berbagai pihak, baik Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten/Kota maupun pihak Non Pemerintah yang merupakan unsur yang sangat penting dalam implementasi program dan kegiatan untuk mencapai target yang ditentukan berdasarkan indikator pencapaian yang ada. Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah dengan implementasi program dan kegiatan menentukan pelaksanaan dan pencapaian target TPB/SDGs. Untuk itu upaya-upaya tersebut harus dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Universal*: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang.
2. *Integration*: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)
3. *No-One Left Behind*: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan.

Prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: Membangun kepercayaan (*trust building*); Kemitraan yang setara; Partisipasi; Akuntabel; dan Saling menguntungkan

Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia dan secara khusus Provinsi Gorontalo menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk

mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Gorontalo berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAN TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Nonpemerintah.

1.5 Pembiayaan TPB/SDGs

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional dan di daerah, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022 dalam bentuk

program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dukungan dana baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo maupun dari APBN serta sumber-sumber pendanaan global dan pelibatan swasta, akan mempermudah dan mempercepat pencapaian target TPB/SDGs. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Sebagai salah satu provinsi yang berkomitmen tinggi dalam pelaksanaan TPB/SDGs, Provinsi Gorontalo dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan TPB/SDGs, selain adanya kesesuaian anggaran dalam pelaksanaan program di RPJMD tahun 2017-2022 yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang juga sangat selaras dengan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Gorontalo, Pemerintah Daerah juga melakukan upaya-upaya maksimal untuk mendapatkan pendanaan yang berasal dari penerimaan-penerimaan baik yang bersifat reguler konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

- a. **Optimalisasi Penerimaan Keuangan Daerah.** Penerimaan Keuangan Daerah yang berasal dari pajak, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, bantuan lembaga-lembaga donor baik dari dalam maupun dari luar negeri dan lain-lain akan terus diupayakan untuk mengoptimalkan penerimaan dana, baik untuk pembangunan daerah secara umum maupun secara spesifik untuk pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs.

- b. Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat/lembaga ekonomi dan sosial.** Sumbangan dan partisipasi sukarela dari berbagai sosial institusi melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* terus dikembangkan untuk memaksimalkan keterlibatan lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, lembaga sosial masyarakat dan lain-lain. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan TPB/SDGs.
- c. Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.** Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to TPB/SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi). Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah adalah skema KPBU (sektor ketenagalistrikan, migas dan Energi Baru Terbarukan serta konservasi energi). Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs.

1.6 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Metode penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo ditetapkan dalam waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 pada tanggal 10 Juli 2017.

Peraturan Presiden tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD menjadi sangat penting.

Dengan koordinasi Bappeda Provinsi Gorontalo, setiap tahap penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh OPD terkait dengan isu TPB/SDGs dan pihak nonpemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pihak statistik dan media. Ditekankan keterlibatan aktif dari pihak nonpemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.
2. Penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja/pilar setiap Tujuan untuk membahas pengisian matriks RAD. Matriks terdiri dari matriks 1 (matrik utama) adalah matrik yang berisi target tahunan setiap indikator dan instansi pelaksana, matriks 2 terdiri atas target tahunan dan indikatif alokasi anggaran 5 tahun setiap program dan kegiatan pemerintah (instansi pelaksana), serta matriks 3 yang merupakan program dan kegiatan nonpemerintah.
3. Pembahasan dan sekaligus pengisian matriks melalui pertemuan tematik bersama OPD terkait dan non pemerintah sekaligus melibatkan Bappeda Kabupaten/kota.
4. Tahap selanjutnya, pertemuan antar 4 (empat) manajer pilar dan manajer analisis dan pengolahan data dengan Bappeda dan tim sekretariat TPB/SDGs Provinsi Gorontalo dengan melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah didapatkan dengan didukung oleh data dasar (*baseline*) secara runtun

waktu (*series*) selama lima tahun atau sesuai dengan ketersediaan data. Manajer Pilar melakukan pembahasan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator output terkait yang telah dicapai dan ditargetkan hingga tahun 2022.

5. Sistem data dan pengumpulan data dilakukan menggunakan dengan memastikan penerapan prinsip inklusif dan keterlibatan semua pihak melalui sistem daring (*online*) lewat laman (*website*) dan surat elektronik (*email*). Melalui sistem ini, Tim Sekretariat dan Manajer Pilar TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs.

1.7 Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Gorontalo mengacu pada Dokumen RAN TPB/SDGs Indonesia. RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan menjelaskan mengenai Keselarasan *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Terhadap Visi dan Misi Gubernur, Menyempurnakan MDGs, Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs, Pembiayaan TPB/SDGs dan Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.

Bab Kedua, Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs, menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Provinsi Gorontalo terkait indikator utama dari setiap Tujuan TPB/SDGs. Bagian ini pula mengungkap kondisi 5 (lima) tahun terakhir sampai tahun 2016 mengenai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Data Dasar (*Baseline*) 2016 menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2022. Kinerja dan pencapaian pembangunan termasuk dalam RPJMD 2017-2022 yang terkait dikelompokkan berdasarkan Tujuan TPB/SDGs sebagai berikut:

- Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
- Menghilangkan Kelaparan,
- Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hjayat untuk Semua Orang
- Mencapai Kesejahteraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan modern
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
- Kota dan Pemukiman Berkelanjutan
- Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
- Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Bab Ketiga, Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs, merupakan bagian yang menunjukkan target dan arah kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang terdapat dalam RPJMD 2017-2022 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Arah kebijakan Pemerintah Daerah ini *men-drive* program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) OPD/instansi Dinas/Badan maupun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bagian ini pula menguraikan dan menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks 3 pada lampiran RAD ini. Secara garis besar program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo diselaraskan berdasarkan Tujuan TPB/SDGs yaitu:

- Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- Tujuan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang Bertanggung Jawab
- Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
- Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Bab Keempat, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan berisi tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2017-2022 baik pemerintah dan nonpemerintah. Mekanisme bagi Pemerintah Daerah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan *self-*

assessment. Kedua mekanisme tersebut akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan publikasi atau laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Gorontalo.

Bab Kelima, Penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/ SDGs

Status capaian dari berbagai indikator terkait TPB/SDGs merupakan gambaran kinerja berbagai indikator yang telah dicapai oleh Provinsi Gorontalo dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan dengan berbagai indikator-indikator yang telah dilaksanakan pada saat pelaksanaan MDGs di Provinsi Gorontalo. Program dan kegiatan pembangunan yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui RPJMD selaras dengan pelaksanaan TPB/SDGs baik ditingkat Provinsi Gorontalo maupun secara nasional.

Kinerja pencapaian Tujuan SDGs ditentukan oleh pencapaian berbagai target yang telah ditentukan berdasarkan indikator-indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait pada setiap Tujuan SDGs.

Dalam penyusunan rencana aksi daerah dan upaya pencapaian target SDGs/TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang secara umum dihadapi antara lain:

- 1) Adanya beberapa indikator yang terdapat dalam setiap tujuan SDGs yang tidak atau belum sesuai dengan kondisi Provinsi/kabupaten/kota Gorontalo.
- 2) Beberapa indikator/data terutama yang bersifat sektoral belum tersedia di SKPD terkait

Pada bagian ini diuraikan mengenai status capaian dari berbagai indikator terkait TPB/SDGs berdasarkan target dan capaian sesuai dengan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan dan capaian tujuan SDGs.



TUJUAN 1

Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah:

1. Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari \$US 1,25 per hari.
2. Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin,
4. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar.
5. Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
6. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik.
7. Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target Tujuan 1 SDGs Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun adalah :

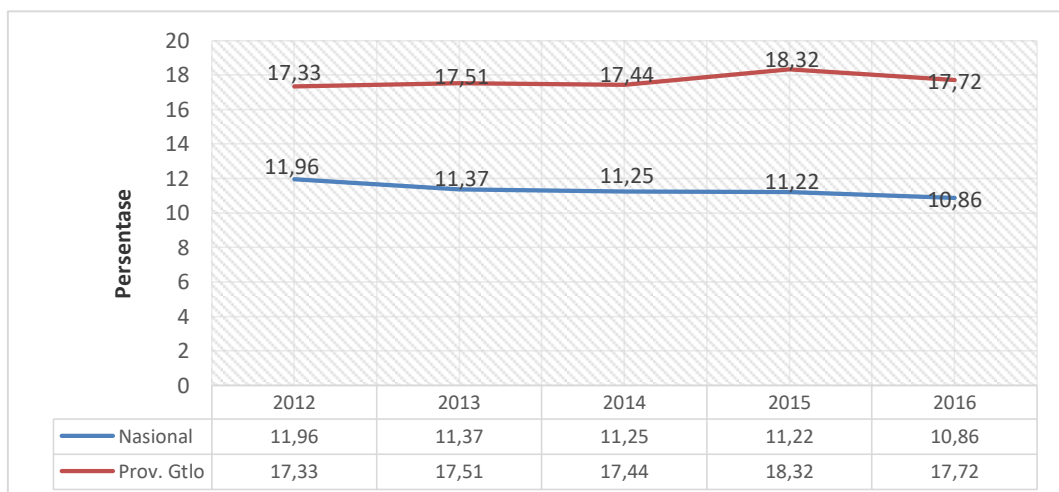
Masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten, dimana Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengindikasikan ketimpangan (gap) pengeluaran

antara penduduk miskin. Pada periode Tahun 2012-2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa persentase tertinggi berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 22,43%, dan terendah berada di Kota Gorontalo dengan persentase sebesar 6,05%.

Dari beberapa target tersebut di atas, target yang selaras dengan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 adalah:

TARGET 1 – Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari US\$ 1,25 per hari.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Gorontalo semakin menurun dari tahun ke tahun. Selama periode September 2015 – Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebanyak 3.327 jiwa. Pada September 2015 tercatat sebanyak 206.513 jiwa penduduk miskin, sedangkan pada Maret 2016 sebanyak 203.186 jiwa. Adapun persentase angka kemiskinan pada bulan September 2016 sebesar 17,63%, mengalami penurunan dibanding



bulan Maret 2016 sebesar 17,72%. Penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sejalan dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

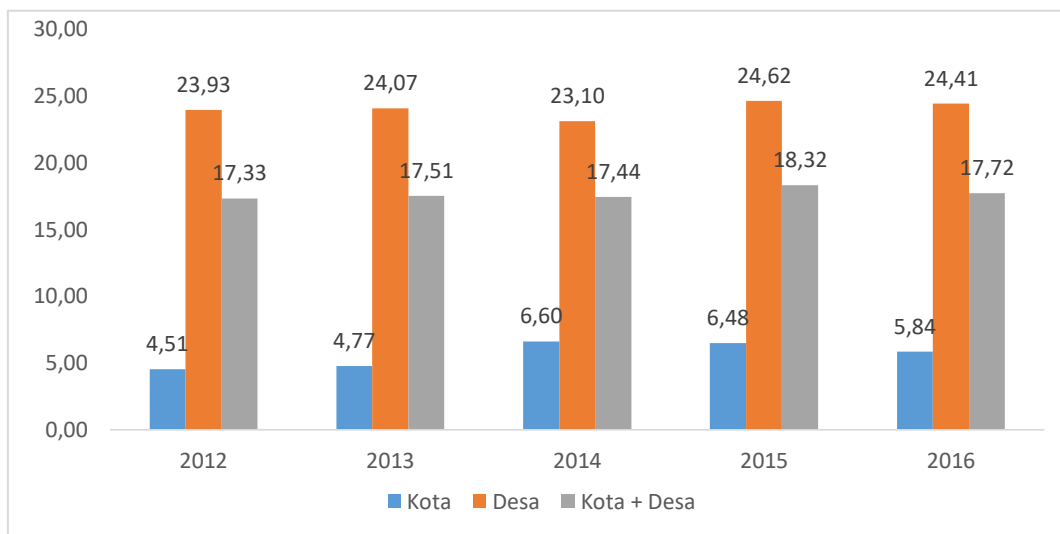
Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2012-2016

Meskipun demikian, persentase angka kemiskinan Provinsi Gorontalo masih lebih tinggi dari persentase angka kemiskinan rata-rata nasional yang berada di angka 11,13%. Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat juga masih terjadi yang ditunjukkan dengan indeks gini sebesar 0,41 di tahun 2016. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk berupaya lebih keras lagi dalam merumuskan program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih akurat dan tepat sasaran melalui 4 klaster yaitu bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil, dan program-program pro rakyat.

Peran komoditi makanan dan non-makanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Jika dilihat berdasarkan komponen makanan yang disebut Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan komponen non-makanan yang disebut Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), maka pada Maret 2016 tercatat wilayah perkotaan memiliki GKM lebih rendah dibanding wilayah pedesaan sebesar Rp15.726. Sedangkan dari sisi GKNM terdapat perbedaan sebesar Rp15.844 dimana wilayah perkotaan memiliki GKNM lebih tinggi yaitu Rp75.076 dibandingkan GKNM pedesaan sebesar Rp59.232. Kondisi ini dipengaruhi oleh besarnya kebutuhan dan harga komoditi non-makanan (seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan, dan jasa) di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Tingkat kemiskinan

sebesar 24,41% penduduk miskin berada di pedesaan, sedangkan di perkotaan lebih rendah sebesar 5,84%. Pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo harus diarahkan pada implementasi program dan kegiatan pembangunan di daerah terutama di wilayah pedesaan. Peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya terdapat kantong-kantong kemiskinan dapat dioptimalkan. Sehingga dampak pelaksanaan pembangunan bisa turut dirasakan oleh masyarakat sampai ke pedesaan yang masih mengalami kemiskinan.



Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Wilayah (Desa dan Kota), 2012-2016

Tabel 2
Indikator Kemiskinan Provinsi Gorontalo, Tahun 2012 – 2016

Indikator		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2012	Kota	17.75	217,073	0.639	0.118
	Desa	169.02	210,101	4.532	1.217
	Desa+Kota	186.76	212,476	3.206	0.842
2013	Kota	22.56	237,6	0.646	0.104
	Desa	175.92	232,048	4,548	1.237
	Desa+Kota	198.47	233,942	3.217	0.850
2014	Kota	23.88	250,157	1.088	0.234
	Desa	171.22	246,29	4.186	1.143

	Desa+Kota	195.10	247,611	3.128	0.832
2015	Kota	27.01	174,581	1.320	0.378
	Desa	179.51	275,163	4.009	1.142
	Desa+Kota	206.51	274,961	3.076	0.877
2016	Kota	24.02	287.156	0,724	0,138
	Desa	179.67	285.999	3,948	0,937
	Desa+Kota	203.69	286.968	2.787	0.649

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Indikator kemiskinan lainnya, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P_2) yang disajikan dalam bentuk Indeks (Tabel 2). Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa **rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil**, yang artinya semakin rendah nilai indeks, maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengindikasikan **ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin**. Pada periode Tahun 2012-2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Tabel 3
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Kemiskinan
Gorontalo	372.856	81.283	21,80
Boalemo	154.008	33.374	21,67
Pohuwato	150.385	33.731	22,43
Bone Bolango	155.238	28.704	18,49
Gorontalo Utara	111.824	21.168	18,93
Kota Gorontalo	206.454	12.490	6,05
Provinsi Gorontalo	1.150.765	203.690	17,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Berdasarkan lokasi, persentase kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Pohuwato yaitu 22,43%, dan terendah berada di Kota Gorontalo yaitu 6,05%,

seperti yang terlihat pada Tabel 3. Ketimpangan penduduk miskin di area kabupaten/kota yang masih cukup besar mendorong upaya optimalisasi peran pemerintah daerah yang di wilayahnya masih terdapat kantong-kantong kemiskinan. Perbaikan infrastruktur dasar pedesaan, peningkatan aksesibilitas terhadap sumber daya, peningkatan kapasitas keluarga miskin, dan pemenuhan kebutuhan/layanan dasar merupakan sejumlah program yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

TARGET 3 – Menerapkan Upaya Perlindungan Sosial yang Tepat Bagi Semua

Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif menjadi salah satu strategi pemerintah dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Implentasi strategi ini didukung dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya melalui peningkatan kapasitas keluarga miskin. Persentase penanganan PMKS Provinsi Gorontalo meningkat drastis dari 6,5% di tahun 2012 menjadi 60% di tahun 2016. Dari tahun 2012-2016, jumlah PMKS yang tertangani meningkat sebesar 118.316 (Tabel 4).

Tabel 4
Jumlah PMKS yang Tertangani di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah PMKS yang tertangani	15.369	18.235	19.860	56.118	133.685
2	Jumlah PMKS yang ada	234.625	231.922	222.971	222.971	222.971
3	Persentase Penanganan PMKS	6.5	7.9	8.9	25.2	60.00

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 5
Jumlah PMKS Penerima Bantuan di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	19.472	22.175	25.825	75.258	171.391

2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	234.625	231.922	222.971	222.971	222.971
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	8.3	9.6	11.6	33.7	76.9

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Gorontalo, 2016

Upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program pemberian bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat PMKS. Di tahun 2016 tercatat penerima bantuan sosial adalah sebanyak 171.391 PMKS. Jumlah ini meningkat lebih dari 50% dari jumlah penerima bantuan sosial di tahun 2015 sebanyak 75.258 PMKS (Tabel 5).

Sementara itu, peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia (lansia) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyandang disabilitas dan lansia sering menghadapi resiko kerentanan karena belum adanya kebijakan yang terstruktur, masif dan berpihak. Keterbatasan data terkait keberadaan dan kondisi penyandang disabilitas dan lansia menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyediaan layanan dan akses bagi mereka yang akhirnya berdampak pada risiko keterlantaran dan kemiskinan. Disamping itu, belum sempurnanya skema perlindungan sosial, baik bantuan maupun jaminan sosial, menjadi penyebab masih rendahnya pelayanan khususnya bagi lansia.

TARGET 4 – Menjamin Akses yang Sama Terhadap Pelayanan Dasar

Disamping perlindungan sosial, penurunan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Perluasan jangkauan dalam penyediaan layanan publik diarahkan

pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Akses terhadap pelayanan kesehatan. Pada aspek cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien miskin, terjadi peningkatan yang cukup drastis sebesar 7,6% di tahun 2016 dibandingkan dengan cakupan di tahun 2015 yang hanya sebesar 1,8% (Tabel 6). Peningkatan ini didorong salah satunya oleh program Jamkesta yang diimplementasikan pemerintah Provinsi Gorontalo dari tahun 2012-2017. Hingga tahun 2016, pemerintah telah memberikan Jaminan Kesehatan kepada 235.058 jiwa/tahun, meskipun masih terdapat masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Tabel 6
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016 Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Gorontalo	11,5	12,5	0	1,9	7,61
2	Gorontalo	0,3	0	0	0	0,88
3	Boalemo	4,4	0,8	0,8	2,4	29,94
4	Pohuwato	10,0	0,7	0	1,6	2
5	Bone Bolango	6,1	8,6	6,0	2,4	3,1
6	Gorontalo Utara	0,6	0,4	0	1,4	2,10
	Provinsi Gorontalo	3,5	2,9	3,4	1,8	7,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2016

Jika dilihat dari aspek aksesibilitas persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan yang fluktuatif namun cenderung menurun. Di tahun 2012 tercatat sebanyak 90,5% ibu yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan, namun di tahun 2016 tercatat hanya sebesar 82,9%. Tren penurunan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ini terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara mengalami penurunan yang paling signifikan dimana persentase cakupan persalinan yang ditolong orang

tenaga kesehatan pada tahun 2012 adalah sebesar 106,3% menjadi 68,3% di tahun 2016.

Akses terhadap kebutuhan sumber air minum dan sanitasi layak. Aksesibilitas penduduk terhadap kebutuhan dasar dalam hal kesehatan lingkungan/sanitasi dan ketersediaan air bersih sudah cukup baik. Dari tahun 2012-2016, pemenuhan kebutuhan sumber air minum layak terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016, akses terhadap air minum layak meningkat menjadi 71,95% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 54,62%. Akses terhadap sanitasi layak juga mengalami peningkatan menjadi 59,85% di tahun 2016. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 47,96%. Pencapaian ini didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non-perpipaan terlindungi serta pembangunan sarana dan pra sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat (Tabel 7).

Tabel 7
Data Cakupan Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Akses Air Minum Layak	Persen (%)	54,62	56,80	63,30	66,47	71,59
2.	Akses Sanitasi Layak	Persen (%)	47,96	50,52	54,07	54,96	59,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Meskipun cakupan akses air minum dan sanitasi layak menunjukkan perkembangan yang positif, namun pemerintah Provinsi Gorontalo masih dihadapkan pada permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang layak yaitu (1) minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, (2) semakin terbatasnya sumber air baku untuk minum, dan (3) kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Disamping itu, masih terdapat beberapa kawasan kumuh yang tersebar terutama di wilayah

Kota Gorontalo yang memerlukan perhatian dan penanganan secara lebih optimal.

Akses terhadap pendidikan. Melalui program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA), pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mempercepat keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun. Angka putus sekolah dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan/pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Selama tahun 2012-2016 angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan. Angka putus sekolah yang paling signifikan penurunannya terlihat pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK yaitu dari 0.50 di tahun 2012 menjadi 0.01 di tahun 2016. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan di Provinsi Gorontalo semakin baik dari tahun ke tahun.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan aksesibilitas pendidikan diantaranya jangkauan terhadap fasilitas, pembiayaan, dan kualitas layanan yang disediakan. Tingginya biaya pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan menengah pada kelompok miskin. Kualitas pendidikan menengah yang masih rendah juga dipengaruhi oleh belum memadainya fasilitas sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas.

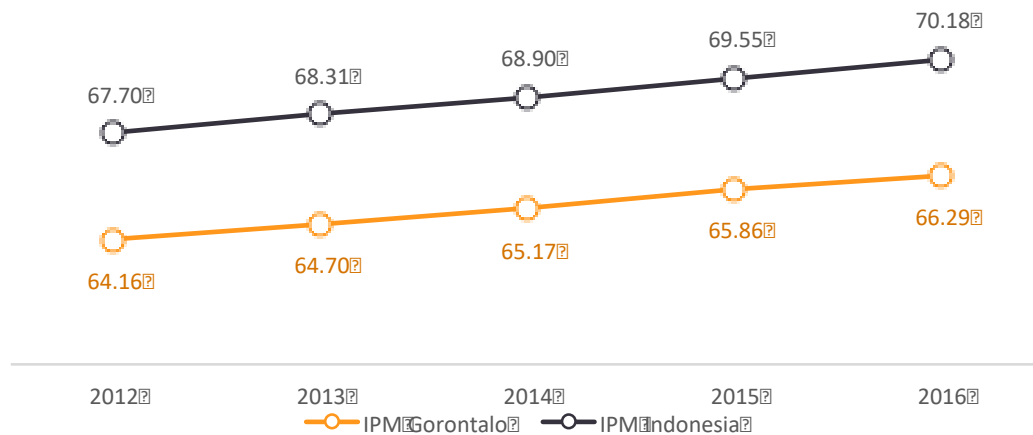
TARGET 5 – Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana melalui program pembangunan daerah guna menekan angka kemiskinan.

Program pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pembangunan Kesejahteraan sosial dapat dievaluasi dari sisi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan manusia. Capaian IPM di Provinsi Gorontalo secara garis besar meningkat rata-rata sebesar 0,87% dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut terjadi di masing-masing indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

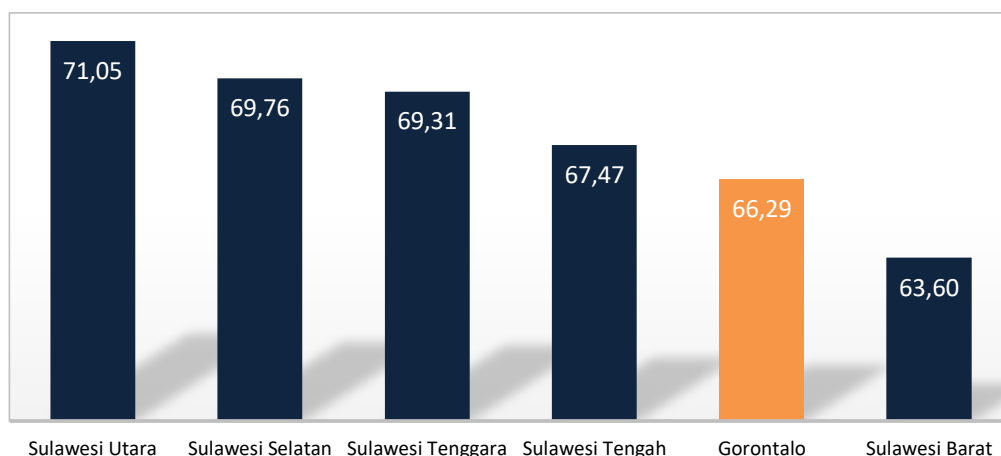
Meskipun demikian, IPM di Provinsi Gorontalo tahun 2016 masih berada dibawah rata-rata IPM Nasional yang berarti standar hidup penduduk Provinsi Gorontalo masih di bawah standar hidup nasional. Untuk itu penting bagi pemerintah Provinsi Gorontalo untuk selalu mengetahui kondisi aktual masyarakat miskin, mempelajari akar persoalan kemiskinan di Gorontalo dan mengupayakan perbaikan kebijakan pro rakyat yang ditempuh oleh pemerintah.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6 berikut:



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2016)

Gambar 5. Trend Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2016)

Gambar 6. Indeks Pembangunan Manusia se-Sulawesi Tahun 2012-2016

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo tahun 2016 IPM Provinsi Gorontalo sebesar 66,29, masih dibawah rata-rata IPM Nasional sebesar 70,18. Dalam kurun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata 0,87% per tahunnya. Peningkatan terjadi di masing-masing indikator pembentuk IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Hasil perhitungan IPM se-Provinsi Gorontalo khusus untuk tahun 2012-2016 diuraikan pada Tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Indikator	Th	Provinsi Gorontalo	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
Angka Harapan Hidup (tahun)	2012	66,76	66,94	66,5	61,86	67,41	64,73	71,57
	2013	66,92	67,12	66,51	62,09	67,45	64,76	71,62
	2014	67	67,29	66,53	62,33	67,5	64,79	71,68
	2015	67,12	67,49	66,63	62,43	67,6	64,99	71,69
	2016	67,13	67,67	66,66	62,65	67,65	65,06	71,74
Harapan Lama Sekolah	2012	11,78	11,32	11,42	11,31	12,18	11,37	13,28
	2013	12,13	11,6	11,6	11,48	12,26	11,52	13,34

(tahun)	2014	12,49	11,89	11,89	11,68	12,33	11,68	13,76
	2015	12,7	12,07	11,99	12,03	12,76	11,96	14,18
	2016	12,88	12,34	12,31	12,28	13,05	12,26	14,19
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	2012	6,92	6,01	6,25	6,26	7,45	6,07	10
	2013	6,96	6,12	6,31	6,53	7,67	6,53	10,24
	2014	6,97	6,15	6,53	6,54	7,7	6,59	10,28
	2015	7,05	6,23	6,63	6,62	7,73	6,61	10,29
	2016	7,12	6,3	6,64	6,67	7,81	6,62	10,3
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/kapita/tahun))	2012	8.673	7.516	7.914	8.644	8.332	7.847	10.943
	2013	8.719	7.566	7.973	8.889	8.601	7.948	10.965
	2014	8.762	7.598	8.032	8.925	8.669	7.999	11.019
	2015	9.035	7.817	8.398	9.146	8.900	8.178	11.269
	2016	9.175	7.895	8.589	9.381	9.115	8.270	11.360
IPM	2012	64,16	61,11	61,87	60,48	65,13	60,71	74,06
	2013	64,7	61,71	62,22	61,38	65,82	61,6	74,43
	2014	65,17	62,18	62,9	61,74	66,03	61,92	74,97
	2015	65,86	62,86	63,63	62,5	66,83	62,55	75,62
	2016	66,29	63,42	64,22	63,17	67,48	63,02	75,75



TUJUAN 2

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah :

1. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
2. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi.
3. Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil,

4. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas,
5. Mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional,
6. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak
7. Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia
8. Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target Tujuan 2 SDGs Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan sebagai berikut :

Belum tercapainya Performance PPH konsumsi yang menggambarkan keberagaman tingkat konsumsi masyarakat selang 2012-2016 yang belum mencapai sasaran sampai pada angka 80,9. Ketidakberagaman ini disebabkan oleh dominannya tingkat konsumsi kelompok pangan padi-padian khususnya beras dan masih rendahnya konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah.

Dari beberapa target tersebut di atas, target yang selaras dengan RPJMD Provinsi Gorontalo selama tahun 2017-2022 adalah:

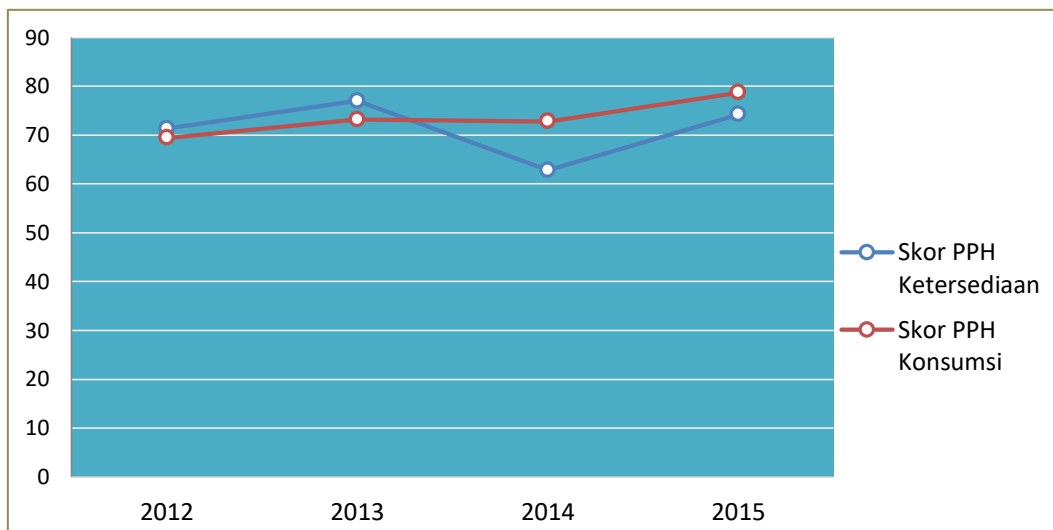
TARGET 1 – Menghilangkan Kelaparan

Kelaparan atau kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi penduduk, dimana kelaparan merupakan suatu proses sebab-

akibat dari kemiskinan. Salah satu parameter yang digunakan untuk menilai tingkat keseimbangan pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH dapat memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah dalam memperhatikan pola konsumsi pangan masyarakat dan asupan gizi yang seimbang dalam pemenuhan kecukupan gizi. **PPH Provinsi Gorontalo mengalami kondisi yang fluktuatif.** Kondisi ini diakibatkan oleh tidak dinamisnya peningkatan produksi. PPH ideal yang diharapkan pada tahun 2020 adalah 100, sedangkan PPH aktualnya berkisar antara 62.81-77. Untuk kondisi tahun 2015, PPH Ketersediaan mencapai 74.2 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 62.81.

Sementara itu *performance* PPH Konsumsi yang menggambarkan keberagaman tingkat konsumsi masyarakat selama selang tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan dimana tahun 2015 skor PPH Konsumsi mencapai angka 78.7. Namun demikian, skor ini belum mencapai sasaran pada angka 80.9. Ketidakberagaman ini disebabkan oleh dominannya tingkat konsumsi kelompok pangan padi-padian khususnya beras dan masih rendahnya konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian, hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Oleh karena itu, telah dilakukan upaya penganeekaragaman pola konsumsi pangan melalui program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kampanye “ **One day no rice** “.

Hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang diolah berdasarkan data ketersediaan produksi pangan pokok (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Gorontalo secara total berada pada status aman, kecuali wilayah Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan karena lahan produktif



yang jumlahnya sangat sedikit dan pertambahan penduduk yang meningkat secara signifikan sehingga menjadikan wilayah Kota Gorontalo sebagai wilayah rawan pangan secara kualitatif.

Sumber: Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 7. Perkembangan dan Sasaran PPH Ketersediaan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Menjadi skala prioritas selain ketahanan pangan adalah keamanan pangan (*food and bio security*) yang juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini dikarenakan keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu industri pangan yang berperan sebagai pengedar pangan ke konsumen harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sampai dengan saat ini, pusat-pusat riset untuk mendukung *food and bio-security* masih sangat terbatas serta belum ada sinergitas yang mantap antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga internasional, regional, sub regional, dan antar daerah guna memperkuat ketahanan pangan.

Selain keamanan pangan, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo terkait ketahanan pangan adalah peningkatan kontribusi subsektor tanaman bahan makanan (terutama padi) terhadap pertumbuhan sektor pertanian yang semakin lambat. Hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan semakin terbatasnya lahan pertanian, semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya air, dan rusaknya jaringan irigasi yang digunakan untuk mendukung produksi pangan. Femonema produksi dan konsumsi pangan diatas menuntut peran pemerintah untuk menjaga kestabilan distribusi pangan guna melindungi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang telah dilakukan melalui beberapa langkah terkait, antara lain: (1) program penguatan lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, (2) penyediaan cadangan pangan masyarakat melalui program

lambung pangan, dan (3) pengembangan sistem informasi harga, pasokan, dan akses pangan.

TARGET 2 – Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi

Persentase balita gizi buruk mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana terjadi kenaikan di tahun 2015 hingga mencapai 5,7%. Hal ini disebabkan antara lain oleh faktor kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat. Meskipun demikian, persentase balita gizi buruk kembali mengalami penurunan hingga 4,56% di tahun 2016. Semetara itu, terjadi peningkatan prevalensi balita kurang gizi dari 10,86% di tahun 2014 menjadi 24,5% di tahun 2015, namun kemudian menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik menjadi 22,25% di tahun 2016.

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Di Provinsi Gorontalo, permasalahan utama mengenai gizi anak antara lain disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang dipengaruhi oleh pola asuh ibu yang memegang peranan penting dalam memenuhi kecukupan gizi anak balitanya. Disamping itu, masalah kekurangan gizi dipengaruhi pula oleh ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga terutama pada keluarga miskin. Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tidak terlepas dari hasil produksi pertanian, perikanan, serta distribusi pangan yang ada di masyarakat dan daya beli pangan sampai di tingkat keluarga.

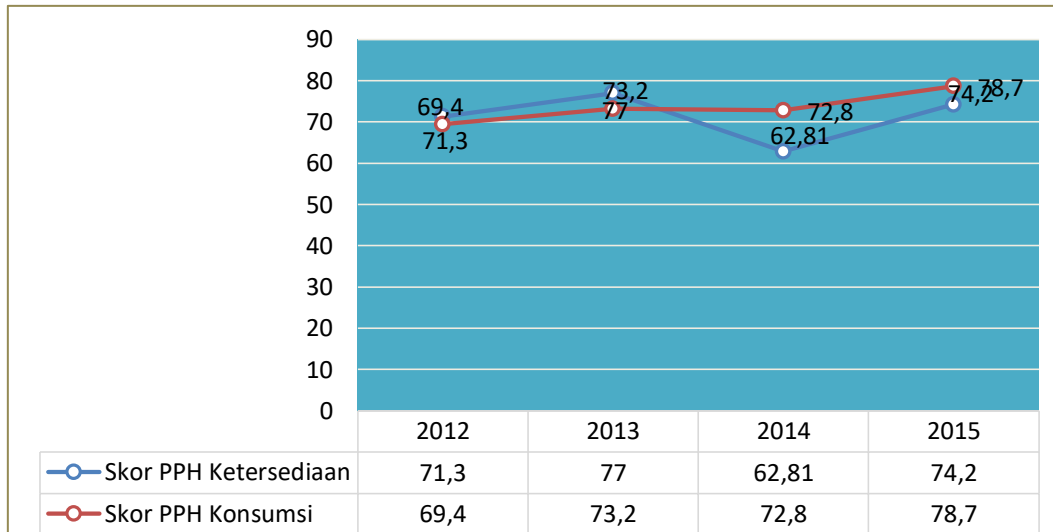
Tingkat kesakitan anak akibat diare yang mencapai 19,22% di tahun 2016 dan cakupan imunisasi lengkap pada bayi yang baru mencapai 89,60% di tahun 2016 (lebih rendah dari yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 93,75%) juga menjadi faktor pencetus masalah gizi masyarakat. Sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam peningkatan status gizi masyarakat adalah peningkatan kesiapan fasilitas layanan kesehatan bagi upaya perbaikan gizi, peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, dan mendorong pola hidup makanan sehat terutama dengan penurunan konsumsi gula, lemak, dan garam untuk menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular.

Program pembangunan untuk urusan pangan pada tahun 2012-2017 dilakukan melalui:

1. Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
3. Program pengembangan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
4. Program Pengkajian dan Informasi
5. Program Pengembangan Informasi dan Kerjasama
6. Program Maize Centre

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Apabila skor PPH tinggi, maka ketersediaan dan konsumsinya semakin beragam. **PPH di Provinsi Gorontalo mengalami kondisi yang fluktuatif.** Kondisi ini diakibatkan oleh tidak dinamisnya peningkatan produksi. PPH ideal yang diharapkan pada tahun 2020 adalah 100, sedangkan PPH aktualnya berkisar antara 62.81-77. Untuk kondisi tahun 2015, PPH Ketersediaan mencapai 74,2 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 62,81.

Sementara Performance PPH konsumsi yang menggambarkan keberagaman tingkat konsumsi masyarakat selang 2012-2016 belum mencapai sasaran sampai pada angka 80,9. Ketidakberagaman ini disebabkan oleh dominannya tingkat konsumsi kelompok pangan padi-padian khususnya beras dan masih rendahnya konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Oleh karena itu telah dilakukan upaya penganeekaragaman pola konsumsi pangan melalui program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kampanye “ **One day no rice** “. Namun demikian, Skor PPH Konsumsi selama selang tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2015 mencapai 78.7, atau meningkat sebesar 13,4% dari skor PPH tahun 2012.



Sumber Data: Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 8 Perkembangan dan Sasaran PPH Ketersediaan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yang diolah berdasarkan data ketersediaan produksi pangan pokok (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) menunjukkan, bahwa wilayah Provinsi Gorontalo secara total berada pada status aman, kecuali wilayah Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan karena lahan produktif sangat sedikit jumlahnya dan penambahan penduduk yang meningkat secara signifikan sehingga menjadikan wilayah Kota Gorontalo sebagai wilayah Rawan pangan secara Kualitatif. Selain itu, wilayah (desa, kecamatan, kabupaten) menjadi rawan pangan apabila terbatasnya sumberdaya pertanian, jumlah penduduk dan pertumbuhannya yang tinggi serta aksesibilitas pangan yang sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

Menjadi skala prioritas selain ketahanan pangan adalah keamanan pangan (*food and bio security*) juga perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, karena keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu industri pangan yang berperan sebagai pengedar pangan ke konsumen harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa tahun terakhir ini keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan

pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional.

Di seluruh dunia kesadaran dalam hal keamanan pangan semakin meningkat. Pangan semakin penting dan vital peranannya dalam perdagangan dunia. Berkaitan dengan keamanan pangan sampai saat ini belum ada sinergitas yang mantap antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga internasional, regional, sub regional, dan antar daerah guna memperkuat ketahanan pangan serta masih terbatasnya pusat-pusat riset untuk mendukung *food and bio-security*.

TARGET 3 – Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Pendapatan Produsen Makanan Skala Kecil

Sektor Pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dari PDRB, yaitu sebesar 27,63%, (Tabel 9) dan merupakan sektor yang potensial sehingga pemerintah menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan pelaksanaan pembangunan. Potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 35.685 ha terdiri dari sawah irigasi ± 27.674 ha dan sawah non irigasi seluas 8.011 ha. Terdapat juga potensi luasan lahan kering sebesar 285.449 ha yang terdiri dari ladang/huma 37.399 ha, tegal/kebun 191.941 ha, lahan kering yang sementara tidak diusahakan 56.109 ha.

Untuk memaksimalkan hasil produksi pertanian, lahan perkebunan kelapa juga dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Tabel 9
Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun Dasar 2010 Provinsi Gorontalo (%), 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	28,74	28,64	28,59	27,58	27,63

2	Tanaman Pangan	20,07	20,18	20,35	19,31	19,44
3	Tanaman Hortikultura Semusim	0,36	0,35	0,33	0,35	0,35
4	Perkebunan Semusim	0,38	0,38	0,33	0,29	0,29
5	Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,35	2,27	2,38	2,50	2,42
6	Perkebunan Tahunan	2,68	2,60	2,45	2,41	2,34
7	Peternakan	2,48	2,47	2,35	2,32	2,41
8	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38

Pengembangan sektor pertanian kedepan dihadapkan pada kondisi pertumbuhan sektor pertanian dan NTP yang cenderung terus menurun. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan diantaranya: (1) meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman; (2) kepemilikan lahan relative sempit; (3) fluktuasi perubahan iklim; (4) belum optimalnya infrastruktur pertanian; (5) daya saing produk pertanian yang relatif masih rendah; (6) masih adanya pemotongan sapi betina produktif; (7) terbatasnya petugas lapangan pertanian; (8) rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi informasi, pasar, dan permodalan; dan (9) masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong produksi pertanian adalah melalui peningkatan kualitas SDM petani sehingga mampu meningkatkan produksi dan produktifitasnya. Dalam hal ini, penyuluh memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang hal tersebut. Di tahun 2017, jumlah kelompok tani yang ada di Provinsi Gorontalo terdiri dari jumlah kelompok tani kelas pemula yaitu 3.451 (51,67%), jumlah kelompok tani lanjut yaitu 289 kelompok (sekitar 4,32%), jumlah kelompok tani madya yaitu 7 kelompok (sekitar 0,10%), sedangkan untuk kelompok tani kelas utama belum terbentuk (Tabel 10).

Tabel 10
Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Tingkatan Kelas Kelompok
Tahun 2017

	Nama	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Total
Per-Kelas (Sudah Di kukuhkan)	Pemula	890	1145	560	446	256	154	3.451
	Lanjut	24	186	27	18	-	34	289
	Madya	-	6	-	-	-	1	7
	Utama	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Sudah Di kukuhkan		914	1337	587	464	256	189	3.747
Jumlah Belum Di kukuhkan		448	782	796	337	494	75	2.932
Jumlah	Poktan	1362	2119	1383	801	750	264	6.679
Jumlah Poktan KWT		11	52	55	95	9	34	256
Anggota Poktan	Pria	14556	30752	14770	10210	9929	3736	83.953
	Wanita	736	1476	260	1554	740	967	5.733
	Pemilik	12564	24834	11727	8614	10081	1339	69.159
	Penggarap	2728	7234	2996	2522	562	1269	17.311
Jumlah	Anggota	15292	32228	15030	11764	10669	4703	89.686

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Simbangluh) 2017

TARGET 5 – Mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional.

Pertanian merupakan sektor yang paling strategis, terutama sub sektor tanaman pangan. Pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan konsumsi masyarakat dalam wilayah tersebut, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat. Data menunjukkan produktivitas subsektor tanaman pangan di Gorontalo mempunyai kecenderungan meningkat. Komoditas padi berada di atas rata-rata nasional. Komoditas utama subsektor tanaman pangan di Gorontalo meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Dikarenakan komoditas padi dan jagung menjadi bahan pangan strategis, maka produksi dan harga komoditas tersebut dikendalikan oleh pemerintah. Program pemerintah daerah Provinsi Gorontalo pada sektor pertanian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian
2. Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan mutu benih tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Program Perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura
6. Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pembangunan sub sector tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu ketahanan atau kedaulatan pangan. Pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan konsumsi masyarakat dalam wilayah tersebut, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Tabel 11
Rekapitulasi Luas Baku Lahan Sawah 2012-2016 Berdasarkan Kabupaten/Kota

KABUPATEN/ KOTA	2012	2013	2014	2015	2016	Perkembangan 2012 – 2016 (Rata- rata per Tahun)	
	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(%/thn)
Boalemo	4.818	4.841	4.912	4.895	5.396	116	2.29
Gorontalo	13.699	13.851	13.958	13.857	14.298	120	0.86
Pohuwato	3.598	3.918	4.718	3.9	6.685	617	13.19
Bone Bolango	2.059	2.217	2.115	2.345	2.221	32	1.53
Gorontalo Utara	5.638	6.511	6.536	6.209	6.242	121	2.06
Kota Gorontalo	916	901	875	852	843	-15	-1.65
Jumlah Provinsi	30.728	32.239	33.114	32.058	35.685	1.136	3.81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Sektor pertanian di Provinsi Gorontalo merupakan sektor yang potensial. Potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 35.685 ha yang terdiri dari sawah irigasi

± 27.674 ha dan sawah non irigasi seluas 8.011 ha. Juga terdapat potensi luasan lahan kering seluas 285.449 ha yang terdiri dari ladang/huma 37.399 ha, tegal/kebun 191.941 ha, lahan kering yang sementara tidak diusahakan 56.109 ha (Tabel 11). Disamping itu pada lahan perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Data menunjukkan produktivitas subsektor tanaman pangan di Gorontalo mempunyai kecenderungan meningkat. Komoditas padi bahkan berada di atas rata-rata nasional. Komoditas utama subsektor tanaman pangan di Gorontalo meliputi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar. Komoditas padi dan jagung di wilayah Gorontalo, memiliki peran sebagai bahan pangan strategis. Karena peran strategis itu produksi produksi dan harga dikendalikan oleh Pemerintah.

Produksi sawah di Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebesar 337,330 ton gabah kering giling (GKG) mengalami peningkatan sebesar 4,31% dibandingkan dengan produksi di tahun 2015 sebesar 323,384 ton. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan benih unggul bersertifikat di tingkat petani. Produksi jagung pada tahun 2016 tercatat sebesar 911,350 ton sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar 643,513. Artinya terjadi kenaikan produksi jagung sebesar 41,62% berkat adanya bantuan Program UPSUS peningkatan luas tanam jagung dan perluasan tanam jagung. Disamping itu ketersediaan pupuk yang memadai dan meningkatnya kesadaran petani untuk menggunakan pupuk pada tanaman pertanian yang mereka miliki ikut mendorong peningkatan hasil produksi pertanian, baik padi maupun jagung (Tabel 12).

Jika dilihat dari sisi komoditi hortikultura, pada umumnya komoditi sayuran di tahun 2016 mengalami peningkatan luas panen dan produksi. Cabe rawit mengalami peningkatan produksi dari 8.238 ton di tahun 2015 menjadi 11.484 ton di tahun 2016 karena adanya bantuan benih cabe rawit yang didistribusikan ke semua Kabupaten-Kota se-Provinsi Gorontalo. Selain bantuan bibit,

peningkatan produksi hortikultura di tahun 2016 didorong oleh adanya bantuan fasilitas sarana produksi seperti pupuk dan pompa air yang digunakan untuk penyiraman tanaman. Sedangkan untuk tanaman biofarmaka seperti kunyit, jahe, temulawak, dan lainnya, belum dibudidayakan secara lebih luas.

Tabel 12
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Pangan Tahun 2012 – 2016

Tahun	Komoditi pangan	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah + ladang	Jagung	Kedelai	kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu
2012	Luas Panen (Ha)	51.155	38	51.193	135.543	2.851	1.003	154	307
	Produktivitas (Ku/ha)	48,02	31,58	48,01	47,57	12,1	11,23	12,86	123
	Produksi (ton)	245666	120	245786	644754	3451	1126	198	3776
2013	Luas Panen (Ha)	54865	2029	56894	140023	3367	956	139	364
	Produktivitas (Ku/ha)	52,9	28	52,01	47,65	13,1	13,41	13,09	124,64
	Produksi (ton)	290232	5681	295913	669094	4411	1282	182	4537
2014	Luas Panen (Ha)	57991	4699	62690	148816	2842	1043	98	302
	Produktivitas (Ku/ha)	52,36	23,57	50,2	48,37	15,04	11,76	13,38	132,04
	Produksi (ton)	303.627	11077	314703	719780	4273	1227	131	3988
2015	Luas Panen (Ha)	52223	2445	59668	129131	2375	769	105	197
	Produktivitas (Ku/ha)	56,52	32,05	55,51	49,83	13,48	9,83	13,11	134,69
	Produksi (ton)	323384	7836	331220	643513	3203	756	138	2663

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2017 (Angka Tetap, 2016)

Di sektor perkebunan, Provinsi Gorontalo memiliki hasil perkebunan yang cukup potensial. Hasil tanaman perkebunan Provinsi Gorontalo meliputi tanaman kelapa, kakao, kopi, cengkeh, pala, jambu, kacang mete, jagung, ubi kayu dan lainnya. Luas kawasan perkebunan dengan komoditi perkebunan yang cukup mendominasi dalam hal ini tanaman kelapa, cengkeh, tebu, kakao, untuk tahun 2016 mencapai 100.001 Ha.

Dari sisi produktivitas, produksi komoditi perkebunan cenderung bersifat fluktuatif. Produktivitas tanaman kelapa misalnya, yang merupakan komoditi

unggulan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif bahkan di tahun 2015 – 2016 terjadi penurunan hingga mencapai 54.865 ton.

Tabel 13
Peningkatan Luas Areal (Ha) Sesuai Komoditi Unggulan Tahun 2012-2016

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kelapa Dalam	65.664	64.802	66.695	66.715	67.495
2	Cengkeh	8.880	9.370	9.670	9.091	10.350
3	Tebu	10.228	7.768	7.301	7.719	7.049
4	Kakao	12.928	13.692	14.205	14.494	15.107
	Total	97.700	95.632	97.871	98.019	100.001

Sumber: Data Pertanian Provinsi Gorontalo, 2017

Penurunan produksi ini disebabkan antara lain karena musim kemarau panjang dan tidak adanya regenerasi terhadap tanaman kelapa yang menyebabkan tanaman kelapa menjadi kurang produktif. Lain halnya dengan kelapa, komoditi cengkeh mengalami peningkatan produksi rata-rata 0,04% per tahun dan tebu rata-rata 0.13% per tahun. Sementara untuk produksi kakao terjadi penurunan rata-rata 0,08% per tahun (Tabel 14).

Tabel 14
Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Komoditi (ton)	Jenis Komoditi					Ket
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kelapa Dalam	61.192	63.386	63.499	52.034	54.865	
2	Cengkeh	772	756	756	604	609	
3	Tebu	32.521	49.333	49.333	49.147	33.745	
4	Kakao	3.923	5.043	5.043	2.948	4.814	

Sumber : Data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2017

Pertumbuhan populasi ternak yang dikembangkan oleh masyarakat dan swasta di Gorontalo selama periode tahun 2012-2017 melalui fasilitasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah menurut komoditas ternak unggulan adalah sebagai berikut (Tabel 15):

Tabel 15
Perkembangan Populasi Ternak di Gorontalo Tahun 2012 – 2016

NO	Jenis Ternak	Tahun (ekor)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sapi Potong	202.974	174.858	192.229	199.743	211.954
2.	Kambing	94,679	83.472	82.205	86.344	93.274
3.	Ayam Buras	997.183	1.379.645	1.335.806	1.376.518	1.440.567

Sumber : Data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo dengan segala potensi sumber dayanya menjadi tempat yang layak untuk sektor peternakan. Populasi sapi dan kambing mengalami perkembangan yang fluktuatif. Terjadi penurunan populasi di tahun 2013-2015 yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya penyakit ternak seperti antrax atau cacingan. Disamping itu, faktor cuaca panas (*heat stress*) atau kemarau panjang mengakibatkan ketersediaan hijauan sebagai pakan utama sapi jauh berkurang sehingga produktifitas ternak menurun. Namun demikian, jumlah populasi tahun 2016 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 211.954 ekor ternak sapi dan 93.274 ekor untuk ternak kambing. Sementara untuk ternak ayam buras selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan populasi dari tahun ke tahun hingga di tahun 2016 mencapai 1.440.567. Di tahun 2014 populasi ayam buras sedikit mengalami penurunan disebabkan karena adanya serangan penyakit *Avian influenza* (AI) pada ternak ayam.

Tabel 16
Perkembangan Produksi Daging di Gorontalo Tahun 2012-2016

NO	Produksi Daging	Tahun (ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016**
1	Ayam lokal	184	1.513	1.397	2.037	1.621
2	Sapi	4.051	3.618	3.012	2.553	752
3	Kambing	95	178	177	158	80

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2016

Potensi pengembangan sektor peternakan Provinsi Gorontalo didorong oleh beberapa faktor pendukung diantaranya ketersediaan sumber pakan ternak yang

sangat besar, kelembagaan kelompok peternak, sumber air dan iklim yang cocok dengan budidaya ternak. Salah satu indikator dari agregasi peningkatan populasi dengan peningkatan produktifitas ternak dapat dicitrakan melalui gambaran dari peningkatan produksi hasil ternak (Tabel 16).

Dari sisi produksi daging sapi target sasaran tiap tahunnya meningkat antara lain: daging sapi rata-rata meningkat 2% per tahun, Kambing rata-rata pertahunnya 5,98% dan Ayam buras rata-rata pertahun 16,99%. Selain komoditi sapi, kambing, dan ayam, ada juga hasil produksi daging dari ternak lain, yaitu ayam pedaging, ayam ras petelur dan itik yang dapat berpengaruh pada jumlah konsumsi daging masyarakat. Hasil perkembangan Produksi daging ternak cenderung menurun disebabkan harga daging mahal sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat sangat kurang.



TUJUAN 3

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target yang dicapai dalam tujuan ini adalah:

1. Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonata setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
3. Mengakhiri epidemi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
4. Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

5. Pencegahan dan pengobatan, penyalagunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
6. Mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
7. Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang
9. Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
10. Memperkuat pelaksanaan *The Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
11. Penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *The Doha Declaration tentang the Trips Agreement and Public Health*.
12. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutment pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil
13. Memperkuat kapasitas suatu negara, khususnya negara berkembang tentang perinagatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Target Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia adalah :

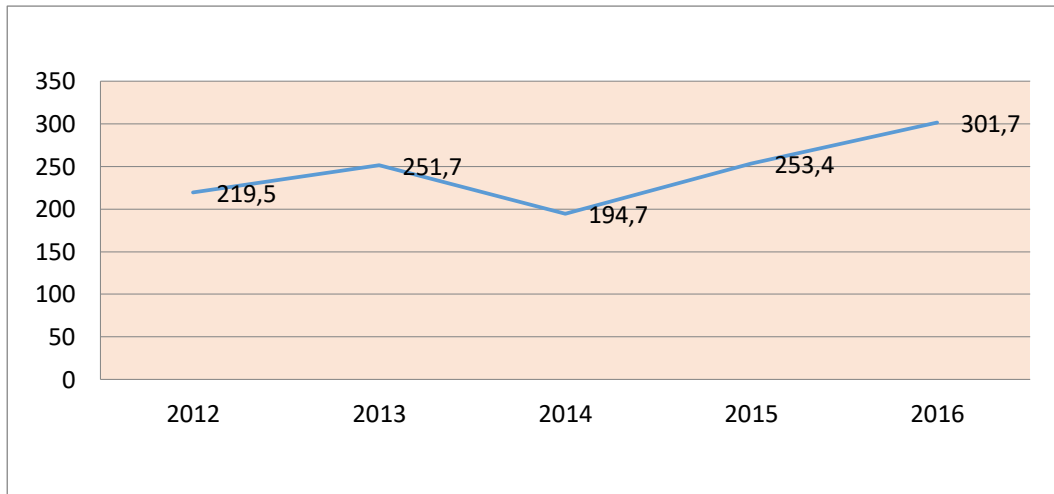
Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak yang ditandai masih tingginya angka kematian ibu (AKI) tahun 2015 yang mencapai 253,4 dan prevalensi gizi kurang yang mencapai 24,5 point ditahun 2015. Perhatian pemerintah daerah dalam memperbaiki capaian kedua indicator kesehatan ini. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup merupakan hal penting untuk memperbaiki hal ini. Pada tahun 2015, di Provinsi Gorontalo terdapat 13 rumah sakit dan 93 unit puskesmas. Sementara itu, jumlah tenaga medis di Provinsi Gorontalo sebanyak 93 dokter ahli, 211 dokter umum, 49 dokter gigi, 1.032 bidan, 148 farmasi dan 1.641 perawat. Ketersediaan sarana dan prasarana serta keberadaan SDM dapat mengimplementasi berbagai program pemerintah pusat ke daerah Gorontalo. Program pemerintah pusat yang berhubungan dengan kesehatan merupakan implementasi prioritas dimensi revolusi mental dalam pencapaian sasaran prioritas pemanfaatan modal social dan modal social serta sasaran prioritas kawasan perbatasan dengan sasaran pelayanan penyedia pelayanan pendidikan, kesehatan dan perumahan.

TARGET 1 – Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Gorontalo menjadi indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Di tahun 2016, AKI di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan signifikan mencapai 301,7 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Salah satu penyebab utama kematian ibu adalah kondisi hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan *post partum* yang seharusnya dapat diminimalisir apabila kualitas *Antenatal Care* dilaksanakan dengan baik.

Melihat trend data AKI yang terus mengalami peningkatan dari 194,8 per 100.000 KH di tahun 2014 menjadi 301,7 per 100.000 KH di tahun 2016

menunjukkan bahwa pencapaian target SDGs untuk mengurangi AKI hingga 70 per 100.000 KH pada tahun 2030 sangat sulit untuk dicapai jika upaya yang



dilakukan hanya dengan mengatasi faktor penyebab langsung kematian ibu, tanpa mengatasi penyebab tidak langsungnya.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 9. Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo Per 100.000 Kelahiran Hidup, Tahun 2012-2016

Fenomena peningkatan AKI erat kaitannya dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan fasilitas persalinan yang memadai. AKI dapat dicegah dan diturunkan dengan persalinan tepat dan cepat yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Tahun 2012-2016, data menunjukkan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo sangat fluktuatif namun cenderung menurun. Di Provinsi Gorontalo, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis menurun sebesar 9,5% dari 92,4% di tahun 2015 menjadi 82,9% di tahun 2016. Gorontalo Utara memiliki penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar 27,4% dari 95,7% di tahun 2015 menjadi 68,3% di tahun 2016. Hal ini selaras dengan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) yang menunjukkan bahwa di tahun 2016 Kabupaten Gorontalo Utara memiliki AKI tertinggi yaitu sebesar 510.7.

Disamping itu, data terkini di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa penyakit tidak menular (PTM) juga menjadi faktor utama penyebab kematian ibu. Meningkatnya PTM berdampak pada meningkatnya morbiditas, mortalitas, dan disabilitas di kalangan masyarakat. Disamping itu, PTM juga berdampak pada peningkatan beban ekonomi baik di tingkat individu maupun di tingkat nasional. Dari ketiga PTM tersebut, penyakit jantung/paru-paru menempati persentase tertinggi penyebab kematian ibu sebesar 27%.

Pendarahan menempati persentase tertinggi kedua sebesar 19%. Anemia dan kekurangan energy kronis (KEK) pada ibu hamil menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan dan infeksi pada ibu hamil dan melahirkan. Persentase tertinggi ketiga PTM penyebab kematian ibu melahirkan adalah hipertensi (18%). Hipertensi dapat terjadi karena kehamilan dan akan kembali normal kembali bila kehamilan sudah berakhir. Namun ada sejumlah kasus dimana tekanan darah ibu tidak kembali normal setelah bayi lahir. Kondisi ini akan menjadi lebih berat bila hipertensi sudah diderita ibu sebelum hamil.

Adapun tantangan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menurunkan AKI diantaranya: 1) peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil; 2) menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 3) penguatan tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu dan anak; 4) penguatan sistem rujukan; dan 5) menggalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Tentunya implementasi berbagai program kesehatan untuk menjawab tantangan diatas memerlukan adanya perhatian dalam pengalokasian program kegiatan dan pembiayaan dari seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang nantinya didukung oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai standard pelayanan maksimal urusan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan.

TARGET 2 – Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angk Kematian Neonata setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

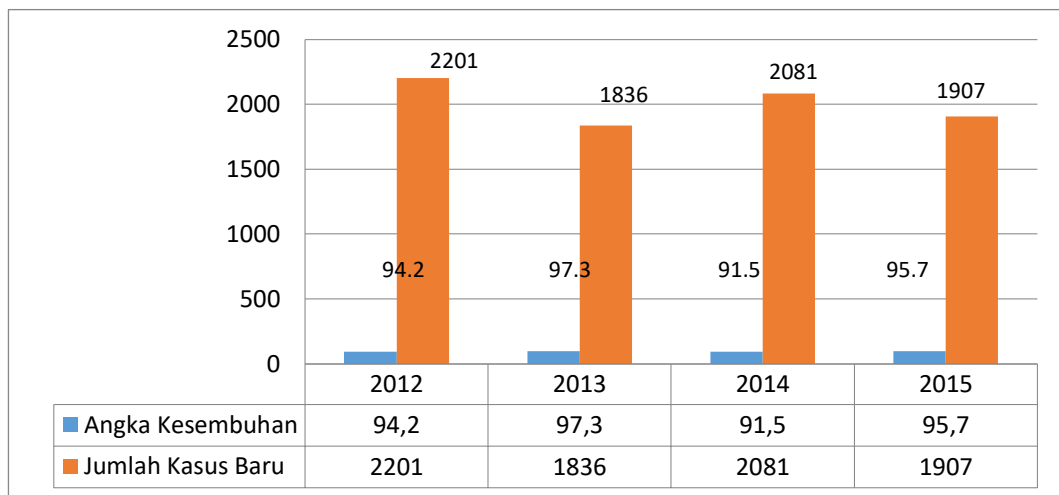
Penurunan Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya, Provinsi Gorontalo berhasil menekan AKN dibawah target SDGs. Jumlah bayi yang berusia sampai 28 hari adalah sebanyak 221 bayi dari 20.222 KH selama tahun 2016. Artinya, Provinsi Gorontalo memiliki AKN sebesar 10,9 per 1000 kelahiran hidup lebih rendah dari target SDGs sebesar 12 per 1000 KH. Penyebab utama kematian neonatal yang paling tinggi disebabkan oleh Asfiksia (36%), disusul oleh BBLR (35%), kelainan congenital (7,87%), dan penyebab lainnya (16,36%). Selaras dengan AKN, AKBa di Provinsi Gorontalo juga berada dibawah target SDGs yaitu 18,3 per 1000 KH. Adapun penyebab kematian balita di Provinsi Gorontalo antara lain disebabkan oleh Diare (20%), ISPA (8%), Typoid (4%), kelainan saluran cerna (4%), dan lain-lain (64%).

Dalam rangka menekan lebih jauh lagi angka kematian neonatal dan kematian balita, program yang terbukti efektif untuk mencegah penyakit yang dapat menghambat tumbuh kembang bayi adalah melalui pemberian imunisasi. Salah satu indikator keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari capaian *Universal Child Immunization* (UCI) yang merupakan gambaran dimana $\geq 87,5\%$ dari jumlah bayi yang ada di suatu desa/kelurahan sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Meskipun peningkatannya bersifat fluktuatif, namun di tahun 2016 Provinsi Gorontalo telah melampaui standard UCI, dimana 89,60% bayi telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo, capaian UCI tertinggi di tahun 2016 berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 98,08%, disusul oleh Kota Gorontalo 94,00%, Kabupaten Gorontalo 92,68%, dan Kabupaten Boalemo 88,00%. Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara masing-masing sebesar 84,24% dan 83,74% masih berada dibawah standard UCI.

TARGET 3 - Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular

Prevalensi penyakit menular dan tidak menular cenderung meningkat. Tingkat kesakitan merupakan cermin dari situasi derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Beberapa indikator morbiditas penyakit tertentu di Provinsi Gorontalo

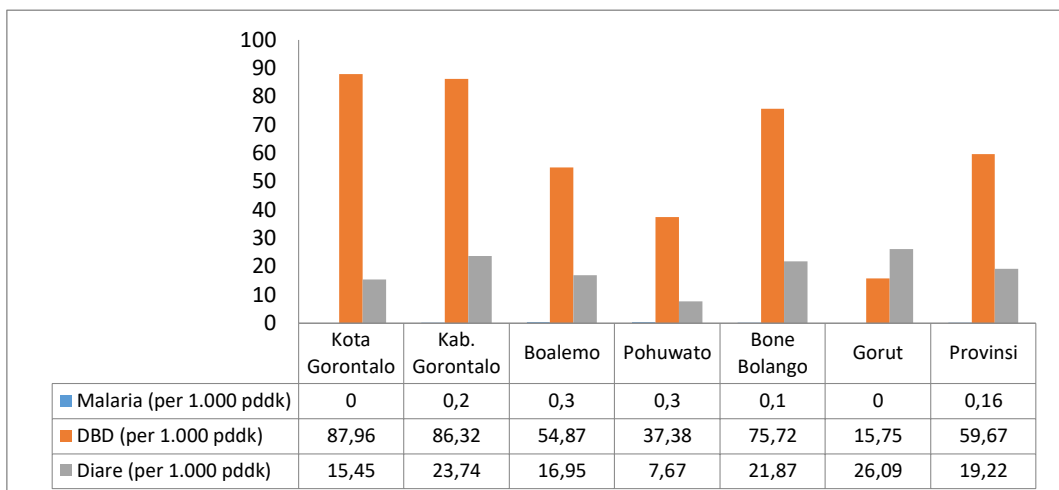
memiliki keterkaitan dengan komitmen global. Di tahun 2016, ditemukan kasus TB BTA+ sebanyak 2,014 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 yang ditemukan sebanyak 1,907 kasus TB BTA+. Untuk angka kesembuhan di tahun 2016 belum dapat diperhitungkan karena masih adanya penderita TB BTA+ yang belum selesai masa pengobatannya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 10. Jumlah dan Persentase Kesembuhan dan Jumlah Penemuan Kasus Baru TB BTA+ Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2016

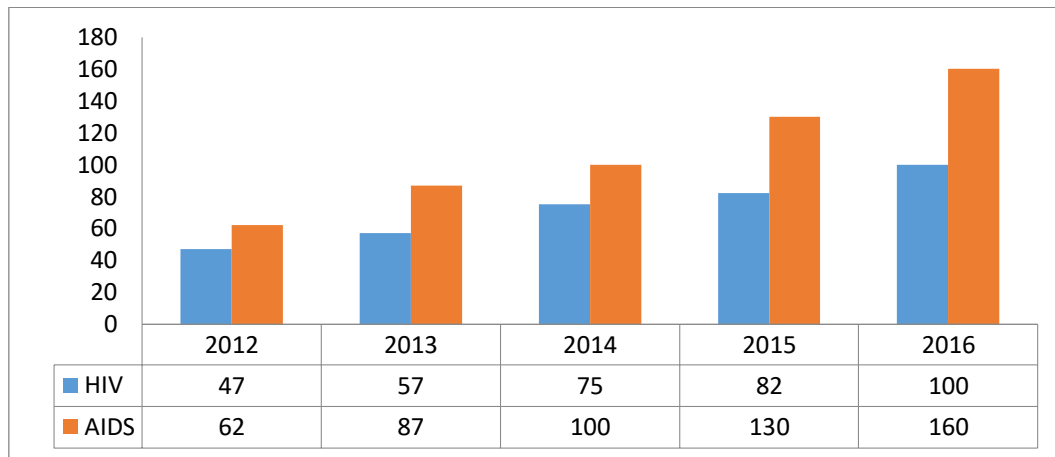
Disamping itu, angka kesakitan penyakit Malaria, DBD, dan Diare di Provinsi Gorontalo sebagaimana tergambar pada Gambar 11 di bawah menunjukkan bahwa di tahun 2016 Kota Gorontalo memiliki angka kesakitan penyakit DBD tertinggi yaitu sebesar 87.96. Sedangkan angka kesakitan tertinggi yang disebabkan oleh diare per 1.000 penduduk tahun 2016 berada di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 26.09.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 11. Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare Di Kabupaten/Kota Tahun 2016

Untuk kasus HIV dan AIDS, prevalensi penderita di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini. Berbagai program penanganan intensif secara menyeluruh dan terpadu telah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS diantaranya sosialisasi pencegahan HIV AIDS pada kelompok potensial.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 12. Jumlah Penderita HIV/AIDS Provinsi Gorontalo Tahun 2012 s/d 2016

Munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberculosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemic seperti HIV/AIDS, serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah mendorong pemerintah untuk menciptakan desa siaga yang merupakan strategi baru dalam pembangunan kesehatan. Cakupan desa siaga aktif di Provinsi Gorontalo meliputi 357 desa siaga aktif. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, namun cakupan desa siaga aktif di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 8.78% dari 82% di tahun 2015 menjadi 73.22% di tahun 2016.

TARGET 7 – Menjamin Akses Universal Terhadap Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Angka *Total Fertility Rate* (TFR) Provinsi Gorontalo relative sama dengan pencapaian nasional yang mengalami stagnansi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu 2,6 anak per wanita. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo periode 2015-2016 adalah sebesar 1,55%. Pada periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk terbesar disumbang oleh Kabupaten Boalemo (2,79%), diikuti oleh Kabupaten Pohuwato (2,38%). Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada kedua wilayah tersebut utamanya disebabkan karena merupakan daerah tujuan transmigrasi. Sementara itu, Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk terendah, yaitu sebesar 0,65%. Sedangkan Kota Gorontalo yang merupakan wilayah terpadat penduduknya, memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,10%.

Guna mengontrol laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan kebijakan pembangunan diantaranya: (1) peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang; (2) pemberian informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB; (3) pemberian pelayanan KB lanjutan; (4) peningkatan pelayanan dan penanganan KB pasca persalinan dan pasca keguguran; dan (5) penanganan komplikasi dan efek samping.

TARGET 8 – Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Pemerintah Provinsi Gorontalo pada periode 2012-2017 melalui program Jamkesta telah melaksanakan jaminan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 Tahun 2004 guna membantu peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dilakukan untuk mencapai *universal health coverage*. Hingga tahun 2016, pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan Jaminan Kesehatan kepada 235.058 jiwa/tahun meskipun masih terdapat masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan, pemerintah Provinsi Gorontalo dihadapkan pada tantangan dalam pengembangan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang meliputi: (1) peningkatan pelayanan kepesertaan; (2) pengembangan manfaat jaminan; dan (3) penyiapan standar, dan pemenuhan standar sarana, tenaga, dan manajemen pelayanan kesehatan.

TARGET 9 – Mengurangi Jumlah Kematian dan Kesakitan Akibat Bahan Kimia Berbahaya, serta Polusi dan Kontaminasi Udara, Air, dan Tanah.

Kualitas air sungai strategis di Provinsi Gorontalo berada pada kondisi Cemar Ringan sampai Cemar Sedang. Pertambahan penduduk yang cepat banyak membawa dampak negatif terhadap sumberdaya air, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dampak negatif ini dapat dilihat antara lain dari segi pemanfaatan air. Besarnya jumlah penduduk yang menggunakan air tersebut melampaui kemampuan sumberdaya air yang tersedia sehingga memberikan dampak negatif terhadap sumberdaya air itu sendiri. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air beberapa sungai strategis di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa status mutu air sungai berada pada kondisi **Cemar Ringan** sampai **Cemar Sedang**, seperti yang terlihat pada Tabel 17.

Tabel 17
Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo Hasil Pemantauan Tahun 2016

No	Nama Sungai	Status Mutu Air Sungai			Parameter yang melebihi baku mutu
		Hulu	Tengah	Hilir	
1	Sungai Bone	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, E.Coli dan Total Coliorm
2	Sungai Paguyaman	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, COD, DO, TSS, E.Coli dan Total Coliform
3	Sungai Bionga	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	E.Coli dan Total Coliorm
4	Sungai Buladu	Cemar	Cemar	Cemar	E.Coli dan Total

		SEDANG	SEDANG	SEDANG	Coliorm
5	Sungai Taluduyunu	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	E.Coli dan Total Coliorm

Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo, 2016

Berbeda dengan kondisi air sungai, pemantauan kualitas udara pada bulan Januari 2016 menunjukkan bahwa **kualitas udara di Provinsi Gorontalo tergolong baik karena masih berada dibawah baku mutu udara yang dipersyaratkan (Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tetang Baku Mutu Udara Ambient Nasional)**. Terdapat lima parameter yang diukur dalam pemantauan tersebut yaitu CO, NO₂, Ozon, SO₂, dan TSP. Secara umum, kualitas udara ambient di Provinsi Gorontalo masih memenuhi syarat karena semua parameter yang diukur masih dibawah baku mutu udara ambient nasional.

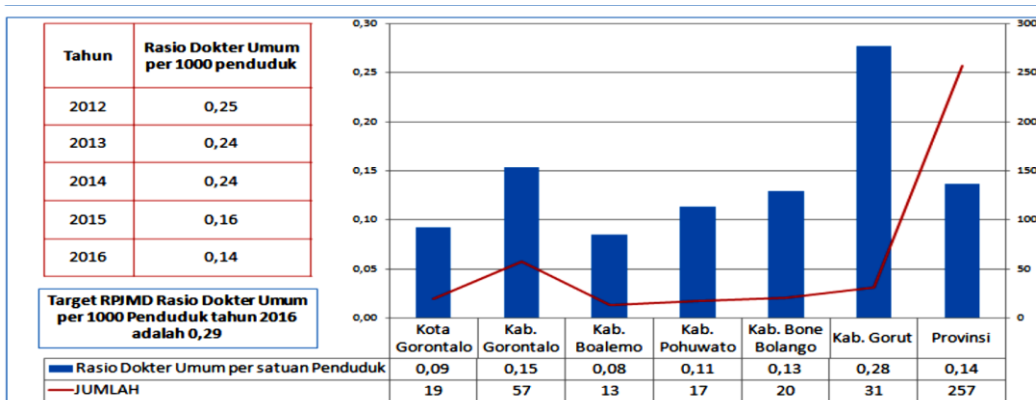
Adapun tantangan yang dihadapi kedepannya, yaitu (1) meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan), (2) memperkuat pengendalian pencemaran, (3) penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, dan (4) meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan.

TARGET 12 – Meningkatkan Secara Signifikan Rekrutment, Pengembangan, Pelatihan, dan Retensi Tenaga Kesehatan.

Permasalahan SDM kesehatan di Provinsi Gorontalo masih belum merata. Hingga tahun 2016, pemenuhan tenaga kesehatan di FKTP belum merata. Dalam hal ketersediaan di tingkat populasi, WHO merekomendasikan 10 dokter untuk setiap 10.000 penduduk. Hingga tahun 2016, baru terdapat 2 Puskesmas dari 93 Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, kesmas, kesling, analis, gizi dan farmasi) yang dipersyaratkan oleh Permenkes 75 Tahun 2014. Sedangkan untuk Rumah Sakit kelas C dan D, hanya 1 dari 7 RS yang telah memiliki 4 dokter spesialis dasar (penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, spesialis anak dan bedah) dan 3 dokter spesialis

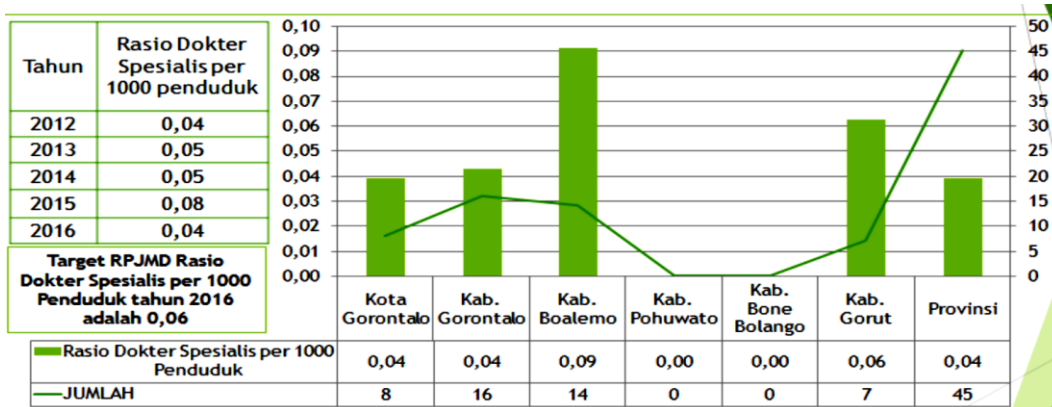
penunjang (Radiologi, Anastesi dan Rehab Medik) berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014.

Di tahun 2016, rasio dokter umum per 1.000 penduduk baru sebesar 0.14% masih jauh dibawah taget RPJMD sebesar 0.29%. Begitu pula dengan dokter spesialis dan perawat dimana rasio keduanya masih berada di bawah target RPJMD. Berikut ini gambaran rasio dokter umum, dokter spesialis, dan perawat per 1000 penduduk di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016.



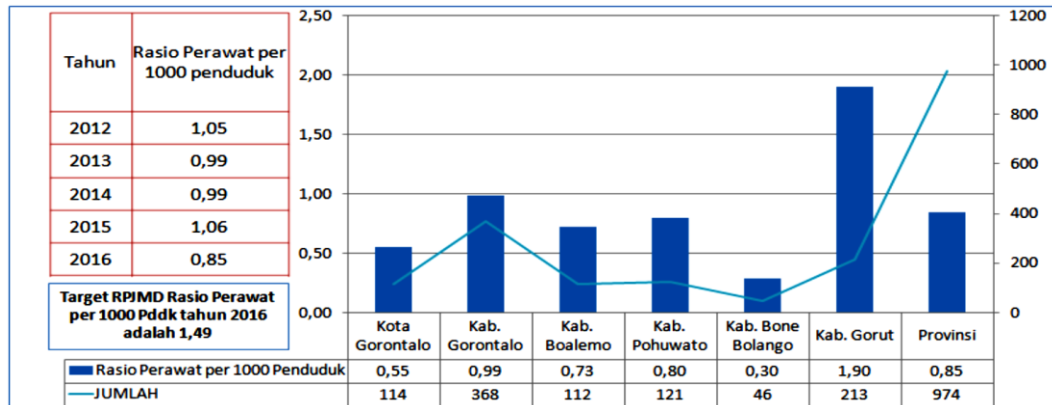
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 13. Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 14. Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

Gambar 15. Rasio Perawat Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Adapun tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemenuhan SDM kesehatan adalah: (1) menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di FKTP dan FKTL; (2) menerapkan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh tenaga kesehatan; dan (3) meningkatkan kompetensi nakes melalui pendidikan dan pelatihan.



TUJUAN 4

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Orang

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah:

1. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan,

- pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
3. Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
 4. Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
 5. Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
 6. Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
 7. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
 8. Secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.
 9. Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

TARGET 1 – Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada periode RPJMD 2012-2017 adalah pendidikan gratis. Untuk itu pembangunan sektor pendidikan terus ditingkatkan melalui program pendidikan formal maupun non formal diantaranya: program PAUD, program pendidikan dasar, program pendidikan menengah, program pendidikan untuk kesetaraan, kursus dan kelembagaan dan program pendidikan khusus serta pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin.

Capaian di sektor pendidikan hingga tahun 2016 relatif cukup baik dilihat dari pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di hampir semua tingkatan. Untuk pendidikan dasar setingkat SD/MI, terjadi peningkatan APM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, namun mengalami sedikit penurunan sebesar 3.32% di tahun 2016. Peningkatan cukup signifikan justru terlihat pada jenjang pendidikan menengah atas atau SMA/MA/SMK dengan peningkatan APM sebesar 20.83% dari sebelumnya hanya sebesar 55.30% di tahun 2012 menjadi 76.13% di tahun 2016. Meskipun tidak sebesar pendidikan menengah atas, namun APM pada jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari 69.99% pada tahun 2012 menjadi 75.43% pada tahun 2016. Uraian perkembangan APM Provinsi Gorontalo dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 thn yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	131,413	136,430	139,082	141,510	114,900
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	136,362	138,297	137,746	139,199	125,196

1.3	APM SD/MI	96.37	98.65	100.97	101.66	98.34
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 thn yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	45,004	47,623	47,442	49,720	49,130
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	64,301	66,189	64,936	66,470	65,126
2.3	APM SMP/MTs	69.99	71.95	73.06	74.80	75.43
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 thn yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	36,343	39,477	35,221	43,532	45,093
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	65,720	60,968	53,470	61,021	59,232
3.3	APM SMA/MA/SMK	55.30	64.75	65.87	71.34	76.13

Sumber: Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2017

APK Provinsi Gorontalo juga mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan. APK PAUD mengalami rata-rata peningkatan sebesar 8.08% dari tahun 2012-2016. Sementara APK SD/MI terus mengalami peningkatan bahkan melampaui 100%. APK SMP/MTs mengalami peningkatan rata-rata 0.75% pertahun dan SMA/MA/SMK rata-rata 6.18% per tahun. Meskipun demikian, dalam lima tahun kedepan pemerintah Provinsi Gorontalo masih dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan akses pendidikan Wajar 12 Tahun dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai, serta membangun sistem yang lebih komprehensif yang mampu mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kecerdasan jamak individu secara maksimal. Adapun data perkembangan APK Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 19
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	PAUD					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan PAUD/KB	51,385	55,707	51,303	49,798	51,185
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 0-6 thn	126,810	95,943	108,404	98,806	96,737
1.3	APK PAUD/KB	40.52	58.06	47.33	50.40	52.91
2	SD/MI					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	151,416	158,060	156,535	159,007	139,473
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	136,362	138,297	137,746	139,199	125,196
2.3	APK SD/MI	111.04	114.29	113.64	114.23	111.40
3	AMP/MTs					
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	62,366	64,243	63,520	65,706	64,967
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	64,301	66,189	64,936	66,470	65,126
3.3	APK SMP/MTs	96.99	97.06	97.82	98.85	99.75
4	SMA/MA/SMK					
4.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	48,692	51,933	47,155	54,870	52,100
4.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	65,720	60,968	53,470	61,021	55,694
4.3	APK SMA/MA/SMK	74.09	85.18	88.19	89.92	93.54

Sumber: Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Keberlangsungan pendidikan tidak lepas dari ketersediaan sekolah yang memadai dan terjangkau. Berdasarkan data pendidikan Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo tahun 2016, Provinsi Gorontalo telah memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Usia Dini - TK (887 sekolah); Pendidikan Dasar - SD Negeri/Swasta (925 unit) dan MI Negeri/Swasta (88 unit); Pendidikan Menengah - SMP Negeri/Swasta (336 unit) dan MTs Negeri/Swasta (69 unit); hingga Pendidikan Atas - SMA Negeri/swasta (60 Unit), MA Negeri/Swasta (36

unit) dan SMK Negeri/Swasta (52 unit). Masih terdapat 8,9% gedung sekolah tahun 2016 di Provinsi Gorontalo yang tidak dalam kondisi baik (kurang layak digunakan dalam proses belajar mengajar). Melalui program peningkatan akses layanan pendidikan selama 2012-2016 yang diprioritaskan pada pembangunan dan rehab gedung sekolah dan ruang kelas, maka angka tersebut mengalami penurunan rata-rata sebesar 15,3% dari tahun 2012.

Tabel 20
Persentase Sekolah dengan Kondisi Baik

Tingkat Sekolah	Tahun (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
-SD/MI	78,05	84,43	92.30	87.00	87.02
- SMP/MTs	81,67	83,03	96.13	90.50	91.00
- SMA/MA	89,75	88,81	90.28	91.22	93.00
- SMK	88,98	88,62	93.73	94.52	93.60

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2017

TARGET 2 – Menjamin Semua Anak Memiliki Akses Terhadap Perkembangan dan Pengasuhan Anak Usia Dini

Kematangan pendidikan sejak usia dini sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dari berbagai aspek kecerdasan. Dalam kurun waktu lima tahun 2012-2016, perkembangan APK PAUD/KB di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,08% setiap tahunnya. Peningkatan partisipasi PAUD ini tidak terlepas dari tingginya peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun 2016, Kabupaten Boalemo memiliki APK PAUD/KB tertinggi yaitu 70,82%, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara memiliki APK PAUD/KB terendah yaitu 35,08%.

Tabel 21
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/KB
Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Bersekolah di PAUD/KB	Jumlah Penduduk Usia 4-6 thn	APK PAUD/KB
1	Kota Gorontalo	7.593	14.963	50,75
2	Gorontalo	14.910	23.843	62,53
3	Boalemo	5.172	7.303	70,82
4	Pohuwato	9.321	16.251	57,36
5	Bone Bolango	8.503	18.169	46,80
6	Gorontalo Utara	5.686	16.208	35,08
	Provinsi Gorontalo	51.185	96.737	52,91

Sumber: Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2016

TARGET 5 – Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan

Dalam bidang pendidikan, jumlah perempuan di Provinsi Gorontalo yang mengenyam pendidikan telah mengimbangi bahkan lebih tinggi dari jumlah laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan terhadap laki-laki tahun 2016 dimana APS perempuan sebesar 73,33% sementara APS laki-laki sebesar 70,18%. Peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan dapat diukur pula melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan. Berdasarkan data dibawah ini, dalam kurun waktu 2012-2015 IPG Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari 84,54 di tahun 2012 menjadi 85,87 di tahun 2015. Di tahun 2015, IPG tertinggi pada level Kabupaten/Kota dicapai oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 90,57, diikuti oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 86,00. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut sudah setara. Berikut uraian IPG di Provinsi Gorontalo berdasarkan Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 2012-2015:

Tabel 22
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

No	Kab/Kota/Provinsi	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	PROV. GORONTALO	84,54	84,57	85,09	85,87
2	Boalemo	75,05	77,63	78,92	79,32
3	Gorontalo	74,44	77,32	79,23	80,13
4	Pohuwato	88,72	89,32	90,32	90,57
5	Bone Bolango	82,57	84,40	85,99	86,00
6	Gorontalo Utara	74,85	77,89	79,85	79,99
7	Kota Gorontalo	82,84	84,37	85,17	85,51

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

TARGET 6 – Menjamin Kemampuan Literasi dan Numerasi

Angka Melek Huruf (AMH) dan kemampuan membaca-menulis/literasi merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang berkaitan langsung dengan pengembangan sumber daya manusia. Selama kurun waktu 2012-2016, AMH di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,29% per tahun. Di tahun 2016, AMH Provinsi Gorontalo telah mencapai 99,81%. Begitu pula dengan AMH di Kabupaten/Kota, seluruh Kabupaten/Kota memiliki AMH pada tingkat yang sama mencapai lebih dari 99,00%.

Tabel 23
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Angka Melek Huruf
		Usia Diatas 15 th Bisa Membaca dan Menulis	Usia 15 th Keatas	
1	Kota Gorontalo	124,939	125,064	99.90
2	Gorontalo	288,040	288,452	99.86
3	Boalemo	72,782	73,038	99.65
4	Pohuwato	22,202	22,417	99.04

5	Bone Bolango	85,912	86,034	99.86
6	Gorontalo Utara	53,482	53,585	99.81
	Jumlah	647,357	648,590	99.81

Sumber: Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Pencapaian AMH yang tinggi ini didukung oleh upaya pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penyediaan perpustakaan keliling dengan sasaran sekolah-sekolah dan desa-desa yang berada di wilayah IPM rendah se-Provinsi Gorontalo. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Namun demikian, sampai dengan tahun 2016 jumlah perpustakaan di Provinsi Gorontalo baru sebanyak 26 unit yang tersebar di kabupaten/kota. Jumlah ini dinilai masih sangat sedikit. Dalam pengembangan perpustakaan, kedepannya pemerintah daerah akan dihadapkan pada tantangan bagaimana mewujudkan perpustakaan sebagai sumber informasi yang mampu menyediakan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya budaya, sehingga mampu meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat.

TARGET 7 – Kemampuan siswa Gorontalo

Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu komponen penentu kelulusan siswa pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan penyelenggaraan UN merupakan upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan. Di Provinsi Gorontalo, jumlah siswa SD/MI yang mengikuti UN tahun 2011 tercatat sebesar 19.689 siswa yang berasal dari 901 satuan pendidikan, sedangkan SMP/MTs sebanyak 15.524 siswa. Capaian prestasi siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris memiliki ketimpangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya *gap* antara nilai tertinggi UN untuk masing-masing mata pelajaran dengan nilai terendah yang diperoleh siswa dalam UN di tahun 2011. Kompetensi dasar siswa SMP/MTs di

wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan Matematika perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan rerata nilai UN yang diperoleh siswa masih dibawah 5.50.

Tabel 24
Capaian Prestasi Siswa SD/MI Provinsi Gorontalo Tahun 2011

KAB/KOTA	JENJANG	MATA PELAJARAN								
		BAH. INDONESIA			MATEMATIKA			I P A		
		Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata
Kota Gorontalo	SD	9.10	4.20	7.45	9.60	3.20	6.54	9.80	3.70	7.21
	MI	9.70	4.90	7.96	9.80	3.90	7.04	9.90	4.60	7.60
	SDMI	9.70	4.20	7.48	9.80	3.20	6.57	9.90	3.70	7.24
Gorontalo	SD	9.30	4.30	7.64	9.60	3.90	7.25	9.50	3.90	7.62
	MI	8.90	5.80	7.62	9.00	4.80	7.24	9.10	5.10	7.58
	SDMI	9.30	4.30	7.64	9.60	3.90	7.25	9.50	3.90	7.61
Boalemo	SD	9.30	4.60	7.82	9.50	4.10	7.62	9.70	5.60	7.80
	MI	9.00	5.70	7.75	9.20	6.30	7.97	9.30	5.20	7.59
	SDMI	9.30	4.60	7.82	9.50	4.10	7.65	9.70	5.20	7.78
Pohuwato	SD	9.40	3.80	7.24	9.20	2.60	6.84	9.60	3.70	7.26
	MI	9.10	6.30	7.70	8.40	5.90	7.15	8.90	6.50	5.57
	SDMI	9.40	3.80	7.25	9.20	2.60	6.85	9.60	3.70	7.27
Bone Bolango	SD	9.20	3.90	7.21	9.20	2.60	6.36	9.60	3.80	6.98
	MI	8.20	3.70	6.75	8.10	4.00	5.97	8.50	3.80	6.16
	SDMI	9.20	3.70	7.19	9.20	2.60	6.34	9.60	3.80	6.95
Gorontalo Utara	SD	9.10	2.90	7.59	9.30	3.50	7.08	9.60	3.90	7.47
	MI	9.00	6.40	7.69	8.90	5.90	7.22	8.40	6.20	7.26
	SDMI	9.10	2.90	7.59	9.30	3.50	7.09	9.60	3.90	7.46
PROVINSI	SD	9.40	2.90	7.52	9.60	2.60	6.99	9.80	3.70	7.43
	MI	9.70	3.70	7.63	9.80	3.90	7.18	9.90	3.80	7.42
	SDMI	9.70	2.90	7.52	9.80	2.60	7.00	9.90	3.70	7.42

Sumber: Dikpora Provinsi Gorontalo

Tabel 25
Capaian Prestasi Siswa SMP/MTs Provinsi Gorontalo Tahun 2011

KAB/KOTA	JENJANG	MATA PELAJARAN											
		BAH. INDONESIA			BAH. INGGRIS			MATEMATIKA			I P A		
		Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata
Kota Gorontalo	SMP	7.52	9.10	4.00	7.11	9.60	4.20	7.63	9.50	4.20	7.63	9.60	4.40
	SMP-T	6.33	7.50	2.90	5.89	7.60	1.70	5.99	7.70	4.20	6.45	7.90	4.70
	MTS	6.88	9.00	4.90	7.18	8.50	4.10	7.13	9.70	4.00	6.05	9.40	4.30
	SMPMTS	7.42	9.10	2.90	7.12	9.60	1.70	7.55	9.70	4.00	7.39	9.60	4.30
Gorontalo	SMP	8.05	9.40	4.80	7.85	9.50	4.20	8.07	9.60	4.40	8.15	9.60	4.70
	SMP-T	7.64	8.40	5.00	7.45	8.80	5.20	7.68	8.90	5.90	7.74	8.70	5.90
	MTS	8.04	8.70	5.10	7.64	9.30	5.10	8.19	9.50	4.70	8.37	9.30	4.80
	SMPMTS	8.04	9.40	4.80	7.81	9.50	4.20	8.07	9.60	4.40	8.17	9.60	4.70
Boalemo	SMP	7.74	9.00	4.10	7.47	9.20	5.00	7.86	9.30	4.90	7.82	9.30	4.70
	SMP-T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MTS	7.82	8.70	5.00	7.69	9.20	6.10	8.06	9.10	5.60	7.95	9.20	6.00
	SMPMTS	7.75	9.00	4.10	7.50	9.20	5.00	7.88	9.30	4.90	7.83	9.30	4.70
Pohuwato	SMP	7.31	8.50	4.00	7.10	9.20	4.30	7.46	7.10	3.90	7.37	9.10	4.20
	SMP-T	7.31	7.60	4.90	6.99	8.50	6.00	7.49	7.90	4.50	7.22	8.50	6.60
	MTS	7.10	8.40	5.30	6.74	8.90	4.30	7.30	9.30	4.30	7.40	8.20	4.30
	SMPMTS	7.27	8.50	4.00	7.03	9.20	4.30	7.43	9.30	3.90	7.38	9.10	4.20
Bone Bolango	SMP	8.80	4.00	6.88	9.20	3.60	7.32	9.30	4.00	7.23	8.80	4.10	7.32
	SMP-T	6.80	3.80	5.61	6.80	5.80	6.28	7.30	4.00	6.21	7.60	6.00	6.57
	MTS	8.80	4.60	7.12	9.20	4.20	7.35	8.90	4.50	7.22	8.90	5.20	7.34
	SMPMTS	8.80	3.80	6.90	9.20	3.60	7.31	9.30	4.00	7.21	8.90	4.10	7.32

KAB/KOTA	JENJANG	MATA PELAJARAN											
		BAH. INDONESIA			BAH. INGGRIS			MATEMATIKA			I P A		
		Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata
GorontaloUtara	SMP	9.00	4.30	7.39	9.20	4.40	7.76	8.90	4.70	7.36	9.10	4.40	7.53
	SMP-T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MTS	8.80	5.90	7.48	9.00	6.70	7.86	9.10	5.90	7.83	8.70	5.10	7.69
	SMPMTS	9.00	4.30	7.40	9.20	4.40	7.77	9.10	4.70	7.40	9.10	4.40	7.55
PROVINSI	SMP	9.40	4.00	7.39	9.60	3.60	7.76	9.60	3.90	7.71	9.60	4.10	7.74
	SMP-T	8.40	2.90	7.10	8.80	1.70	7.42	8.90	4.00	7.43	8.70	4.70	7.52
	MTS	9.00	4.60	7.32	9.50	4.10	7.68	9.70	4.00	7.50	9.40	4.30	7.48
	SMPMTS	9.40	2.90	7.38	9.60	1.70	7.74	9.70	3.90	7.68	9.60	4.10	7.70

Sumber: Dikpora Provinsi Gorontalo

Di tahun 2017-2018, program IPA tingkat SMA/MA di Provinsi Gorontalo memperoleh rerata UN tertinggi dibandingkan dengan program lainnya yaitu Bahasa, IPS dan Agama. Berdasarkan perolehan nilai UN baik program IPA, IPS, Bahasa maupun Agama dengan persentase tinggi pada rerata UN dibawah 55, kompetensi dasar yang belum dikuasai oleh siswa dalam mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemampuan Bahasa Inggris siswa SMA/MA di Kab/Kota di Provinsi Gorontalo perlu mendapatkan perhatian karena memiliki nilai UN yang rendah baik pada program IPA, IPS, dan Bahasa; dan berimbang pada rendahnya rata-rata nilai UN di wilayah tersebut. Mata pelajaran dengan persentase tinggi pada rerata UN dibawah 55 juga terjadi pada mata pelajaran Matematika

Tabel 26
Capaian Prestasi Siswa SMA/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2018

KAB/KOTA	Jenjang	Program Studi	Mata Pelajaran								
			Bah. Indonesia			Matematika			I P A		
			Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata
Kota Gorontalo	SMA	BHS	54.00	24.00	40.20	38.00	18.00	28.10	37.50	10.00	23.50
		IPA	96.00	30.00	67.36	90.00	18.00	56.22	95.00	10.00	39.10
		IPS	88.00	20.00	55.37	92.00	12.00	40.76	82.50	10.00	30.54
	MA	BHS	76.00	32.00	55.00	78.00	20.00	47.74	47.50	12.50	28.62
		IPA	88.00	36.00	63.86	84.00	18.00	50.31	70.00	12.50	32.48
		IPS	80.00	30.00	56.80	76.00	20.00	38.55	50.00	12.50	30.32
		AGAMA	82.00	28.00	58.37	74.00	20.00	45.28	45.00	12.50	29.11
Gorontalo	SMA	BHS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IPA	92.00	24.00	61.33	92.00	14.00	38.53	82.50	10.00	26.75
		IPS	88.00	18.00	51.02	80.00	10.00	30.96	55.00	10.00	26.68
	MA	BHS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IPA	86.00	22.00	56.46	86.00	16.00	38.05	75.00	7.50	26.64
		IPS	82.00	20.00	50.04	78.00	14.00	32.59	50.00	7.50	27.06
		AGAMA	84.00	26.00	56.56	78.00	18.00	37.28	37.50	15.00	27.05
Boalemo	SMA	BHS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IPA	92.00	34.00	60.52	80.00	14.00	37.49	50.00	7.50	25.30

KAB/KOTA	Jenjang	Program Studi	Mata Pelajaran								
			Bah. Indonesia			Matematika			I P A		
			Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata
Gorontalo Utara	SMA	BHS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IPA	90.00	28.00	58.08	74.00	16.00	37.81	57.50	7.50	25.13
		IPS	84.00	22.00	50.98	62.00	10.00	30.38	55.00	12.50	27.50
	MA	BHS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IPA	72.00	24.00	50.06	48.00	20.00	34.91	35.00	17.50	24.07
		IPS	68.00	26.00	46.82	58.00	18.00	37.64	47.50	15.00	30.89
		AGAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provinsi Gorontalo	SMA	BHS	66.00	20.00	43.81	54.00	16.00	30.84	40.00	10.00	26.11
		IPA	96.00	24.00	61.57	92.00	12.00	41.78	95.00	5.00	28.87
		IPS	88.00	18.00	50.75	92.00	10.00	32.34	82.50	10.00	27.73
	MA	BHS	76.00	32.00	55.00	78.00	20.00	47.74	47.50	12.50	28.62
		IPA	100.00	22.00	62.38	94.00	16.00	46.32	100.00	7.50	33.80
		IPS	92.00	20.00	52.27	88.00	12.00	35.40	95.00	7.50	29.13
		AGAMA	84.00	26.00	56.52	78.00	16.00	39.96	45.00	12.50	28.30

Sumber: Dikpora Provinsi Gorontalo

TARGET 10 – Meningkatkan Pasokan Guru yang Berkualitas

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru juga perlu menjadi perhatian dalam upaya mencapai layanan pendidikan bermutu. Perkembangan rasio guru murid di Gorontalo selama kurun waktu 2012-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2016, perbandingan rasio guru murid SD/MI adalah 1:17, sedangkan tingkat SMP/MTs adalah 1:12, dan tingkat SMA/MA adalah 1:13. Sementara Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 dan SPM Pendidikan menentukan bahwa rasio ideal guru murid untuk SD/MI 1:32, SMP/MTs 1:36, dan SMA/MA/SMK 1:20. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2016 jumlah guru di Provinsi Gorontalo masih berlebih. Namun yang menjadi permasalahan adalah distribusi guru yang belum merata di masing-masing Kabupaten/Kota. Ada kecenderungan bahwa sebagian besar guru terkonsentrasi di daerah perkotaan yang menyebabkan beban mengajar seorang guru menjadi terlalu rendah sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal 24 jam tatap muka. Di sisi lain, sekolah-sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru sehingga proses pembelajaran berlangsung tidak efektif.

Tabel 27
Jenjang Pendidikan Guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2016

Guru Jenjang Pendidikan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<=SLTA	2.596	1.986	1.265	397	409	333			
PGSLP/D1	49	1.938	39	210	153	107	112	112	126
D2	1.312	843	511	219	108	58	39	15	20
D3/Sarmud	112	874	191	146	131	95	118	113	109
D4/S1	5.749	10.057	7.319	4.438	4.193	4.362	3.131	3.231	3.557
S2/Lebih	127	10.241	194	226	241	227	370	360	394

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2017

Selain fokus pada distribusi guru, peningkatan kualitas dan kompetensi guru juga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mencapai layanan pendidikan yang bermutu. Hingga tahun 2016, guru yang berijazah D4/S1 untuk jenjang

pendidikan SD/MI sebanyak 77% dan guru jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 84%. Sedangkan guru jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 85% memiliki kualifikasi D4/S1 dan hanya 9% yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana S2/lebih.

Meskipun rata-rata guru telah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4, hal ini belum tercermin pada tingginya kompetensi mereka. Uji kompetensi guru yang dilakukan pada tahun 2012 secara nasional terhadap sekitar 850 ribu guru menunjukkan bahwa rata-rata nilai uji kompetensi guru adalah sekitar 43 dari skala nilai 0-100. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru yang akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran salah satunya melalui program sertifikasi guru. Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, serta meningkatkan martabat dan profesionalisme guru. Di Provinsi Gorontalo, jumlah guru bersertifikat pendidik meningkat sebesar 4.31% dari 1553 di tahun 2017 menjadi 1620 di tahun 2018. Berikut ini peningkatan jumlah guru bersertifikat pendidik tahun 2017-2018 di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo:

Tabel 28
Rekap Guru Bersertifikat Pendidik Provinsi Gorontalo
Tahun 2017-2018

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PENERIMA	
		2017	2018
1	Kota Gorontalo	472	496
2	Gorontalo	479	479
3	Boalemo	145	169
4	Pohuwato	110	116
5	Bone Bolango	232	243
6	Gorontalo Utara	115	117
	TOTAL	1553	1620

Sumber: Dikpora Provinsi Gorontalo



TUJUAN 5

Mencapai Kesejahteraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target yang akan dicapai pada Tujuan 5 adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Permasalahan dalam pencapaian tujuan 5 TPB/SDG's diantaranya ada beberapa indikator yang tidak tersedia datanya (skala provinsi) misalnya indikator 5.4.1

yaitu Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi. Selain itu ada beberapa indikator yang hanya bisa diukur pada skala nasional (termasuk indikator global yang hanya bisa dikembangkan). Selain itu, Indikator 5.c.1 yaitu Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan belum tersedia.

TARGET 1 – Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan

Mandat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimaulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Menurut jenis kelamin, penduduk di Provinsi Gorontalo terdiri dari laki-laki berjumlah 576.482 orang sedangkan perempuan berjumlah 574.283 orang dengan rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 100,38 atau masih terbelah berimbang. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, perempuan Provinsi Gorontalo telah mengimbangi laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari rasio APS tahun 2016 dimana APS perempuan tercatat sebesar 73,33% sementara APS laki-laki sebesar 70,18%. Angka ini menunjukkan bahwa APS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Disisi lain, ketimpangan gender masih terjadi di bidang ketenagakerjaan. Tercatat penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja adalah sebesar 332.847 laki-laki dan 213.821 perempuan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 82,91 laki-laki dan 53,12 perempuan. Dari sini terlihat masih adanya kesenjangan kesempatan kerja terhadap perempuan dibandingkan terhadap laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. IPG Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan yang meningkat dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2012 capaian IPG Provinsi Gorontalo adalah sebesar 84,54 dan di tahun 2015 menjadi 85,87. Disparitas pencapaian IPG tahun 2015 antar Kabupaten/Kota tidak terlalu tajam, dimana capaian IPG tertinggi adalah Kabupaten Pohuwato sebesar 90,57 dan terendah 79,32 adalah Kabupaten Boalemo. Sedangkan untuk IDG, rata-rata IDG seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo di tahun 2015 sudah mencapai lebih dari 60,00, kecuali Kabupaten Bone Bolango yang memiliki capaian IDG terendah yaitu 49,64 akibat rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.

Tabel 29
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

No	Wilayah	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Kota Gorontalo	82,84	84,37	85,17	85,51
2	Gorontalo	74,44	77,32	79,23	80,13
3	Boalemo	75,05	77,63	78,92	79,32
4	Pohuwato	88,72	89,32	90,32	90,57
5	Bone Bolango	82,57	84,40	85,99	86,00
6	Gorontalo Utara	74,85	77,89	79,85	79,99
	Provinsi Gorontalo	84,54	84,57	85,09	85,87

Sumber: Buku Pembangunan Manusia berbasis Gender, 2016

Tabel 30
Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

No	Kab/Kota	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Kota Gorontalo	69,23	66,82	69,04	69,63
2	Gorontalo	57,38	56,75	64,08	65,71
3	Boalemo	50,20	52,68	62,84	64,58
4	Pohuwato	72,05	74,89	71,41	69,08
5	Bone Bolango	51,58	52,23	47,98	49,64
6	Gorontalo Utara	51,71	54,79	61,55	61,06
	Provinsi Gorontalo	62,08	60,89	67,36	69,62

Sumber: Buku Pembangunan Manusia berbasis Gender, 2016

Adapun program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo antara lain: (1) Program Perlindungan Perempuan,

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; (2) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan; dan (3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG erat kaitannya dengan upaya pemberdayaan perempuan dan mengawal pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan. Namun hingga tahun 2015, berbagai pedoman dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dinilai belum optimal.

TARGET 2 - Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi. Data Polda Gorontalo menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2016 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 898 kasus. Meskipun terbilang tinggi, namun di tahun 2016 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 35% dibanding tahun 2014.

Tabel 31
Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tahun 2014-2016

No	Jenis Tindak Pidana	2014	2015	2016
1	Kejahatan terhadap kesusilaan	35	20	5
2	KDRT	116	116	63
3	Kejahatan terhadap anak	174	153	146
4	Penganiayaan	38	75	21
	Total	363	364	235

Sumber: Data Kepolisian Daerah Gorontalo, 2016

Disamping meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah melaksanakan berbagai program kegiatan baik yang bersifat preventif maupun kuratif. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan pencegahan kasus *Human Trafficking* adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Disamping itu, Provinsi Gorontalo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Perlindungan terhadap perempuan meliputi: (a) pencegahan tindak kekerasan;

(b) pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan; serta (c) pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan.

Sama halnya dengan pencegahan diskriminasi terhadap perempuan, salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan bagi perempuan dari tindak kekerasan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan. Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (i) meningkatkan pemahaman pemangku kepetingan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan; (ii) meningkatkan koordinasi SKPD dan pusat-daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; (iii) meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM di SKPD terkait kekerasan terhadap perempuan; dan (iv) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan.

TARGET 5 – Menjamin Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan untuk Memimpin di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan

Perempuan telah memiliki peran penting di lembaga pemerintahan maupun swasta di Provinsi Gorontalo. Kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin dan pengambil keputusan dapat dilihat dari besarnya partisipasi politik perempuan di Provinsi Gorontalo. Jumlah perempuan yang masuk menjadi anggota Dewan berjumlah 42 orang atau sebesar 19,4% dari jumlah anggota Dewan secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo.

Tabel 32
Eksistensi Perempuan Dalam Lembaga DPRD Prov dan Kab/Kota
Periode 2014-2019

No	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Perempuan	Jumlah Anggota Dewan	Persentase Partisipasi Perempuan (%)
1	Prov. Gorontalo	45	13	29
2	Kota Gorontalo	25	6	24
3	Gorontalo	35	8	23

4	Boalemo	25	5	20
5	Pohuwato	25	5	20
6	Bone Bolango	23	1	4
7	Gorontalo Utara	25	4	16
	Total	203	42	19,4

Sumber: Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo, 2016

Di sisi lain, jumlah pegawai perempuan di tahun 2016 yang memegang jabatan strategis eselon IV sampai eselon I sejumlah 256 orang atau 38,61% dari jumlah pegawai yang memiliki jabatan. Sedangkan jumlah laki-laki yang memegang jabatan strategis berjumlah 407 orang atau 61,39% dari jumlah pegawai yang memiliki jabatan. Meskipun peran penting perempuan di lembaga pemerintahan mulai diperhitungkan, namun kondisi diatas menunjukkan bahwa persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga pemerintah masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 33
Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Pemerintah Provinsi Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Eselon				Jumlah Eselon	Non Eselon	Total
		I	II	III	IV			
1	Laki-laki	-	25	113	269	407	1.239	1.646
2	Perempuan	1	3	52	200	256	1.229	1.485
	TOTAL	1	25	165	469	663	2.428	3.131

Sumber: Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo, 2016



TUJUAN 6

Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

TARGET 1 – Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua

Air minum merupakan kebutuhan vital umat manusia. Oleh karena itu, ketersediaan air minum yang bersih mutlak diperlukan setiap hari. Kebutuhan

air bersih untuk perkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota, sumber air bersih dipasok dari sumur-sumur yang dibuat penduduk serta bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program-program yang terkait dengan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
2. PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
3. DAK Air Minum dan Sanitasi

Tabel 34
Data Jumlah Akses Air Bersih dan Percetase Cakupan Akses Air Minum yang Layak Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah SR Yang Terlayani Akses Air Bersih Melalui Fasilitas dan Sistem Penyediaan Air Bersih Dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	SR	5.265.00	379.00	8.370.00	2.648.00	5.816.00
2	Akses Air Minum Layak	Persen (%)	54,62	56,80	63,30	66,47	71,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (2016) dan Data Statistik (2016)

Upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih realtif sudah cukup memadai. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Tabel di bawah ini berisi cakupan akses air minum dan sanitasi.

Sumber air minum masyarakat yang berasal dari PAM selama tahun 2012-2016 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 15,3%. Sementara sumber air minum yang berasal dari mata air dan sumber dari tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan seperti yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 35
Jumlah Sumber Air Minum di Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2016

No	Sumber air minum	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Mata air	Buah	10,934	3,072	3,304	1,538	1,538
2	PAM/Air dalam kemasan	Buah	6.860	28,470	31,007	51,675	51,675
3	Pompa Listrik/tangan	Buah	8,749	10,365	10,553	14,874	14,874
4	Sumur	Buah	86,732	72,620	68,101	66,000	66,000

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2016

TARGET 2 – Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan

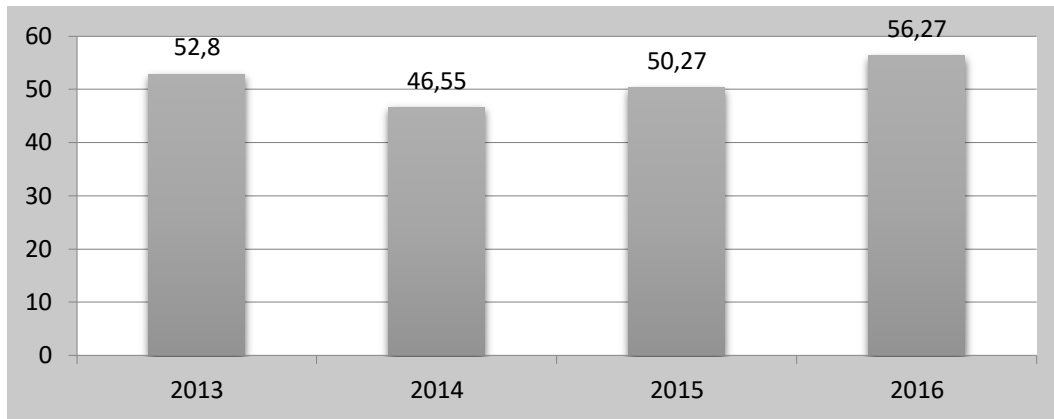
Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa dan tanki septik. Sanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga di daerah kota maupun desa. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Tabel 36
Persentase Akses Sanitasi yang Layak dan Jumlah Bangunan Penyediaan Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Akses Sanitasi Layak	Persen (%)	47,96	50,25	54,07	54,96	59,85

2.	Jumlah Bangunan Penyediaan Sanitasi Yang Terbangun	Unit	149.00	52.00	64.00	28.00	55.00
----	--	------	--------	-------	-------	-------	-------

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat di Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebesar 56,27%. Data selengkapnya dapat di lihat pada grafik berikut



Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Gambar 16. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Tahun 2013-2016

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target akses sanitasi dasar yaitu:

- a). Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama agar masyarakat dapat mengadopsi perilaku yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.
- b). Program Pamsimas baru menjangkau 2 kabupaten dari total 6 Kabupaten/Kota
- c). MCK tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena masalah teknis dan kebersihan, sehingga tidak dihitung sebagai akses jamban.

TARGET 3 – Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global

Sejak tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya. IKLH dapat menentukan derajat permasalahan lingkungan dan sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. IKLH disusun menggunakan kualitas air sungai, kualitas air udara, dan tutupan hutan sebagai indikator.

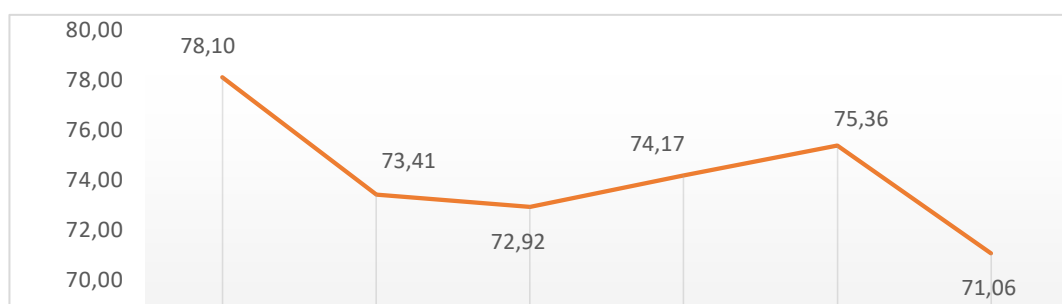
Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 37
IKLH Provinsi Gorontalo Tahun Data 2011-2016

Tahun	Indeks Udara	Indeks Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
2016	98,82	37,40	75,50	71,06
2015	96,79	53,40	75,76	75,36
2014	96,20	48,49	76,91	74,17
2013	90,24	50,00	77,11	72,92
2012	89,17	52,19	77,50	73,41
2011	95,06	53,50	83,83	78,10

Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo 2017

Berdasarkan hasil perhitungan IKLH selama 6 (enam) tahun dari tahun 2011 – 2016 sebagaimana tabel di atas dapat diartikan bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo dari baik menjadi cukup. Secara rinci khusus untuk indeks kualitas air terjadi penurunan yang cukup berarti dari tahun ke tahun dari kategori sangat kurang menjadi waspada dalam 6 (enam) tahun terakhir.



Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo 2017

Gambar 17. Trend Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo 2011-2016

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air beberapa sungai strategis di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa status mutu air sungai berada pada kondisi Cemar Ringan sampai Cemar Sedang.

Tabel 38
Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo Hasil Pemantauan Tahun 2016

No	Nama Sungai	Status Mutu Air Sungai			Parameter yang melebihi baku mutu
		Hulu	Tengah	Hilir	
1	Sungai Bone	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, E. Coli dan Total Coliorm
2	Sungai Paguyaman	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, COD, DO, TSS, E. Coli dan Total Coliform
3	Sungai Bionga	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, E. Coli dan Total Coliorm
4	Sungai Buladu	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	E. Coli dan Total Coliorm
5	Sungai Taluduyunu	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	E. Coli dan Total Coliorm

Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo, 2016

TARGET 5 – Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat

Sejak tahun 2016, jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi di Provinsi Gorontalo berjumlah 91 unit. Data yang berasal dari database Balai Wilayah Sungai dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Gorontalo menunjukkan, tidak ada peningkatan jumlah stasiun tersebut (Database BWS dan BMKG, 2018).

Sementara itu, untuk memulihkan kawasan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pengembangan kawasan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), terutama air. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (2018) dan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Bone Bolango (BPDASHL) menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan pengembangan kawasan hutan yang semula di tahun 2018 seluas 3,950 Ha dan direncanakan bisa mencapai luasan 4,250 Ha di tahun 2021 (DLHK, 2018).

Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bulontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan berkelanjutan (lestari) dengan upaya menekan kerusakan seminimum mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun.

Berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M/20015, Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) satuan wilayah sugai yang menjadi kewenangan pusat, yaitu :

- a. Wilayah Sungai Paguyaman ini secara administrasi terletak pada tiga kabupaten yaitu Kab. Boalemo yang beribukota Tilamuta dengan 5 kecamatan dan 55 buah desa/kelurahan, Kab. Pohuwato yang beribukota Marisa dengan 5 kecamatan dan 49 desa/kelurahan dan Kab. Gorontalo yang beribukota Limboto dengan 12 kecamatan dan 122 desa/kelurahan.
- b. Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone merupakan wilayah sungai lintas provinsi karena wilayahnya terletak di beberapa provinsi, yaitu sebagian besar wilayahnya terletak di Provinsi Gorontalo, bagian hulu sungai sebagian terletak di Kecamatan Bolaang Uki, Bintauna dan Sang Tombolang yang
- c. Wilayah Sungai (WS) Randangan, dan sebagian kecil WS Dumoga– Sangkup. berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, serta sebagian kecil wilayahnya terletak di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah Sungai Randangan memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pohuwato, terutama dalam bidang sosial ekonomi karena Wilayah Sungai Randangan merupakan suatu wilayah sungai yang cukup luas diperuntukan bagi penyediaan Sumber Daya Air dan juga memiliki potensi geografis yang strategis untuk dikembangkan.

Tabel 39

Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

No	Nama Wilayah Sungai	Kode	Luas (Km ²)
1	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.04.A2	6.888,7
2	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.266,2
3	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	4.179,4

Sumber : BWS Sulawesi II, Gorontalo

Target 6 – Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

Berdasarkan SK.328/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, DAS Limboto dikategorikan sebagai salah satu dari 108 DAS prioritas di Indonesia. Isu utama yang dialami DAS Limboto adalah degradasi lahan yang sangat kritis yang menyebabkan pendangkalan Danau Limboto. Kawasan Danau Limboto merupakan salah satu sumber air minum bagi masyarakat Gorontalo. Kawasan hulu danau terletak di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.

Kritisnya lahan di DAS Limboto menyebabkan Danau Limboto merupakan salah satu dari 15 danau terkritis di Indonesia. Dalam kurun waktu 52 tahun luas Danau Limboto berkurang sekitar 4.304 Ha atau sekitar 62,60% dari total luas danau. Luas danau berkurang sekitar 65,89 Ha per tahun, sehingga pada tahun 2025 danau ini diperkirakan akan berubah menjadi daratan. Sumber air yang masuk ke Danau Limboto yaitu berasal dari air hujan dan dari aliran 23 anak yang tersebar di sebelah Utara, Selatan dan Barat danau. Satu-satunya yang menjadi outlet danau Limboto adalah sungai Topudu, yang mengalir ke Teluk Tomini melalui sungai Bolango.

Permasalahan yang terjadi didanau limboto adalah (1) pendangkalan dan penyusutan luas, (2) penurunan kualitas air danau, (3) perkembangan eceng gondok, (4) penurunan volume air, (5) penurunan produktivitas perikanan, (6) banjir, (7) alih fungsi/perusakan hutan dan lahan.

Pengelolaan DAS yang baik berperan meningkatkan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan lestari serta berkontribusi bagi distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun.

Selain Danau Limboto, di Provinsi Gorontalo terdapat Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat Kota Gorontalo. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang bertujuan untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari

mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu berperahu, memancing, renang dan rekreasi/perkemahan.

Selain DAS dan danau, Provinsi Gorontalo memiliki 9 Cekungan Air Tanah. Berdasarkan Kepres Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, wilayah cekungan air tanah tersebut adalah:

1. Cekungan Air Tanah (CAT) Bone

Daerah ini terletak di sebagian wilayah Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo, dan sebagian wilayah Kab. Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara (cekungan air tanah lintas propinsi), dengan luas daerah sekitar 326 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 123⁰ 30'8.53" - 123⁰ 44'6.89" Bujur Timur dan 0⁰24'06.01" – 0⁰36'50.34" Lintang Utara.

2. Cekungan Air Tanah (CAT) Pinogu

Daerah ini terletak di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 112 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 123⁰19'40.13" - 123⁰30'59.01" Bujur Timur dan 0⁰25'59.34" – 0⁰32'05.13" Lintang Utara.

3. Cekungan Air Tanah (CAT) Tombulilato

Daerah ini terletak di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 35 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 123⁰ 14'24.94" - 123⁰ 22'35.01" Bujur Timur dan 0⁰18'31.27" – 0⁰21'31.01" Lintang Utara.

4. Cekungan Air Tanah (CAT) Gorontalo

Daerah ini terletak di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 481 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 122⁰ 41'5.44" - 123⁰ 20'27.85" Bujur Timur dan 0⁰26'17.97" – 0⁰41'10.08" Lintang Utara.

5. Cekungan Air Tanah (CAT) Molombulahe

Daerah ini terletak di sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo dan sebagian Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota),

dengan luas daerah sekitar 433 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 122⁰ 21'27.24" - 122⁰ 45'20.84" Bujur Timur dan 0⁰34'21.85" - 0⁰46'30.52" Lintang Utara.

6. Cekungan Air Tanah (CAT) Mahinoto

Daerah ini terletak di wilayah Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 75 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 122⁰ 13'52.84" - 122⁰ 26'39.50" Bujur Timur dan 0⁰44'46.55" - 0⁰48'10.63" Lintang Utara.

7. Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti

Daerah ini terletak di Kabupaten Boalemo dan sebagian wilayah Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 59 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 121⁰ 59'7.08" - 122⁰ 10'17.66" Bujur Timur dan 0⁰27'17.64" - 0⁰35'38.66" Lintang Utara.

8. Cekungan Air Tanah (CAT) Marisa

Daerah ini terletak di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 234 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 121⁰ 42'51.25" - 121⁰ 58'52.96" Bujur Timur dan 0⁰24'46.77" - 0⁰33'33.34" Lintang Utara.

9. Cekungan Air Tanah (CAT) Popayato

Daerah ini terletak di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo dan sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (cekungan air tanah lintas propinsi), dengan luas daerah sekitar 92 km². Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 121⁰ 19'13.92" - 121⁰ 32'12.69" Bujur Timur dan 0⁰28'01.77" - 0⁰35'01.03" Lintang Utara.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 6, Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penduduk yang masih belum memiliki rumah dan menempati kawasan pemukiman tidak layak huni.

- 2) Layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat belum memadai/belum terpenuhi
- 3) Minimnya penyediaan prasarana air bersih/air minum, sanitasi dan permukiman.
- 4) Terbatasnya prasarana air bersih pada daerah tertinggal/perdesaan/pulau, terutama kawasan perdesaan potensial.
- 5) Banyak bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan kehandalan bangunan gedung sesuai UU
- 6) Meningkatnya polusi dan pencemaran di sumber-sumber mata air, sungai dan danau



TUJUAN 7

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan modern

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah (1) menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern ; (2) peningkatan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global ; (3) melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat pada tahun 2030 ; (4) memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih dan (5) memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan.

Kebutuhan Energi Daerah. Kondisi kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamobagu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430,69 MW dan perkiraan beban puncak 330 MW. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri, daya terpasang saat ini adalah sebesar 85,60 MW dan daya mampu 60 MW dengan beban puncak 90 MW.

Tabel 40

Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang Dan Listrik Terjual Menurut Bulan di Provinsi Gorontalo, 2012 – 2016

Tahun	Jumlah Pelanggan	Daya	Listrik
		Terpasang (KVA)	Terjual (MWH)
2012	149.799	153.537	25.512
2013	178.970	185.403	27.886
2014	198.970	202.504	33.534
2015	217.578	226.188	35.164
2016	240.150	227.628	37.128

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 240.150 pelanggan, dimana persentase pelanggan terbesar berasal dari sektor rumah tangga (93,30%). Pertumbuhan rata-rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8,6-10%, dengan rasio elektrifikasi sebesar 76,48%. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 1.997 Kms dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 327 Kms, dengan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah.

Produksi dan Penggunaan Energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, beberapa upaya penyediaan energi listrik telah dilaksanakan. Salah satu upayanya yaitu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) *Duel Fuel* Gorontalo yang berlokasi di Kecamatan Paguat-Kabupaten Pohuwato. Pembangkit listrik ini memiliki kapasitas sebesar 2x50 MW dan telah beroperasi sejak tahun 2016. Di samping itu, dibangun juga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Molotabu-Kabupaten Pohuwato dengan kapasitas 2x12 MW; dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Anggrek-Kabupaten Gorontalo Utara dengan kapasitas 2x25 MW. Upaya ini dilakukan dalam rangka menutupi defisit listrik di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan rasio elektrifikasi.

Pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dan pemanfaatan pembangkit berbasis energi baru terbarukan lainnya merupakan

langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan energi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (diversifikasi energi) yang sesuai visi 25/25 dimana pada tahun 2025, penggunaan energi baru terbarukan menjadi 25% dengan memaksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menghindari biaya penggunaan bahan bakar fosil (*avoided fossil energy cost*).

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo selama tahun 2012-2016, jumlah pelanggan listrik mengalami peningkatan hingga 12,6% pertahunnya. Tahun 2016 jumlah pelanggan listrik sebanyak 240.150 pelanggan, dengan daya terpasang 227.628 KVA. Sampai dengan tahun 2016 total listrik yang terjual sebesar 159.224 MWH. Sementara daya terpasang menurut unit operasi untuk tahun 2015, tertinggi berada di PLTD Telaga dengan daya terpasang sebesar 23.500 KVA, daya mampu 14.500 KVA, dan beban puncak 14.500 KVA. Total daya terpasang di seluruh Pembangkit listrik tahun 2015 sebesar 87.950 KVA, beban puncak sebesar 87.950 KVA, sementara daya mampu pembangkit listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 72.420 KVA.

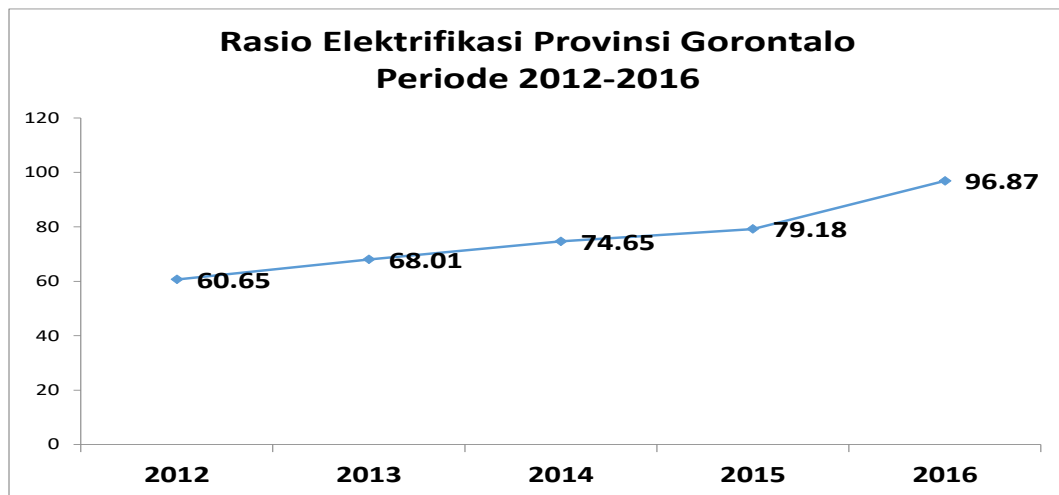
Tabel 41
Daya Terpasang, Daya Tampung, Dan Beban Puncak Menurut Unit Operasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2015

No	Unit Operasi	Daya Terpasang (KVA)	Daya Mampu (KVA)	Beban Puncak (KVA)
1	PLTD Telaga	23 500	14500	14500
2	PLTD Tilamuta	1 650	450	450
3	PLTD Marisa	1 350	1 200	1 200
4	PLTD Lemito	875	300	300
5	PLN Cabang	350	320	320
6	PLTMH Mongango	1 200	1 100	1 100
7	PLTBm Pulubala	500	5 000	5 000
8	PLTS Pulubala	45	5 000	5 000
9	Sewatama I	5 000	5 000	5 000
10	Sewatama III	5 000	5 000	5 000

No	Unit Operasi	Daya Terpasang (KVA)	Daya Mampu (KVA)	Beban Puncak (KVA)
11	Sewatama IV	10 000	10 00	10 000
12	PLTD Isimu 1	5 000	6 000	6 000
13	PLTD Isimu	2 000	800	800
14	PLTD Paguat	5000	7000	7000
15	Taludaa 1 dan 2	5 300	2 000	2 000
16	Molotabu	21 000	24000	24 000
	2015	87 950	72 420	87 950
	2014	87.450	59.270	87.450
	2013	82.450	71.780	82.450
	2012	78.595	49.780	78.595

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Rasio elektrifikasi di Provinsi Gorontalo selama tahun 2012-2016 menunjukkan trend yang sangat positif dimana rasio elektrifikasi senantiasa meningkat dari tahun ketahun. Rasio elektrifikasi pada tahun 2012 di Provinsi Gorontalo hanya sebesar 60,65% dan meningkat menjadi 96,87% pada tahun 2016.



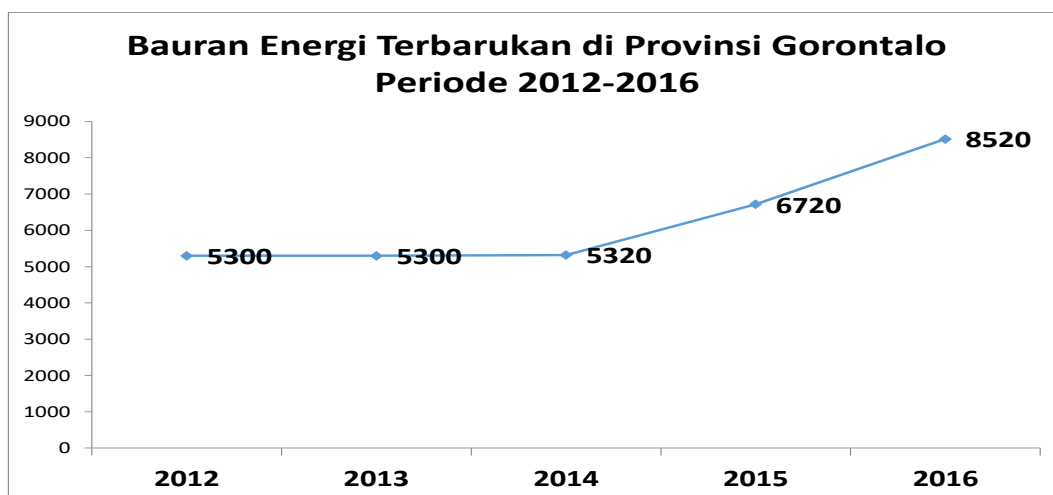
Gambar 18. Rasio Elektrifikasi Provinsi Gorontalo Periode 2012-2016

Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 240.150 pelanggan, dimana persentase pelanggan terbesar berasal dari sektor rumah tangga (93,30%). Pertumbuhan rata-rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8,6-10 persen. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 1.997 Kms dan Saluran Udara Tegangan

Tinggi (SUTT) 150 KVA 327 Kms,dengan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah.

Untuk **energi terbarukan**, Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air \pm 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Hal ini memperkuat penyediaan pembangkit listrik alternative dan atau sumber energy lainnya yang sesuai dengan potensi sumber alam di gorontalo. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap total konsumsi energi, pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil. Untuk energi listrik misalnya, jumlah energi listrik yang berasal dari energi terbarukan pada tahun 2012 hanya sebesar 5300 kW dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 8520 kW.

Untuk meningkatkan kontribusi penggunaan energi terbarukan, Pemda Provinsi Gorontalo berupaya mendorong pemanfaata berbagai sumber energi alternatif seperti biodiesel. Di samping itu, dibangun juga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Molotabu-Kabupaten Pohuwato dengan kapasitas 2x12 MW; dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Anggrek-Kabupaten Gorontalo Utara dengan kapasitas 2x25 MW.



Gambar 19. Bauran Energi Terbarukan di Provinsi Gorontalo Periode 2012-2016

Pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dan pemanfaatan pembangkit berbasis energi baru terbarukan lainnya merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan energi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (diversifikasi energi) yang sesuai visi 25/25 dimana pada tahun 2025, penggunaan energi baru terbarukan menjadi 25 persen dengan memaksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menghindari biaya penggunaan bahan bakar fosil (*avoided fossil energy cost*).

Dari hasil evaluasi terhadap program pemerintah provinsi di bidang energi masih terdapat beberapa masalah. Masalah yang masih dihadapi dibidang Energi adalah masih rendahnya pemanfaatan potensi energy baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama kepada mereka yang berada dipelosok, pesisir dan pulau-pulau yang sulit terjangkau dengan jaringan On Grid. Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air \pm 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Hal ini memperkuat penyediaan pembangkit listrik alternative dan atau sumber energy lainnya yang sesuai dengan potensi sumber alam di Gorontalo.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target 7 SDGs (energi bersih dan terjangkau) diantaranya sebagai berikut :

- Masih terbatasnya potensi dan pasokan/suply energy dan masih adanya kegiatan penambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidak sesuai ketentuan.
- Masih rendahnya pemanfaatan potensi energy baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama kepada mereka yang berada dipelosok, pesisir dan pulau-pulau yang sulit terjangkau dengan jaringan On Grid.
 - Belum termanfaatkannya potensi SDA yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik seperti sumber daya air yang memiliki potensi

sebesar 65,4 MW dan potensi panas bumi yang memiliki potensi hingga 110 MW.



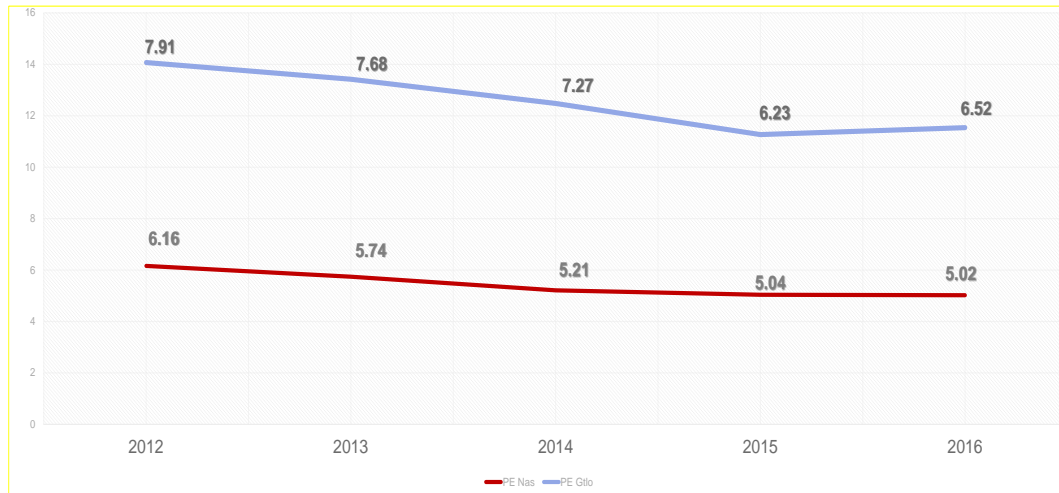
TUJUAN 8

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah (1) mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai kondisi nasional ; (2) mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi ; (3) menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan ; (4) meningkatkan secara progresif efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi ; (5) mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki ; (6) mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan ; (7) memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak ; (8) Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja ; (9) menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal ; dan (10) Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

Perkembangan Ekonomi Makro. Kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama tahun 2012-2016 senantiasa berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun jika dilihat dari tren selama 5 tahun terakhir,

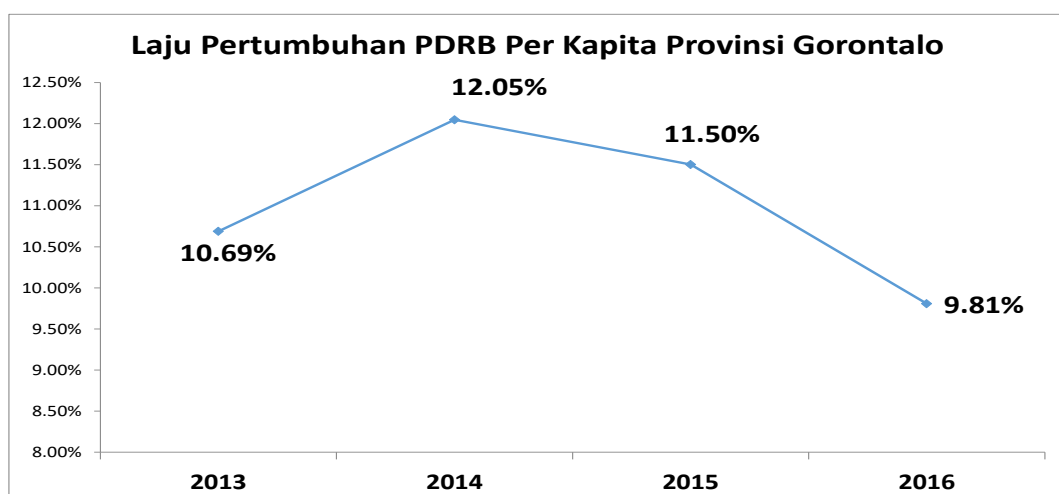
pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menunjukkan trend penurunan. Ini bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang hanya sebesar 6,02% bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mampu mencapai 7,91%.



Gambar 20. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016

Trend penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi secara Nasional, maupun pengaruh beberapa sektor antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman maupun rendahnya Nilai Tukar Petani. Adanya alih fungsi lahan tersebut membuat kontribusi sektor pertanian kedalam PDRB melemah sehingga membuat PDRB secara total juga mengalami perlambatan karena sektor pertanian masih merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Gorontalo.

Adapun untuk nilai PDRB per kapita Provinsi Gorontalo selama tahun 2012-2016 menunjukkan trend peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Provinsi Gorontalo mencapai 27,65 juta rupiah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan PDRB per kapita pada tahun 2012 yang hanya

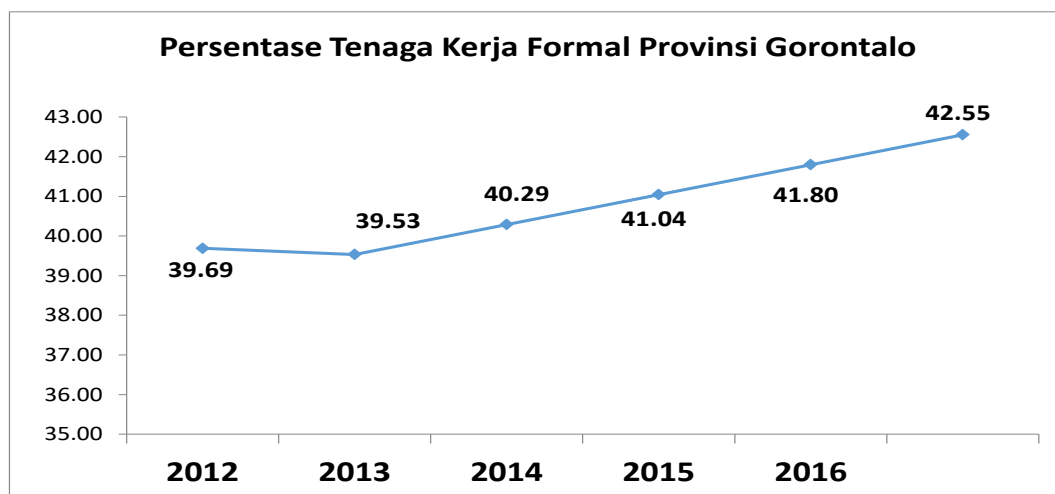


sebesar 18,21 juta rupiah. Meskipun secara nominal jumlah PDRB per kapita Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun bila dilihat dari sisi laju perubahannya, terjadi perlambatan pertumbuhan PDRB per kapita selama tahun 2015-2016 seperti terlihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 21. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Provinsi Gorontalo 2012-2016

Laju pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Gorontalo tertinggi dalam lima tahun terakhir dicapai pada tahun 2014 dimana laju pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 12,05%. Namun pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB per kapita mengalami penurunan hanya sebesar 11,5% dan pada tahun 2016 kembali mengalami perlambatan yakni hanya sebesar 9,81%. Perlambatan pertumbuhan PDRB per kapita tersebut tidak terlepas dari kondisi nasional sehingga berimbas ke daerah termasuk Provinsi Gorontalo.

Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang senantiasa berada diatas rata-rata nasional memberikan dampak yang positif diataranya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Hal ini terbukti pada terus meningkatnya persentase tenaga kerja formal di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2012, persentase tenaga kerja formal hanya sebesar 39,69% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 42,55% pada tahun 2017. Peningkatan persentase tenaga kerja formal di Provinsi Gorontalo selama tahun 2012-2016 berdampak pada kondisi tingkat pengangguran di Provinsi

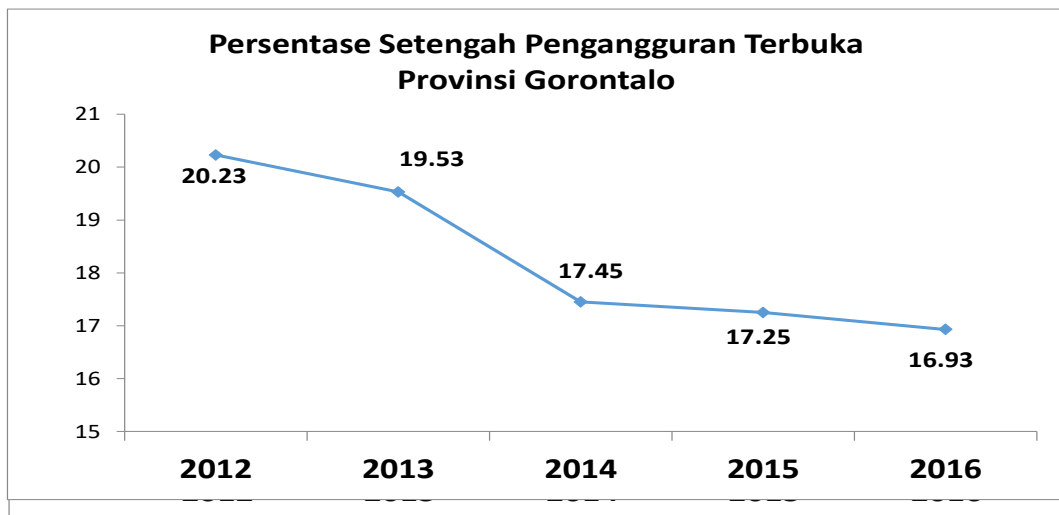


Gorontalo.

Gambar 22. Persentase Tenaga Kerja Formal Provinsi Gorontalo

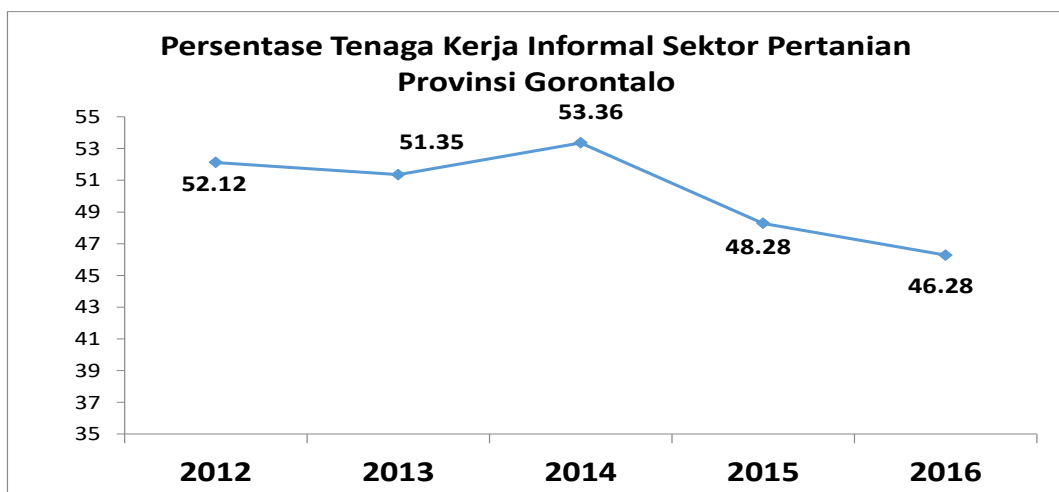
Gambar 23. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo

Untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo bersifat stabil dimana pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,44% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 4,15% pada tahun 2013. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 4,66% dan kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 4,28%.



Gambar 24. Setengah Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo

Sementara untuk kondisi setengah pengangguran terbuka menunjukkan trend penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 persentase masyarakat yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran mencapai 20,23% dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 16,93% pada tahun 2016.

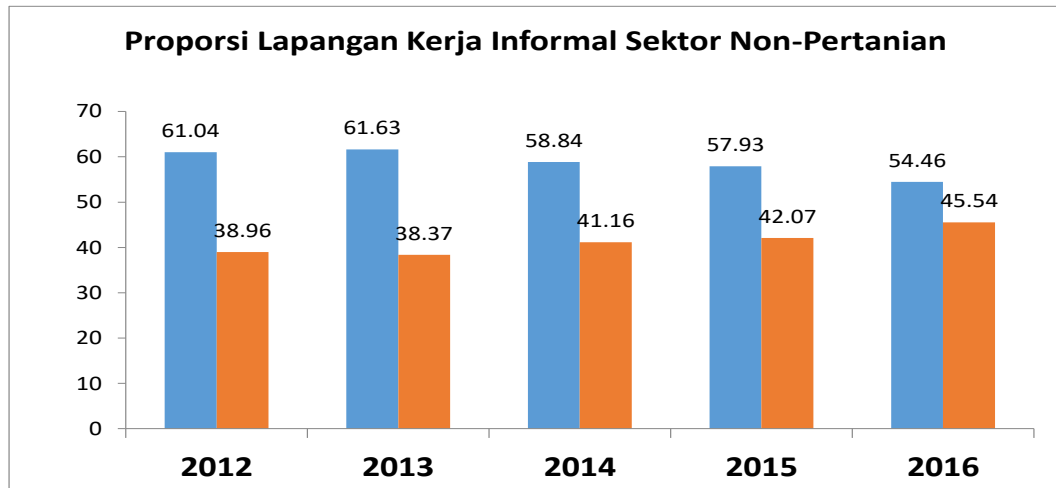


Gambar 25. Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian Provinsi Gorontalo

Pada sektor pertanian yang merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Gorontalo, persentase tenaga kerja informal cenderung mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2012 persentase tenaga kerja informal pada sektor pertanian mencapai 52,12% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 53,36% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, persentase tenaga kerja informal sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni hanya sebesar 48,28% dan tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 46,28%.

Adanya penurunan tenaga kerja informal pada sektor pertanian ini disebabkan banyaknya proyek infrastruktur yang berada di Provinsi Gorontalo (terutama proyek jalan) yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga banyak buruh tani yang beralih profesi menjadi pekerja konstruksi. Selain itu perkembangan ekonomi Gorontalo yang cukup pesat selama beberapa tahun terakhir juga membuat banyak pekerja informal di sektor pertanian beralih profesi ke sektor usaha lain.

Untuk sektor non pertanian, proporsi pekerja informal masih didominasi oleh laki-laki meskipun dari tahun ke tahun menunjukkan proporsi laki-laki dan perempuan semakin sama. Pada tahun 2012, pekerja informal di sektor non pertanian sebanyak 61,04% adalah laki-laki dan pada tahun 2016 proporsi laki-laki menurun menjadi 54,46% dan sisanya sebesar 45,54% adalah perempuan.



Gambar 26 Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Kegiatan UMKM mencakup hampir seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh kecamatan dan desa, bahkan desa terpencil, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat menjadi pilihan yang strategis dalam kerangka pembangunan daerah, distribusi pendapatan dan tenaga kerja serta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan, untuk perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 sebesar 52.523 unit, dan tahun 2016 menjadi 81.776 unit atau meningkat 55,69 % selama 5 tahun. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

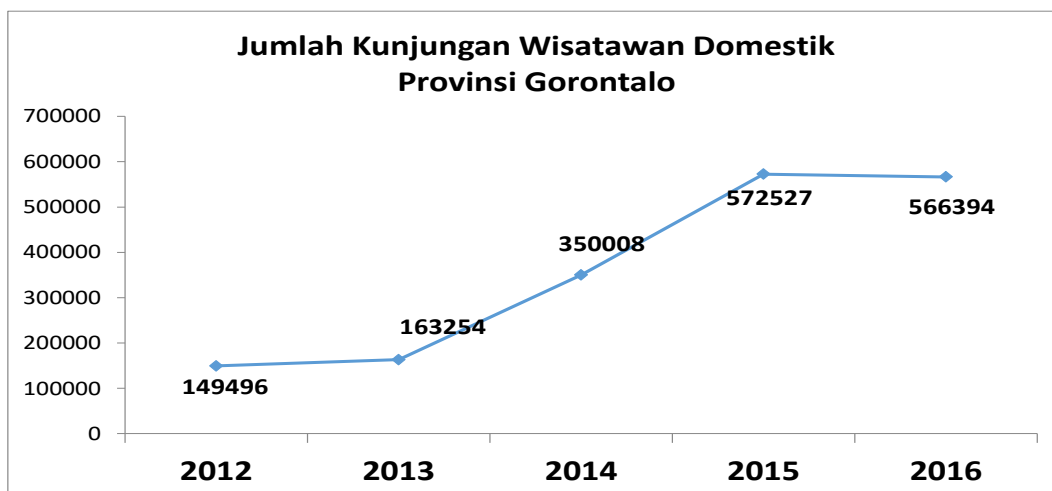
Tabel 42
Jumlah UKM non BPR/LKM Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016

NO	Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Gorontalo	10.513	11.694	10.525	10.937	8.425
2	Gorontalo	17.626	27.666	30.434	32.391	33.468
3	Boalemo	6.294	6.069	6.069	4.272	4.983
4	Pohuwato	4.672	5.100	2.521	4.971	6.513
5	Bone Bolango	11.412	11.656	17.768	20.031	22.738
6	Gorontalo Utara	2.006	2.508	3.386	3.386	5.649
	Provinsi Gorontalo	52.523	64.693	70.703	75.988	81.776

Sumber : Dinas Kumperindag Prov. Gorontalo, 2016

Meskipun pertumbuhan UMKM di Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan yang signifikan. Namun demikian perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha, dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi.

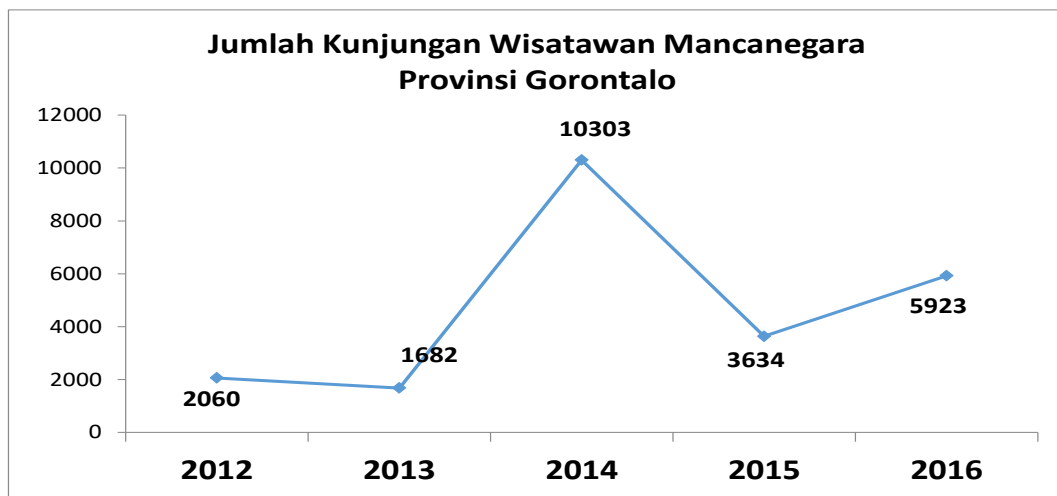
Pembangunan Sektor Pariwisata. Salah satu sektor unggulan Provinsi Gorontalo yang menjadi target pengembangan dalam RPJMD adalah sektor pariwisata. Hal ini mengingat masih besarnya potensi pariwisata di Provinsi Gorontalo yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jenis pariwisata yang terdapat di Provinsi Gorontalo pada umumnya berupa wisata laut/pantai. Beberapa obyek wisata yang menjadi andalan Provinsi Gorontalo dalam menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara adalah kawasan wisata Taman Laut Olele, Pulau Cinta, Pulau Saronde dan beberapa pantai yang terdapat sepanjang pesisir Gorontalo diantaranya Pantai Bolihutuo, Pantai Monano, dll.



Gambar 27. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Provinsi Gorontalo

Jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Gorontalo selama tahun 2012-2016 cukup menjanjikan. Dilihat dari asal wisatawan, mayoritas merupakan wisatawan domestik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2012 jumlah wisatawan domestik yang datang berkunjung ke Provinsi Gorontalo sebanyak 149.496 orang, meningkat menjadi 163.254 orang pada tahun 2013. Dan pada tahun 2016 jumlah wisatawan domestik yang datang berkunjung ke Provinsi Gorontalo mencapai 566.394 orang.

Sementara untuk wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan bersifat fluktuatif namun secara trend menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Gorontalo hanya sejumlah 2060 orang. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan



wisatawan mancanegara mengalami puncaknya yakni mencapai 10.303 orang yang pada tahun selanjutnya kembali mengalami penurunan yakni hanya sebanyak 3634 orang pada tahun 2015 dan 5923 orang pada tahun 2016.

Gambar 28. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Gorontalo

Disamping itu, untuk rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Gorontalo dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir berkisar antara 2 – 3 hari seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 43
Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi Gorontalo

Tahun	Rata-rata Lama Tinggal (Hari)		
	Tamu Asing	Tamu Domestik	Tamu Asing Dan Domestik
2012	1.84	2.12	2.12
2013	2.95	2.11	2.12
2014	2.49	2.18	2.19
2015	2.49	2.07	2.07
2016	2.25	1.5	1.52

Meningkatnya arus kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara juga tidak lepas dari semakin baiknya infrastruktur penunjang terutama bandara dan infrastruktur jalan. Peningkatan kapasitas bandara dan penambahan runway bandara menjadikan volume penerbangan meningkat drastis. Demikian pula dengan semakin baiknya infrastruktur jalan terutama ke daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata turut menyumbang peran terhadap peningkatan daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Gorontalo.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi yang terkait dengan tujuan ini antara lain:

- 1) Masih rendahnya produktivitas kerja di Provinsi Gorontalo. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja tersebut melalui realokasi tenaga kerja ke arah sektor dan sub-sektor kegiatan ekonomi dengan produktivitas tinggi terutama pada sektor pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu dalam ketahanan pangan dan sektor industri yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup.
- 2) Masih minimnya ketersediaan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja terutama tenaga kerja yang berpendidikan rendah.

- 3) Dari sisi ekonomi makro, perekonomian daerah sangat tergantung dari ekonomi nasional dan ekonomi nasional akan terpengaruh dari kondisi perekonomian global sehingga memburuknya perekonomian global akan berpengaruh pada perekonomian nasional hingga ke daerah. Disamping itu, perekonomian Gorontalo terbesar dibentuk oleh sektor primer yang sangat terpengaruh oleh dampak perubahan iklim dan cuaca.
- 4) Adanya ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dari sisi pendapatan daerah.
- 5) Hingga saat ini pendapatan daerah utamanya dari pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu digali potensi penerimaan dan retribusi daerah dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang memang saat ini kondisinya perlu direvitalisasi.



TUJUAN 9

Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah:

1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua ;
2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto ;
3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar ;

4. Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan ;
5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri;
6. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi ; dan
7. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet.

Pembangunan Infrastruktur. Untuk infrastruktur jalan, panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km, sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provnsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km.

Tabel 44
Panjang Jaringan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)		
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kab/Kota
1.	Kab. Gorontalo	141,27	47,39	1.891,40
2.	Kab. Bone Bolango	68,32	64,08	435,45
3.	Kab. Gorontalo Utara	204,09	45,00	-
4.	Kota Gorontalo	21,24	26,44	158,87
5.	Kab. Boalemo	164,20	118,60	626,30
6.	Kab. Pohuwato	149,48	131,00	525,53
	Jumlah	748,60	432,51	3.637,55

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Gorontalo, sejak tahun 2014 telah dibangun jalan lingkaran luar Gorontalo atau Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 45 Km, yang menghubungkan 3 wilayah yaitu

Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango, yang dibagi dalam tiga segmen. Untuk segmen 1 sepanjang 15 kilometer dan segmen 2 sepanjang 11 kilometer, dan segmen 3 sepanjang 26 Km. Pembangunan GORR telah diamanatkan dalam RTRW Nasional maupun RTRW Provinsi.

Untuk transportasi udara, Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) Bandara tergolong dalam Kelas I yang dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 – 400, Boeing 737 – 900ER, Boeing 737 – 800NG, MD – 90. Selain memiliki Bandar Udara Djalaludin, di Provinsi Gorontalo juga sedang dilakukan pembangunan bandara perintis, yaitu Bandar Udara Imbodu di Kabupaten Pohuwato. Kawasan Bandar Udara Imbodu direncanakan seluas 128,64 Ha yang berlokasi di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan yang berjarak 1 jam dari Kota Marisa. Bandara Imbodu direncanakan melayani pesawat jenis F-50 dengan kapasitas 50 penumpang. Di dalam *master plan* Pengembangan Bandara Imbodu, direncanakan Bandara Imbodu akan melayani pesawat sekelas M-50. Saat ini panjang landasan pacu (*runway*) 1.970 x 150 meter.

Untuk transportasi laut, Provinsi Gorontalo memiliki 2 pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek. Pelabuhan Anggrek dikhususkan sebagai pelabuhan ekspor. Tatanan kepelabuhanan nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Gorontalo adalah Pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan yang dapat berfungsi sebagai pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus seperti pelabuhan bongkar muat kargo dan petikemas, pelabuhan perikanan, pelabuhan batubara, pelabuhan Depo BBM.

Tabel 45
Nama – Nama Pelabuhan Di Provinsi Gorontalo

No	Nama pelabuhan	Jenis Pelabuhan	Lokasi
1	Pelabuhan Gorontalo	P. Pengumpul	Kota Gorontalo
2	Pelabuhan Anggrek	P. Pengumpul	Kab. Gorontalo Utara
3	Pelabuhan Kwandang	P. Pengumpul	Kab. Gorontalo Utara
4	Pelabuhan Tilamuta	P. Pengumpan	Kab. Boalemo
5	Pelabuhan Bumbulan	P. Pengumpan	Kab. Pohuwato

6	Pelabuhan Penyeberangan Marisa	P. Penyeberangan	Kab. Pohuwato
7	Pelabuhan Laut Kabila Bone	P. Penyeberangan	Kab. Bone Bolango

Untuk transportasi darat, Provinsi Gorontalo, memiliki 19 (sembilan belas) terminal yang terdiri dari 2 (dua) terminal type A, 10 (sepuluh) terminal type B dan 7 (tujuh) terminal type C. Terminal type A yang terdapat di Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Bus Isimu di Kabupaten Gorontalo dan Terminal Bus 42 Andalas di Kota Gorontalo. Dilihat dari trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), di Provinsi Gorontalo terdapat 26 jaringan trayek komersil dan 7 jaringan lintasan perintis yang bersubsidi.

Adapun untuk jumlah kendaraan bermotor menunjukkan data yang semakin meningkat. Selama tahun 2012-2016, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan mencapai 28,3%. Jumlah kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2016 sebesar 340.991 buah, dengan jenis kendaraan yang terbesar adalah sepeda motor yaitu sebesar 87,56%, selebihnya sebesar 12,4% terdiri dari mobil penumpang, bus, mobil barang dan mobil khusus.

Pembangunan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sektor Industri merupakan salah satu sektor pembangunan yang juga cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, dari total pertumbuhan ekonomi Gorontalo sebesar 6,52 persen di tahun 2016, sektor Industri menyumbangkan pertumbuhan sebesar 0,26 persen poin. Meskipun masih relatif rendah, namun kontribusinya terhadap penyusunan PDRB Gorontalo cenderung meningkat dalam kurun 2012-2016, yaitu dari 4,06 persen (2012) menjadi 4,19 persen (2016). Meskipun perlahan, namun peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor ini mengalami geliat yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Dalam kurun waktu yang sama, laju pertumbuhan sektor ini cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan total. Tercatat hanya pada tahun 2014 dan 2015 laju pertumbuhan sektor industri di bawah pertumbuhan total.

Tabel 46
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2012 – 2016
(dalam Milyar Rupiah)

No	Tahun	Kontribusi	Jumlah
1	2012	Milyar Rp	797,72
		%	4,06
2	2013	Milyar Rp	887,84
		%	4,01
3	2014	Milyar Rp	1.051,50
		%	4,17
4	2015	Milyar Rp	1.191,60
		%	4,18
5	2016	Milyar Rp	1.33,94
		%	4,19

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Perkembangan sektor industri di Provinsi Gorontalo saat ini sudah cukup baik. Tahun 2012 industri kecil menengah Provinsi Gorontalo berjumlah 12.360 unit usaha, dengan tenaga kerja berjumlah 31.910 orang, nilai produksi Rp.510.021.820.000. Jumlah IKM ini terus mengalami kenaikan, dimana tahun 2015 sebanyak 14.082 unit usaha, atau bertambah 1.722 unit, dengan nilai investasi sebesar Rp. 174 Milyar Rupiah. Sementara untuk nilai produksi mengalami peningkatan 5,79 persen hingga tahun 2016. Sampai dengan tahun 2016, daya serap tenaga kerja pada sektor industry mencapai 35.276 orang pekerja.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas, sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan beberapa program terkait dengan urusan komunikasi dan informatika. Keberhasilan pemerintah terlihat dari nilai pelayanan teknologi informasi di provinsi gorontalo (nilai PeGI) dengan kategori 3.75 (sangat baik) . Terkait pembangunan Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2012-2016 yang telah dicapai yaitu:

1. Terbangunnya infrastruktur jaringan intranet dengan jumlah 60 titik sambungan jaringan yang terdiri atas 55 titik sambungan jaringan OPD dan UPTD, 4 titik sambungan tempat umum dan 1 titik sambungan untuk asosiasi pengadaan barang dan jasa.
2. Kapasitas koneksi internet dengan kapasitas 12 Mbps untuk melayani 60 titik sambungan
3. Website dan portal Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat diakses melalui www.gorontaloprov.go.id dan www.gorontalo.go.id
4. Webmail untuk seluruh OPD, Kecamatan dan Desa dengan jumlah 3274 pengguna yang dapat diakses melalui <http://mail.gorontaloprov.go.id>
5. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan sistem informasi perpustakaan digital dengan jumlah 7851 database dan dokumen digital
6. Pengembangan Sistem Informasi Hukum dan Perundang-undangan dengan jumlah 19.793 database hukum dan perundang-undangan dalam bentuk dokumen digital.
7. Tersedianya 72 Pusat Layanan Internet Kecamatan dan 182 Desa Dering untuk layanan komunikasi.

Tantangan yang dihadapi yang berkaitan dengan tujuan 9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi antara lain :

- Masih minimnya kuantitas dan kualitas sarana infrastruktur yang tersedia saat ini di Provinsi Gorontalo. Untuk iturancangan kebijakan di masa mendatang sebaiknya ditekankan pada upaya peningkatan daya saing infrastruktur yang mencakup kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti jalan, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara (bandara), energi, ketenagalistrikan, serta telekomunikasi.
- Masih buruknya kondisi jalan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dari total panjang jalan Provinsi, yang memiliki kondisi baik sepanjang 209,00 atau sebesar 48,32%, kondisi sedang rusak sepanjang 15,80 km atau sebesar 3,65%, untuk kondisi rusak ringan sepanjang 24,43 atau sebesar 5,65%,

sementara kondisi jalan dengan kategori rusak berat sepanjang 73,33 km atau sebesar 16,95%.

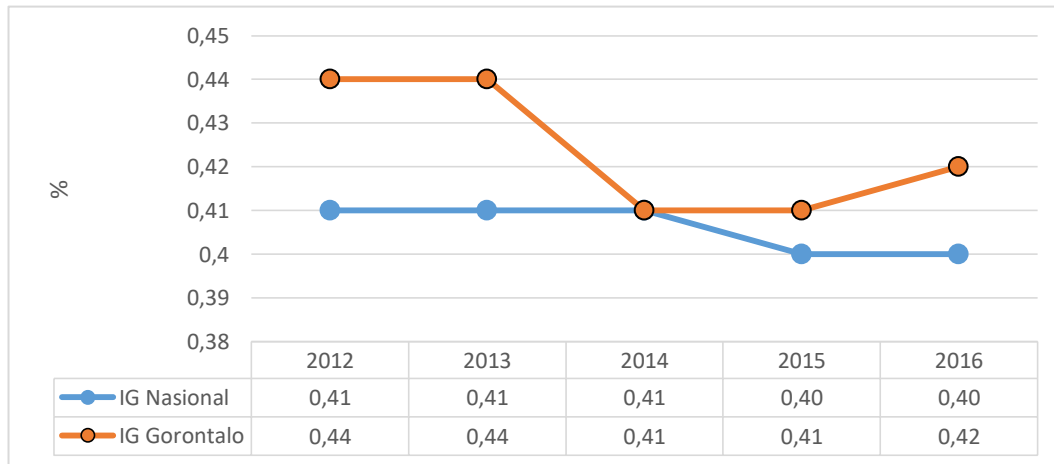
- Masih banyaknya ruas jalan yang belum tembus/terbuka masih sepanjang 109,95 Km, seperti ruas Tapa-Atinggola 12 Km, Marisa-Tolinggola 59,75 Km, Aladi-Tulabolo 22 Km, Tangkobu-Pentadu 16,20 Km) pembukaan akses jalan baru tersebut untuk meningkatkan percepatan mobilitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar. Belum terbukanya beberapa akses ruas jalan tersebut mengakibatkan kurang optimalnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- Makin kompleksnya permasalahan dibidang transportasi, Bandara dan Pelabuhan akibat bertambahnya populasi penduduk dan semakin cepatnya perpindahan serta pergerakan barang dan jasa
- Masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum
- Belum efisiennya angkutan dari dan ke pelabuhan, terutama di pelabuhan anggrek dan pelabuhan tilamuta serta masih rendahnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan yang ada.



TUJUAN 10

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Kesenjangan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi kesenjangan di tingkat Provinsi Gorontalo dilihat dari capaian nilai indeks gini rasio. Berdasarkan nilai Indeks Gini Ratio menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan/kesenjangan pendapatan. Koefisien gini dibagi menjadi tiga indikator, yakni kurang dari 0,3 persen menunjukkan ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 persen menunjukkan ketimpangan menengah, dan lebih dari 0,5 persen menunjukkan ketimpangan tinggi. Statistik menunjukkan bahwa i



ndeks gini Provinsi Gorontalo berada pada level menengah.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 29. Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2016

Sedangkan untuk kondisi kemiskinan, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 22,43 persen, dan terendah berada di Kota Gorontalo dengan persentase sebesar 6,05%.

Tabel 47
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016

No	Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Kemiskinan
1	Kabupaten Gorontalo	372.856	81.283	21,80
2	Kabupaten Boalemo	154.008	33.374	21,67
3	Kabupaten Pohuwato	150.385	33.731	22,43
4	Kabupaten Bone Bolango	155.238	28.704	18,49
5	Kabupaten Gorontalo Utara	111.824	21.168	18,93
6	Kota Gorontalo	206.454	12.490	6,05
7	Provinsi Gorontalo	1.150.765	203.690	17,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Jumlah Daerah Tertinggal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Untuk jumlah daerah tertinggal, Provinsi Gorontalo memiliki 3 daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yakni Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.



Gambar 30. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Untuk penanganan jumlah desa tertinggal, Provinsi Gorontalo berhasil meningkatkan ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial di 263 desa tertinggal selama tahun 2012-2017. Jumlah desa realisasi ini jauh lebih tinggi dari jumlah desa yang ditargetkan untuk dibangun yakni sebanyak 25 desa per tahun atau sejumlah 125 desa dalam periode 5 tahun.

Tantangan yang dihadapi yang berkaitan dengan tujuan ini diantaranya :

- 1) Tingkat kemiskinan di Gorontalo yang masih cukup tinggi, yakni pada tahun 2016 berada diangka 17,63% lebih tinggi dari%tasi angka kemiskinan rata - rata nasional yang berada diangka 11,13%,
- 2) Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat juga masih cukup tinggi.Hal ini ditunjukkan indeks gini masih sebesar 0,41 di tahun 2016.
- 3) Tantangan penyediaan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas terutama adalah pada terbatasnya kapasitas dan pemahaman Pemerintah

dan masyarakat umum akan keberagaman kondisi dan keberadaan penyandang disabilitas.

- 4) Persepsi masyarakat yang pada umumnya masih belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas pada posisi yang setara dan sama haknya untuk hidup dan berusaha.
- 5) Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terkait peraturan perundangundangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan;
- 6) Belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.



TUJUAN 11

Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

TARGET 1 – Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Gorontalo sampai dengan 2017 sebanyak 5.525 unit, terealisasi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 3.897 unit. Tahun 2017 ditargetkan 700 unit rumah layak huni yang akan dibangun yang tersebar seluruh kabupaten/kota.

Tabel 48
Rumah Layak Huni (Mahyani) yang dibangun sejak tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Mahyani yang dibangun	525 Unit	1.000 Unit	800 Unit	711 Unit	861 Unit

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PDT Provinsi Gorontalo, 2016

Disamping pembangunan rumah layak huni yang dialokasikan melalui anggaran APBD, Provinsi Gorontalo juga mendapat support anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun Rumah Layak Huni bagi nelayan. Sejumlah rumah khusus nelayan tersebut, dibangun di tiga lokasi, yaitu sebanyak 75 unit dengan anggaran Rp 11 miliar di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto. Kedua, sebanyak 50 unit dengan anggaran Rp. 7,9 miliar di Kelurahan Buhu, Kecamatan Telaya Jaya. Kemudian di desa Tabumela, sebanyak 75 unit dengan anggaran Rp 10,9 miliar. Untuk Tahun 2016 telah diresmikan 75 dari 200 rumah khusus nelayan yang dibangun. Peresmian dilakukan di Kelurahan Kayubulan, Kabupaten Gorontalo.

Untuk mendukung pencapaian target pada Tujuan 11 SDGs serta upaya dalam mewujudkan Kota Gorontalo Pusat Kegiatan Nasional (PKN), strategi pengembangan Kota Gorontalo antara lain :

- Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang mendukung fungsi pusat pertumbuhan wilayah kota agropolitan.
- Meningkatkan aksesibilitas ke kota Paguyaman, Kwandang, Manado, Bitung, Limboto, Toli-toli, dan Palu melalui pengembangan sistem transportasi antar-moda (jalan, pelabuhan, dan kereta api).
- Mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan baku dari sentra-sentra produksi pertanian dan kelautan/perikanan Teluk Tomini yang melayani wilayah Pulau Sulawesi.
- Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan yang terpadu dengan pengembangan potensi wisata daerah lain di Teluk Tomini melalui pengembangan dukungan aksesibilitas dan akomodasi wisata berstandar internasional.
- Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang memenuhi standar Internasional (bandara, pelabuhan, telekomunikasi, kesehatan), termasuk dengan mendorong peran swasta yang lebih besar secara selektif.

- Memantapkan kerjasama ekonomi dengan kota-kota dunia yang menjadi tujuan kegiatan export – import, khususnya kota-kota yang masuk dalam lingkup Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Brunei-Indonesia-Malaysia dan Philipina (KESR BIMP-EAGA), Asia Pasifik, dan kawasan lainnya.
- Meningkatkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dengan kota Paguyaman dan Kwandang dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase.
- Menyiapkan aturan pemintakatan (*zoning regulation*) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.
- Menyiapkan rencana tata ruang kawasan Gorontalo – Tapa – Suwawa – Limboto dan Isimu untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.

TARGET 2 – Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

Seiring dengan perkembangan waktu dan penambahan penduduk, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2012 - 2016 menunjukkan peningkatan rata-rata 8,83% pertahun. Hal ini berpengaruh pada rasio ketersediaan sarana infrastruktur jalan terhadap kendaraan bermotor, dimana pada tahun 2016 bernilai sebesar 0,014. Hal ini disebabkan karena selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016), panjang jalan di Provinsi Gorontalo cenderung tidak ada peningkatan yang signifikan, sementara jumlah kendaraan setiap tahunnya meningkat.

Tabel 49
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2012 - 2016
Provinsi Gorontalo

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Total Panjang Jalan	5.243,18	4.676,76	4.676,76	4.818,66	4.818,66
Jumlah Kendaraan	243.146	265.864	292.606	314.888	340.991
Rasio	0,021	0,017	0,015	0,015	0,014

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo; Kepolisian Daerah Gorontalo, 2016

Namun demikian, Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota terus meningkatkan kapasitas sarana infrastruktur jalan khususnya pada akses pelayanan dasar dan penunjang perekonomian. Selain pembukaan jalan baru, pembangunan infrastruktur jalan juga fokus pada revitalisasi dan pemeliharaan jalan.

Tabel 50
Kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan di Provinsi Gorontalo 2013-2016

Wilayah/Samsat	Kendaraan Bermotor					Jumlah
	Mobil Penumpang	Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Mobil Khusus	
Kabupaten Boalemo	1.046	19	1.351	25.993	25	28.434
Kabupaten Gorontalo	7.105	404	7.595	114.242	100	129.446
Kabupaten Pohuwato	1.469	29	1.936	32.877	7	36.318
Kabupaten Bone Bolango	2.228	23	1.469	38.463	23	42.206
Kota Gorontalo	11.141	267	6.102	87.000	77	104.587
Jumlah (total) 2016	22.989	742	18.453	298.575	232	340.991
2015	20.377	737	17.267	276.294	213	314.888
2014	18.180	723	15.886	257.627	190	292.606
2013	16.002	712	13.902	235.068	180	265.864

Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, 2016

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor semakin hari semakin menaik. Dalam kurun waktu 2012 - 2016, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor 28,3 persen. Jumlah kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2016 sebesar

340.991 buah, dengan jenis kendaraan yang terbesar adalah sepeda motor yaitu sebesar 87,56 persen, selebihnya sebesar 12,4 persen terdiri dari mobil penumpang, bus, mobil barang dan mobil khusus.

Sebaliknya, untuk angkutan umum darat selama tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami penurunan. Tercatat bahwa jumlah angkutan antar kota dalam provinsi yang tercatat dalam pengawasan izin trayek pada tahun 2013 sebesar 418 unit, mengalami penurunan hingga 30% tahun 2016 sebesar 291 unit.

Untuk transportasi udara, Bandara Djalaludin adalah bandara satu-satunya yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Bandara ini tergolong dalam Kelas I yang dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 – 400, Boeing 737 – 900ER, Boeing 737 – 800NG, MD – 90. Bandara perintis di Imbodu Kabupaten Pohuwato sedang dilakukan pembangunannya dan belum beroperasi. Bandara Imbodu direncanakan melayani pesawat jenis F-50 dengan kapasitas 50 penumpang.

Perusahaan penerbangan yang melayani rute Gorontalo ke luar daerah melalui Bandara Djalaludin adalah:

1. Maskapai PT. Garuda Indonesia Airways (Boeing 737- 800NG)
2. Maskapai PT. Lion Air (Boeing 737 – 900 ER)
3. Maskapai PT. Sriwijaya Air (Boeing 737 – 500)
4. Maskapai PT. Wings Air (Boeing ATR-72)
5. Maskapai Batik Air (Boeing 737- 800 NG)
6. Maskapai Aviastar/Susi Air DHC -6

Sementara itu, untuk transportasi laut Provinsi Gorontalo, sistem jaringannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran nasional; dan
- b. Tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran provinsi.

Provinsi Gorontalo memiliki 2 pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek. Pelabuhan Anggrek dikhususkan sebagai pelabuhan ekspor. Tatanan kepelabuhanan nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Gorontalo

adalah Pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan yang dapat berfungsi sebagai pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus seperti pelabuhan bongkar muat kargo dan petikemas, pelabuhan perikanan, pelabuhan batubara, pelabuhan Depo BBM.

Alur pelayaran nasional di Provinsi Gorontalo meliputi:

- a. Bitung – Gorontalo - Luwuk – Kolonodale – Raha - Kendari – Bau Bau - Makassar;
- b. Gorontalo – Bitung – Ternate;
- c. Gorontalo – Bitung – Balikpapan – Makassar – Surabaya – Jakarta;
- d. Anggrek – Buol - Tolitoli – Balikpapan – Palu – Makassar – Surabaya – Jakarta;
- e. Tilamuta – Dolong – Wakai – Ampana – Pagimana – Gorontalo;
- f. Tilamuta – Dolong/Wakai – Ampana – Pagimana – Banggai – Kolonadale – Makassar;
- g. Kwandang – Paleleh - Leok – Lokodidi – Buol – Tolitoli – Wani;
- h. Kwandang – Tarakan – Balikpapan;
- i. Kwandang – Samarinda.

TARGET 4 – Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Provinsi Gorontalo memiliki Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk kepentingan Sosial Budaya. Tujuannya adalah memajukan kepentingan budaya dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. KSP dari kepentingan Sosial Budaya meliputi:

1. Kota Pendidikan Gorontalo, kawasan pendidikan Kabila-Suwawa di Kabupaten Bone Bolango dan kawasan pendidikan Limboto di Kabupaten Gorontalo;
2. Kawasan wisata terpadu tirta, sejarah dan kerajinan tangan serta seni dan budaya Telaga-Gorontalo-Tapa.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi 1) pengembangan kawasan pendidikan,

pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya; dan 2) pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya. Selain itu, untuk menjaga warisan budaya, pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, membina kelompok seniman serta menyiapkan gedung kesenian. Informasi mengenai group dan gedung kesenian sejak tahun 2012 sampai 2016.

Tabel 51
Perkembangan Jumlah Group Dan Gedung Tahun 2012 - 2016
Provinsi Gorontalo

NO	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian	34	50	56	60	74
2	Jumlah gedung kesenian	6	11	15	20	28

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2016

TARGET 5 – Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan

Provinsi Gorontalo termasuk provinsi yang rawan bencana. Bencana yang sering dialami Provinsi Gorontalo adalah gempa, banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik. Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.

- Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

Banjir terjadi di samping karena faktor alam juga disebabkan faktor manusia seperti buruknya sistem drainase dan pembuangan sampah sembarangan ke dalam saluran air (selokan) dan badan air sungai. Selain itu, penebangan pohon dan alih fungsi lahan menyebabkan hutan gundul dan mengurangi daerah resapan air. Selain itu, Provinsi Gorontalo dengan topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk menyebabkan beberapa kawasan menjadi kawasan rawan banjir seperti Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Di kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Talamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Talamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

Bencana yang lain adalah gelombang pasang dan ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai \pm 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Talamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami.

Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan.

Berdasarkan laporan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di wilayah Provinsi Gorontalo tidak terdapat Kota Tangguh Bencana. Namun untuk program pembentukan Desa Tangguh Bencana, di daerah Provinsi Gorontalo terdapat dua desa yang difasilitasi menjadi desa tangguh bencana yakni Desa Hutakalo Kecamatan Sumalata dan Desa Mokonuwu Kecamatan Monano. Kedua desa ini berlokasi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

TARGET 6 – Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Upaya mengetahui pencemaran udara dan bagaimana mengendalikannya, harus dilakukan melalui pengukuran dan pemantauan terhadap kualitas udara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional, parameter yang diukur dalam pemantauan tersebut adalah lima parameter yaitu CO, NO₂, Ozon, SO₂, dan TSP.

Tabel 52
Kualitas Udara di Titik Pantau Kota Gorontalo

No.	Parameter	Baku Mutu (ug/m ³)	Titik Pantau			
			Kantor Balihristi	Permukiman Awara	Pasar Sentral	Terminal 1942
1.	CO	30.000	1875	1875	3750	2857
2.	NO ₂	400	20,67	52,74	41,91	59,45
3.	O ₃	235	57,1	26,1	26,1	26,1
4.	SO ₂	900	<0,017	<0,017	20,57	<0,017
5.	TSP	230	68	62	79	77

Sumber: BLHRD Provinsi Gorontalo, 2016

Pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo pada bulan Januari tahun 2016 menunjukkan bahwa kualitas yang tergolong baik karena masih berada di bawah baku mutu udara yang dipersyaratkan. Secara umum, kualitas udara ambien di Provinsi Gorontalo masih memenuhi syarat karena semua parameter yang diukur

masih dibawah baku mutu udara ambient nasional. Salah satu hasil pengukuran di salah satu lokasi pantau adalah sebagai berikut:

Sementara itu, untuk masalah sampah merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam pembangunan. Oleh karenanya perlu dikelola secara terpadu dan kompherensif. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah, dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan dan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah.

Tabel 53
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kabupaten/Kota tahun 2015 Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani (ton)	Jumlah volume produksi sampah (ton)	Persentase
1	Gorontalo	324	1.353,48	4,18
2	Boalemo	41	407,76	9,95
3	Pohuwato	253	426,08	1,68
4	Bone Bolango	136	529,25	3,89
5	Gorontalo Utara	62	311,18	5,02
6	Kota Gorontalo	559	997,46	1,78
	Jumlah	1.375	3.425,21	2,49

Sumber : BLHRD Provinsi Gorontalo, 2016

TARGET 7 – Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

Menurut Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Proporsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari total wilayah kota. Tabel di bawah ini menunjukkan rasio RTH per satuan luas wilayah di Provinsi Gorontalo.

Tabel 54
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Provinsi Gorontalo
Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	521,7	521,7	521,7	521,7	521,7
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB*	2.013,47	2.018,50	2.023,54	2.028,61	2.033,68
3.	Luas wilayah (Ha)	1.243.50	1.243.50	1.243.50	1.243.50	1.243.50
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	0,259	0,258	0,257	0,257	0,256

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 55
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	Rasio Ruang Terbuka Hijau
1	Gorontalo	214.348	350,39	98,87	0,28
2	Boalemo	173.661	428,09	102,63	0,23
3	Pohuwato	445.560	411,73	168	0,41
4	Bone Bolango	189.149	230,71	140,54	0,61
5	Gorontalo Utara	214.186	465,76	8	0,02
6	Kota Gorontalo	6.596	147	3,66	0,02

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	Rasio Ruang Terbuka Hijau
	Jumlah	1.243.500	2.033,68	521,7	0,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2016

RTH di Provinsi Gorontalo di beberapa daerah masih dibawah dari 30%, seperti di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Detail RTH di masing-masing daerah ditunjukkan pada Tabel 55.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk pencapaian tujuan ini adalah antara lain:

1. Belum konsistennya pemerintah kota dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dan atribut kota hijau.
2. Masih ada masyarakat yang belum memiliki rumah dan menempati kawasan pemukiman tidak layak huni
3. Kurangnya ruang terbuka hijau publik di kabupaten /kota.
4. Meningkatnya budaya konsumtif dan sampah perkotaan
5. Partisipasi masyarakat dalam mendorong pengembangan kota hijau masih kurang, misalnya untuk Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
6. Masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana prasarana persampahan



TUJUAN 12

Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

TARGET 4 – Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan

Salah satu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan SCP adalah penerapan Proper yang menggambarkan pola produksi berkelanjutan yang dicerminkan dengan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Proper dikembangkan dengan prinsip dasar antara lain peserta bersifat selektif, artinya peserta Proper diperuntukkan bagi industri yang proses produksinya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan peduli terhadap citra atau reputasi perusahaannya. Terdapat lima kategori Proper, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, yang merupakan urutan capaian kinerja perusahaan dari yang terbaik/konsisten sampai dengan terendah

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.892/MENLHK/SETJEN/STD.0/12/2016 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2016, terdapat tiga perusahaan yang meraih peringkat biru dalam penilaian proper. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. PLN (Persero) Area Gorontalo PLTD Telaga, PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII TBBM Gorontalo Group, dan PT. Harim.

TARGET 8 – Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

Fasilitas publik merupakan tempat ideal untuk mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan karena fasilitas publik merupakan tempat pertemuan antara perilaku masyarakat selaku pengguna fasilitas publik dengan perilaku pemerintah dan swasta selaku pengelola fasilitas publik. Standar Pelayanan Masyarakat di fasilitas publik (SPM-FP) mendorong tersedianya informasi, edukasi, dan sarana untuk perubahan perilaku di fasilitas publik. Fokus besar SPM-FP terletak pada perubahan perilaku di fasilitas publik sejalan dengan Program Gerakan Indonesia Bersih dan Program Gerakan Indonesia Tertib, sebagaimana diamanatkan pada Instruksi Presiden No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Standar Pelayanan Masyarakat di fasilitas publik

mendorong perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan, tidak hanya dilakukan melalui edukasi di pendidikan formal tetapi juga dilakukan di fasilitas publik.

SPM-FP merupakan standar khusus yang ditetapkan KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.90/MenLHK/Setjen/Set.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan. SPM-FP bertujuan antara lain untuk menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik dengan materi substansi pengelolaan lingkungan hidup terpadu, menyediakan fasilitas publik yang ramah lingkungan, serta layanan informasi, edukasi, sarana dan apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik.

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan, Provinsi Gorontalo mendorong pembangunan sub sektor tanaman pangan untuk pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu ketahanan atau kedaulatan pangan. Ketersediaan dari aspek produksi dan konsumsi masyarakat sangat tergantung dari pasokan pangan dari wilayah tersebut. Meskipun demikian, urusan produksi dan konsumsi berkelanjutan di Provinsi Gorontalo tidak secara spesifik menjadi program atau ditangani secara tersendiri, tetapi terintegrasi dengan program-program lainnya, misalnya melalui program pertanian, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, dan lain-lain.

Adapun tantangan untuk Tujuan 12 yang terkait dengan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah:

- Masih rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi
- Rendahnya konsumsi pangan lokal di masyarakat
- Masih banyaknya penggunaan bahan kimia dalam produk-produk makanan olahan serta kurangnya kesadaran masyarakat
- Meningkatnya limbah buangan industri terutama limbah B3

- Kurangnya aktivitas daur ulang sampah dan meningkatnya jumlah sampah
- Kurangnya perusahaan yang memiliki sertifikat ISO 14001
- Belum ada produk makanan ramah lingkungan yang teregister di Provinsi Gorontalo
- Kurangnya riset-riset dan pengembangan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan teknologi murah serta ramah lingkungan
- Masih kurangnya tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan dan kesadaran masyarakat dalam kelestarian lingkungan

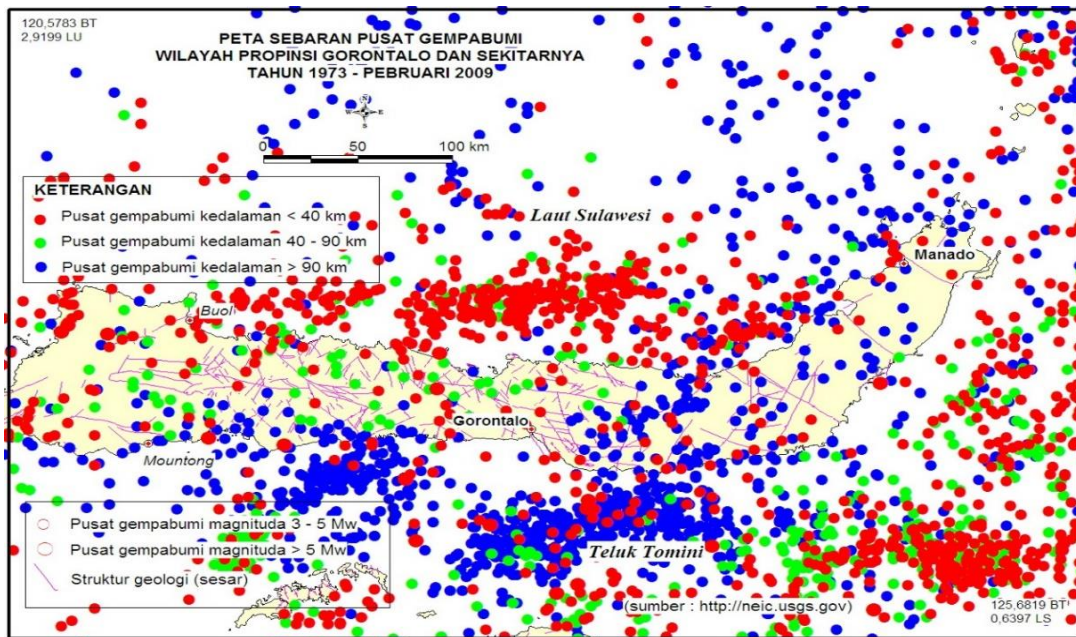


TUJUAN 13

Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

TARGET 1 – Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah

Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi. Kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana gempa yang merusak sangat diperlukan mengingat jalur Gorontalo, Limboto, hingga Teluk Kwandang, dilalui oleh patahan yang diperkirakan aktif dan dikenal sebagai Sesar Gorontalo (Kertapati, 2006). Melalui sesar-sesar aktif itulah penjalaran gempa bumi terjadi. Apalagi susunan batuan lunak bekas endapan danau, dan lereng-lereng terjal di perbukitan sekitarnya merupakan tempat-tempat yang tidak baik untuk fondasi bangunan, kecuali setelah melalui perhitungan teknik sipil yang cermat.



Gambar 31. Peta Sebaran Pusat Gempa Bumi Wilayah Provinsi Gorontalo dan Sekitarnya Sejak Tahun 1973 – 2009

Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo disusun atas dasar regulasi, kelembagaan dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana. Fase bencana ini terdiri dari fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi.

Rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah :

1. Menurunnya risiko bencana
2. Peningkatan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana
3. Memulihkan Daerah terdampak bencana melalui rahabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Sasaran di dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah:

1. Terwujudnya masyarakat terlatih dan sadar ancaman bencana
2. Meningkatnya respon time dan SDM terlatih

3. Meningkatnya pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana
Dalam rangka mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan, dirumuskan strategi perencanaan pembangunan BPBD Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Mengarahkan penanganan bencana dengan pendekatan berbasis desa
2. Optimalisasi TRC yang didukung oleh Logistik & Peralatan
3. Pendekatan *Bottom Up* dalam rencana dan pelaksanaan pemulihan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Fokus 100 desa/kelurahan rawan bencana Integrasi Desa Tertinggal dan masyarakat miskin
2. Meningkatkan kecepatan pelaksanaan fungsi komando, fungsi koordinasi dan fungsi pelaksana untuk mengerahkan anggaran, logistik dan peralatan dalam keadaan darurat
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana

Adapun Regulasi terkait penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo adalah

- 1) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo ;
- 2) Peraturan Gubernur No.15 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo ;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

TARGET 2 – Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu isu strategis bidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selama periode 2017-2022 adalah Perubahan iklim dan komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini untuk menselaraskan dengan tujuan dan komitmen pemerintah untuk penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional sebesar 29% pada 2030.

Data emisi gas rumah kaca di Provinsi Gorontalo selama tahun 2001 hingga 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 56
Total Emisi Gas Rumah Kaca Dari Hutan dan Lahan Gambut di
Provinsi Gorontalo

Tahun	Emisi bersih (tCO₂-eq)
2001	5.796.092
2002	10.710.978
2003	8.264.095
2004	5.101.274
2005	5.171.581
2006	5.680.260
2007	3.981.916
2008	3.473.379
2009	3.551.443
2010	2.269.100
2011	1.937.220
2012	1.898.703

Sumber data: <http://www.incas-indonesia.org/wp-content/uploads/2015/10/Gorontalo.pdf>

Berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi Kementerian Lingkungan Hidup, emisi gas rumah kaca di Provinsi Gorontalo selama tahun 2002 hingga 2012 senantiasa mengalami penurunan secara konsisten. Ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Provinsi Gorontalo untuk senantiasa menekan total emisi gas rumah kaca sesuai dengan tujuan pemerintah pusat.

Tabel 57
Total Luasan Tahunan Hutan dan Lahan Gambut yang Mengalami
Perubahan di Gorontalo

Tahun	Luas (Ha)
2001	23.620
2002	36.657
2003	27.614
2004	8.766
2005	9.663

2006	12.034
2007	9.305
2008	8.459
2009	9.085
2010	3.617
2011	3.316
2012	3.504

Sumber data: <http://www.incas-indonesia.org/wp-content/uploads/2015/10/Gorontalo.pdf>

Tantangan yang dihadapi pada Tujuan ini adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatnya frekuensi bencana alam di Gorontalo
- 2) Belum adanya penelitian yang komprehensif mengenai dampak perubahan iklim, termasuk kondisi penurunan atau peningkatan emisi gas rumah kaca
- 3) Perubahan iklim masih dalam tataran wacana dalam kebijakan pemerintahan lokal.
- 4) Belum ada laporan penurunan atau peningkatan emisi gas rumah kaca yang kontinu setiap tahun.



TUJUAN 14

Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

TARGET 5 – Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkapnya yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 Ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/thn. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton per tahun.

Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo terdiri dari Panjang garis pantai 655,8 Km, dengan rincian pantai utara (Laut Sulawesi) sepanjang 217,7 Km dan pantai selatan (Teluk Tomini) sepanjang 438,1 Km. Luas perairan Gorontalo 50.500 Km², terdiri dari perairan Teluk Tomini 7.400 Km², Laut Sulawesi 3.100 Km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi 40.000 Km² serta Desa pesisir berjumlah 131 Desa, potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengembangan potensi kelautan dan perikanan lainnya.

Total keseluruhan potensi perikanan yang ada yang terdiri dari potensi perikanan tangkap dan budidaya, tingkat pemanfaatan (existing) perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo (6 Tahun Terakhir) baru mencapai 7 - 10,28 % atau rata-rata pemanfaatan per tahun hanya 8,36 % dari potensi perikanan tangkap di dua WPP (715 & 716) yaitu sebesar 1,2 juta ton, walau pemanfaatannya juga dilakukan oleh 6 provinsi di wilayah tersebut. Sedangkan untuk tingkat pemanfaatan (existing) perikanan budidaya di Provinsi Gorontalo (6 tahun terakhir) hanya 18,61 % - 54,97 % atau rata-rata pemanfaatan per tahun baru sekitar 32,76 % dari potensi perikanan budidaya sebesar 339.268 ton.

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan di akui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu :

- a. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai Perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya sebesar 595.630 Ton Per tahun ;
- b. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai samudra pasifik bagian utara pulau Halmahera dan irian jaya) Potensi Perikanan Tangkapnya sebesar 630.470 Ton Per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut ;
- c. Tapi, jika kita pisahkan berdasarkan potensi di wilayah ZEE laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik (bagian Utara Irian Jaya) maka potensi perikanan

tangkap sebesar 487.600 ton per tahun atau 21,2 % dari total Potensi perikanan di wilayah ZEE Indonesia yaitu 2,3 juta Ton. Sehingga potensi perikanan di bawah 12 mil sebesar 142.870 ton per tahun.

Tabel 58
Potensi Perikanan Tangkap di Wilayah WPP 716 dan ZEE Yang Juga Dimanfaatkan Oleh Provinsi Gorontalo

No	Potensi Perikanan Tangkap WPP 716 dan ZEE Laut Sulawesi	Potensi ton/thn
1	Potensi WPP 716 Laut Sulawesi sampai samudra Pasifik bagian sebelah utara pulau halmahera dan irian jaya Termasuk ZEE	630,470
2	Khusus Potensi ZEE Laut Sulawesi sampai bagian utara Irian jaya 21,2 % dari 2,3 Juta Ton Potensi ZEE Indonesia	487,600
3	Potensi Perikanan tangkap WPP 716 di bawah 12 mil (atau selisihnya)	142,870

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2016

Sedangkan untuk perairan umum (danau, dan sungai) potensi perikanan tangkap Gorontalo diperkirakan 900 ton per tahun.

Tabel 59
Potensi Perikanan Tangkap Berdasarkan Komoditi Perikanan di Dua WPP dan Potensi Perikanan Budidaya Berdasarkan Kawasan

Komoditi Perikanan	Potensi (Ton/Tahun)		
	WPP Teluk Tomini	WPP Laut Sulawesi	Jumlah
I. Potensi Perikanan Tangkap	595.620	630.470	1.226.090
1. Pelagis Besar	106.510	175.260	281.770
2. Pelagis Sedang / Kecil	379.440	384.750	764.190
3. Demersal	88.840	54.860	143.700
4. Udang Penaeid	900	250	1.150
5. Ikan Karang Konsumsi	12.500	14.500	27.000
6. Lobster	300	400	700
7. Cumi-Cumi	7.130	450	7.580

II. Potensi Perikanan Perikanan Budidaya			339.268
1. Air Tawar			4.218
2. Air Payau			59.770
3. Air Laut			275.280
Total (Ton/Tahun)			1.565.358

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2016

Kawasan Konservasi Perairan dan Kepatuhan Pelaku Usaha. Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 adalah : (1) Mewujudkan ketahanan pangan dengan peningkatan produksi perikanan; (2) **Mewujudkan kesejateraan pelaku usaha perikanan dengan peningkatan nilai tukar nelayan, pembudidaya (NTN-Pi). Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap; Produksi perikanan budidaya; konsumsi ikan; Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola.**

Terkait dengan kawasan konservasi, indikator kinerja selama tahun 2017-2022 adalah meningkatkan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola dari 390 Ha pada tahun 2018 menjadi 11.196 Ha pada tahun 2022. Saat ini jumlah kawasan konservasi kelautan di Provinsi Gorontalo sebanyak dua kawasan yakni Kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.

Sedangkan untuk tujuan dalam meningkatkan kepatuhan usaha, indikato kinerja Peningkatan persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap perundang-undangan yang berlaku dari 72 % pada tahun 2018 menjadi 86 % pada tahun 2022.

TARGET 7 – Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.

Kerangka Hukum/Regulasi Hak Akses Perikanan Skala Kecil. Dalam upaya melindungi akses nelayan terhadap perikanan skala kecil, Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya :

- 1) Surat Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Kegiatan Seksi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Tingkat Provinsi Gorontalo
- 2) [Pergub Nomor 46 Tahun 2016](#) Tentang Pengelolaan Dan Tarif Penjualan Unit Usaha Pabrik Es Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksu Mina Bahari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
- 3) Surat Keputusan Gubernur no. 83/24/II/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal (*Satgas Illegal Fishing*). Satgas Illegal Fishing dibentuk berdasarkan SK Gubernur yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Selain diisi oleh jajaran DKP, satgas juga berasal dari tim gabungan seperti Polairud Polda, Kejaksaan Tinggi dan Pangkalan TNI AL (Lanal) Gorontalo.

Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan. Upaya pemberian akses ke lembaga keuangan dan perbankan bagi nelayan skala kecil dilakukan melalui pengembangan skema pinjaman kredit yang sesuai untuk nelayan skala kecil. Selain itu untuk memberdayakan nelayan, pemerintah membuat program Bina Kelompok Perikanan. Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok) adalah kelompok perikanan baik kelompok perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan yang mendapat pembinaan langsung dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dan Kab/kota seperti pembinaan peningkatan produksi perikanan dan manajemen pengelolaan usaha perikanan serta

kelompok yang mendapatkan bantuan sarana produksi perikanan dan Kelompok ini terdiri dari Kube Perikanan dan kelompok wanita pesisir.

Realisasi Cakupan bina kelompok perikanan pada kurung waktu lima tahun mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 11,95 % per tahunnya atau dari 474 kelompok yang dibina pada tahun 2012 menjadi 630 kelompok pada tahun 2016. Begitu pula dengan perbandingan antara target dan realisasi, maka cakupan bina kelompok juga menunjukkan pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 7,46 % per tahunnya.

Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa nelayan/Pesisir) adalah Jumlah desa nelayan yang diintervensi oleh Anggaran APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program/kegiatan Pengembangan Desa Nelayan Tangguh. Program/kegiatan PDNT adalah merupakan program yang berbasis desa, dimana Dinas Perikanan dan Kelautan menintervensi beberapa kegiatan utama yang langsung dirasakan oleh nelayan dan wanita pesisir seperti bantuan sarana produksi (perahu fiber, mesin tempel dan katinting, saranaperbengkelan nelayan dan warung serba ada yang dikelola langsung oleh wanita pesisir. Tujuan program/kegiatan ini adalah meningkatkan produksi perikanan dan peningkatan kehidupan nelayan dari sisi ekonomi (peningkatan pendapatan). Desa yang menjadi sasaran PDNT pada lima tahun terakhir adalah 77 desa atau terpenuhi 100 % dari target yang ditentukan.

Jumlah Nelayan Terlindungi. Dalam upaya memberdayakan nelayan, pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya melakukan Peningkatan kemampuan manajemen usaha nelayan skala kecil melalui:

- 1) program pendampingan dan pembinaan manajemen usaha
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil.
- 3) Pengembangan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui program science and tecno-park (STP) guna meningkatkan akses teknologi dan informasi

Provinsi Gorontalo juga mendapat support anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun Rumah Layak Huni bagi nelayan. Sejumlah rumah khusus nelayan tersebut, dibangun di tiga lokasi, yaitu sebanyak 75 unit dengan anggaran Rp11 miliar di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto. Kedua, sebanyak 50 unit dengan anggaran Rp7,9 miliar di Kelurahan Buhu, Kecamatan Telaya Jaya. Kemudian di desa Tabumela, sebanyak 75 unit dengan anggaran Rp10,9 miliar. Untuk Tahun 2016 telah diresmikan 75 dari 200 rumah khusus nelayan yang dibangun. Peresmian dilakukan di Kelurahan kayubulan, Kabupaten Gorontalo.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam tujuan ini antara lain :

- 1) Masih ditemukan beberapa lokasi yang melakukan IUU-fishing
- 2) Masih terbatasnya upaya melakukan usaha penangkapan ikan di laut bebas (high sea) sebagai akibat terbatasnya kemampuan armada perikanan yang dimiliki oleh nelayan. Data menunjukkan armada tangkap di Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 masih di dominasi oleh perahu dengan motor tempel sebesar 79 % dari total armada tangkap yang ada sedangkan kapal motor yang di atas 30 GT hanya 3 % dan perahu tanpa motor juga masih banyak yaitu sekitar 18 % dan hal ini di miliki oleh rata-rata nelayan miskin.
- 3) Belum optimalnya pelayanan Taksi Mina Bahari sehingga akan terus dikembangkan dan disempurnakan mengingat fungsinya yang sangat strategis dalam memberikan kemudahan bagi nelayan dan pembudidaya ikan termasuk pengolah ikan hingga ke desa sentra produksi perikanan, untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi, kebutuhan bahan pokok sehari-hari, termasuk pinjaman modal untuk pengembangan usaha perikanannya.



TUJUAN 15

Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

TARGET 1 – Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Untuk kepentingan pelestarian hutan dan kawasan, Provinsi Gorontalo memiliki hutan yang berfungsi sebagai fungsi lindung, fungsi konservasi serta sisanya adalah hutan produksi untuk memproduksi hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi terdiri dari Hutan Suaka Alam (HSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Ada 6 kawasan hutan konservasi (HSA dan KPA) di Gorontalo yaitu:

- Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
- Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
- TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
- Suaka Margasatwa Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
- CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
- CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan

Semua kawasan konservasi dibawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE). Sementara kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) di bawah pengelolaan pemerintah Provinsi Gorontalo. Hutan

Produksi dan Hutan Lindung dan terdapat di hampir semua kabupaten/kota di Gorontalo (kecuali Kota Gorontalo yang tidak memiliki Hutan Produksi).

Tabel 60
Luas Kawasan Hutan dan Perairan Dibagi Berdasarkan Fungsi
(Berdasarkan SK Menhut No. 325/Menhut-II/2010)

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha)							Luas Total (Ha)
		HSA dan KPA	HL	HPT	HP	HPK	APL	Tubuh Air	
1	Gorontalo	24,191	13,127	40,775	17,783	2,377	115,564	2,912	216,729
2	Boalemo	11,532	29,785	45,981	14,783	4,800	79,714	957	187,552
3	Pohuwato	39,705	136,024	82,613	41,572	67,038	64,329	1,009	432,290
4	Bone Bolango	104,744	15,710	18,816	824	-	45,004	392	185,490
5	Gorontalo Utara	16,173	7,953	65,454	15,556	5,576	60,437	213	171,362
6	Kota Gorontalo	-	427	-	-	-	6,291	90	6,808
Total Berdasarkan Citra		196,345	203,026	253,639	90,518	79,791	371,339	5,573	1,200,231
Total		196,653	204,608	251,097	89,879	82,431	-	-	824,668

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2016

TARGET 2 – Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.

Tabel 61
Luas Kawasan Hutan Dibagi Berdasarkan Fungsi

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Hutan					Jumlah luas Hutan
		Terbatas	Tetap	Konversi	Hutan Lindung	Konservasi	
1	Gorontalo	41.899,34	17.714,10	2.404,43	13.124,91	24.777,84	99.920,62
2	Boalemo	44.240,79	14.537,49	4.783,09	28.364,91	10.970,62	102.896,90
3	Pohuwato	83.304,56	41.476,29	10.610,28	136.278,06	39.685,14	311.355,33
4	Bone Bolango	18.830,08	824,1	0	15.634,23	104.732,42	140.020,83
5	Gorontalo Utara	64.326,20	15.540,08	5.554,01	7.894,38	16.207,93	109.552,60
6	Kota Gorontalo	0	0	0	470,48	0	470,48
Total		252.600,97	90.092,06	23.352,81	210.766,97	196.373,95	764.186,76

Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo, 2016

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan sehingga pada tahun 2016 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi

764.186,76 Ha. Berikut adalah luas kawasan hutan menurut batas administrasi kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2016.

Pelepasan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi. Berikut luas pelepasan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo.

Tabel 62
Pelepasan Kawasan Hutan Di Provinsi Gorontalo

No	Pelepasan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo	Luas (Ha)
1	Total Pelepasan (Perkebunan Kelapa Sawit)	55.941.85
	PT. Sawindo Cemerlang Tahun 2011	18.860.00
	PT. Sawit Tiara Nusa Tahun 2011	6.934.48
	PT. Inti Global Laksana Tahun 2011	9.257.49
	PT. Banyan Tumbuh Lestari Tahun 2012	12.026.88
	PT. Banyan Tumbuh Lestari Tahun 2014	8863.00
2	Total Rencana Pelepasan (Transmigrasi)	571.74
	Rencana Pelepasan Transmigrasi Sandalan	571.74

Sumber : BPKH Wil XV Gorontalo. 2016

TARGET 3 – Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

Masalah yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pengelolaan kehutanan adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan dan lahan untuk kepentingan non kehutanan, baik berupa perambahan hutan, pencurian kayu (*illegal logging*), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang, isu perubahan iklim serta rendahnya pemanfaatan nilai hasil hutan non kayu. Luas lahan kritis Provinsi Gorontalo saat ini adalah 706.930 Ha, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 63
Sebaran Lahan Kritis Per-Kabupaten/Kota sampai dengan 2016 Provinsi
Gorontalo

LOKASI	KRITERIA LAHAN KRITIS (Ha)			TOTAL
	SK	K	AK	
Kab. Gorontalo Utara	46.970	21.892	68.728	137.590
Kab. Gorontalo	62.398	27.629	69.463	159.491
Kab. Boalemo	32.908	24.812	65.746	123.467
Kab. Pohuwato	24.725	26.128	148.670	199.523
Kab. Bone Bolango	33.818	9.803	38.723	82.344
Kota Gorontalo	2.102	324	2.090	4.515
JUMLAH	202.921	110.589	393.421	706.930

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Gorontalo, 2013.

Berdasarkan jenis di dalam dan di luar kawasan hutan, maka sebaran areal lahan kritis terluas berada di dalam kawasan hutan, yaitu 397.729 Ha.

Tabel 64
Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan
Provinsi Gorontalo tahun 2016

No	Jenis Kawasan	Luas Lahan Kritis (Ha)
1.	Dalam Kawasan Hutan	397.729
2	Luar Kawasan Hutan	309.201
	Jumlah	706.930

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Gorontalo. 2016.

Upaya-upaya pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan penghentian penggurunan dan memulihkan lahan kritis dilakukan melalui upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Sejak tahun 2012-2016, luas lahan yang direhabilitasi seluas 169,890 ha. Jumlah ini melampaui target pemerintah yang hanya menargetkan 77,000 Ha selama 5 tahun.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 15, **Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan** adalah sebagai berikut:

- 1) Pembalakan hutan (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal yang cenderung meningkat menyebabkan terjadinya deforestasi didalam kawasan dan luar kawasan.

- 2) Semakin menurunnya luas dan kualitas kawasan Danau Limboto serta kawasan lainnya.
- 3) Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) belum berjalan optimal.
- 5) Belum optimalnya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di wilayah Perhutanan Sosial.
- 6) Masih lemahnya penegakan hukum perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam.
- 7) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 8) Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup.



TUJUAN 16

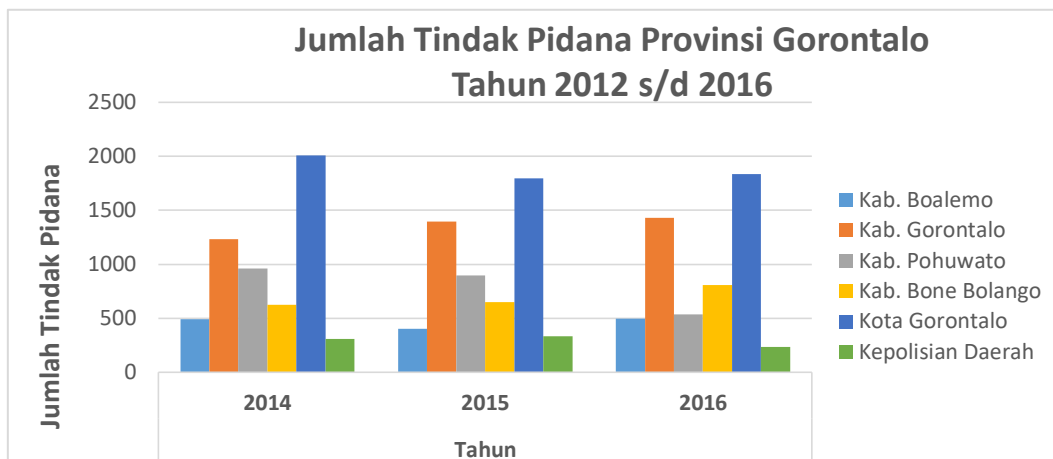
Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan. Dari sisi stabilitas politik dan keamanan, daerah Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang merupakan daerah yang masih dalam status aman. Kondisi ini sangat baik bagi sektor usaha untuk melakukan investasi di daerah Gorontalo karena iklim usaha akan berkembang dengan baik dan signifikan jika daerah dalam kondisi aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tahun 2016, jumlah tindak pidana di Provinsi Gorontalo sejak Tahun 2014 cukup tinggi kemudian meningkat pada Tahun 2015 bertambah menjadi 333 kasus, selanjutnya dengan adanya program/kegiatan yang dilaksanakan demi menekan angka kekerasan di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016 mengalami penurunan yakni 233 kasus.

Tabel 65
Jumlah Tindak Pidana Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016

NO	Wilayah	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kab. Boalemo	493	404	495
2	Kab. Gorontalo	1.233	1.398	1.431
3	Kab. Pohuwato	962	898	535
4	Kab. Bone Bolango	623	649	805
5	Kota Gorontalo	2.008	1.795	1.837
6	Kepolisian Daerah	310	333	233
	Total	5.619	5.477	5.336

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016



Gambar 32. Tindak Pidana Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Tabel 66

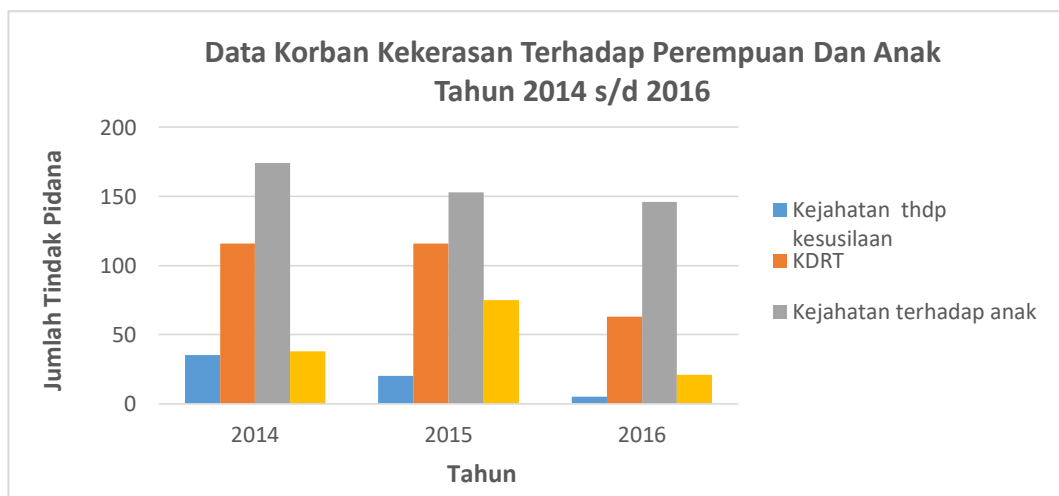
Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, tahun 2014-2016

No	Jenis Tindak Pidana	2014	2015	2016
1	Kejahatan terhadap kesusilaan	35	20	5
2	KDRT	116	116	63
3	Kejahatan terhadap anak	174	153	146
4	Penganiayaan	38	75	21
	Total	363	364	235

Sumber : Data Kepolisian Daerah Gorontalo, 2016

Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah dalam menekan angka kekerasan termasuk kejahatan terhadap anak dan perempuan selain berbagai program/kegiatan yang telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah

diantaranya yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Mengaktifkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); Bersinergi dengan berbagai instansi vertikal termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Gorontalo dan dengan jaringan masyarakat yang peduli terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun diantara berbagai upaya tersebut masih terdapat berbagai kendala atau tantangan yang dihadapi yaitu : (1). Paradigma masyarakat tentang kekerasan merupakan aib yang tidak perlu dilaporkan, (2). Masih kurangnya koordinasi antar lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menyelesaikan kasus, (3). Minimnya sarana prasarana pemulihan korban paska kejadian, (4). Informasi tentang layanan perlindungan yang belum terdistribusi secara merata di masyarakat.



Gambar 33. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua. Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Melalui program Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, upaya untuk mendistribusikan keadilan bagi semua dijalankan. Selain itu, program tersebut ditunjang dengan berbagai program/kegiatan yang dijalankan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Gorontalo melalui Layanan Fasilitasi Bantuan Hukum. Pada tahun 2016,

sudah sekitar 106 kasus yang dilayani khusus bantuan hukum. Untuk memudahkan masyarakat awam yang bermasalah dengan hukum Kemenkumham menerapkan layanan bantuan hukum Cuma-Cuma dan sangat responsif. Permintaan bantuan hukum disampaikan secara resmi oleh Kepala Rutan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akses keadilan untuk semua yaitu : (1) Masih sedikit Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi sehingga sulit untuk mendistribusikan anggaran Bantuan Hukum Cuma-Cuma, (2) Minimnya informasi yang tersebar ke masyarakat terkait dengan pelayanan fasilitas bantuan hukum, (3). Anggaran bantuan hukum yang masih terbatas.

Tabel 67
Eksistensi Perempuan Dalam Lembaga
DPRD Prov dan Kab/Kota Periode 2014-2019

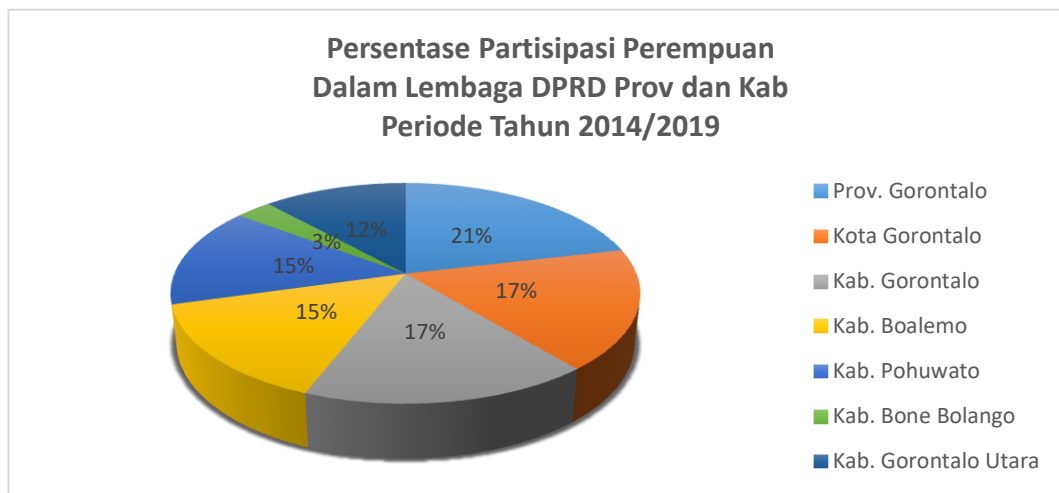
No.	Prov, Kab/Kota	Jumlah Perempuan	Jumlah Anggota Dewan	Persentase Partisipasi Perempuan (%)
1.	Prov. Gorontalo	45	13	29
2.	Kota Gorontalo	25	6	24
3.	Gorontalo	35	8	23
4.	Boalemo	25	5	20
5.	Pohuwato	25	5	20
6.	Bone Bolango	23	1	4
7.	Gorontalo Utara	25	4	16
	Total	203	42	19,4

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo, 2016

Selain keadilan dalam perspektif HAM, keadilan juga dapat dilihat dalam dimensi pengambilan keputusan yang responsive dan meliputi seluruh entitas termasuk perempuan. Menurut jenis kelamin penduduk di Provinsi Gorontalo terdiri dari laki-laki berjumlah 576.482 orang sedangkan perempuan berjumlah 574.283 orang dengan rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 100,38 atau masih terbelah berimbang. Namun dari segi kualitas kehidupan masih

terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan.

Hal ini berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terindikasi dalam persoalan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotipe, kekerasan, diskriminasi, dan kemiskinan. Selain itu dampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan bias gender. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan berimbas pada kesejahteraan dan perlindungan anak yang masih perlu mendapat perhatian. Sementara partisipasi politik perempuan di Provinsi Gorontalo berjumlah 42 orang atau 19,4% dari jumlah anggota Dewan secara keseluruhan



di Provinsi Gorontalo.

Gambar 34. Partisipasi Perempuan dalam Lembaga DPRD Provinsi dan Kabupaten

Membangun Kelembagaan yang Tangguh. Berdasarkan RAN TPB/SDG's, secara umum upaya untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat antara lain tergambar oleh capaian-capaian yang terjadi pada : Perilaku anti korupsi di Indonesia; Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian (K)/Lembaga (L)/Pemerintah Daerah; Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; Pelaksanaan undang-undang pelayanan publik; Kondisi demokrasi di Indonesia. Namun berdasarkan kondisi di daerah, ada beberapa indikator yang ukurannya ditetapkan secara Nasional atau tersedia dalam skala Provinsi namun terbatas untuk beberapa Provinsi saja.

Tabel 68
Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	BB	BB	BB

Dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi 2017-2022 ditetapkan Tujuan dan Sasaran, yang dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan, Program serta Indikasi Kegiatan yang masing-masing memiliki target kinerja yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo selama periode 2017-2022. Untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasara RPJMD Tahun 2017-2022, Indikator RPJMD yang akan didukung oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo dapat dilihat Tabel 68 di atas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi terus mengalami perbaikan dan perubahan baik dari Aparatur, Kelembagaan dan Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pelaksanaan

tahun 2016, Provinsi Gorontalo memperoleh Predikat CC, dengan peringkat 25 dari 34 Provinsi se-Indonesia. Evaluasi dilakukan terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik.

Disamping itu, penilaian terhadap indeks tata kelola pemerintahan yang baik, Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke-22 dari provinsi se-Indonesia dengan capaian 5,62 persen. Penilaian terhadap indeks tata kelola pemerintahan yang baik mencakup empat arena tata kelola pemerintahan, yakni pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa :

- Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ;
- Pengungkapan dalam Laporan Keuangan telah cukup memadai untuk pengambilan keputusan para pemakainya ;
- Penyajian Laporan Keuangan bebas dari salah saji material akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku ;
- Sistem Pengendalian Intern telah cukup memadai.

Sesuai hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah berdasarkan 4 kriteria penilaian tersebut, maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dicapai melalui peningkatan kualitas dalam hal perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah, serta perbaikan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Indikator sasaran prioritas terdiri dari reformasi birokrasi terdiri dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), persentase Kabupaten/Kota yang memiliki status WTP dan Persentase Kab/Kota yang Akuntabilitas Kinerjanya (A/B/C/D). Hasil audit Akuntan dengan opini WTP adalah "Pendapat Akuntan Eksternal atas hasil pemeriksaan akuntan eksteral dengan nilai opini terbaik terhadap suatu entitas atas asersi (pernyataan) manajemen atas laporan keuangan dalam suatu periode akuntansi yang disusun berdasarkan Standart Akuntansi yang berterima umum, dan pemeriksaan telah dilakukukan melalui Norma pemeriksaan sebagai Standart Profesional Pemeriksaan Akuntan. Opini General audit yang diterbitkan akuntan bukan pemeriksaan dengan tujuan khusus, akan tetapi pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini (pendapat) wajar/layak atas laporan Keuangan Historis. Pada tahun 2015 laporan keuangan Provinsi Gorontalo mendapat kinerja laporan keuangan WTP. Pencapaian ini tidak lepas dari implementasi prioritas dimensi pembangunan Revolusi Mental di Provinsi Gorontalo.

Sasaran dari prioritas dimensi pembangunan Revolusi Mental yang berhubungan dengan pencapaian WTP ini adalah peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan serta perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan. Penerapan program nasional ini selanjutnya oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam pencapaian visi dan misi, yaitu: meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pencapaian sasaran ini memberikkan hasil pencapaian laporan keuangan Provinsi Gorontalo adalah WTP.

Pencapaian sasaran visi dan misi Provinsi Gorontalo yang bersinergi dengan prioritas dimensi pembangunan nasional Revolusi Mental dijabarkan pula dalam pencapaian visi dan misi kabupaten/kota. Sinergitas program dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota memberikan hasil yang maksimal, dimana pada tahun 2015,

enam (6) kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Gorontalo beroleh opini WTP atau 100 persen.



TUJUAN 17

Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah sebanyak 19 target yang pada umumnya berupa target ditingkat nasional dan global. Dari beberapa target tersebut, target yang selaras dengan RPJMD Provinsi Gorontalo selama tahun 2017-2022 antara lain (i) Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya ; (ii) Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber ; (iii) Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi.

Mobilisasi Sumberdaya Domestik. Indikator yang digunakan dalam melihat kemampuan sumber daya domestik adalah jumlah pendapatan yang diperoleh daerah, realisasi pajak dan retribusi daerah serta tingkat kemandirian fiskal daerah. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Gorontalo selama tahun 2013-2016 dapat dilihat dalam Tabel 69.

Pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo selama periode 2013-2017 senantiasa mengalami peningkatan. Dari sisi pertumbuhan, pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo mengalami perlambatan pada tahun-tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan PAD pada tahun 2014 sebesar 31,36% disbanding PAD pada tahun 2013. Namun pada tahun 2015, PAD Gorontalo hanya mengalami peningkatan sebesar 2,71% dan pada tahun 2016 hanya meningkat sebesar 7,28%.

Dilihat dari komponennya, penyumbang terbesar untuk PAD Gorontalo adalah pajak daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 90,42%. Untuk rasio kemandirian fiskal, komponen APBD Gorontalo masih sangat didominasi oleh

transfer pusat. Komposisi dana transfer dalam APBD Gorontalo pada tahun 2013 mencapai 68,6% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 77,84%.

Tabel 69
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Juta Rupiah)			
	1	2	3	4
	2013	2014	2015	2016
PENDAPATAN DAERAH	1,052,555	1,209,049	1,389,324	1,583,715
Pendapatan Asli Daerah	214,614	281,920	289,557	310,630
- Pajak Daerah	200,883	247,137	260,996	280,594
- Retribusi Daerah	571	1,967	4,072	6,081
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1,946	3,181	2,101
- Lain-lain PAD yang Sah	13,159	30,869	21,307	21,853
Dana Perimbangan	722,098	800,313	934,046	1,232,732
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26,800	23,660	20,766	27,939
- Dana Alokasi Umum	652,284	734,279	845,395	884,797
- Dana Alokasi Khusus	43,013	42,374	67,883	
- Dana Alokasi Khusus Fisik				95,304
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				224,690
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	115,842	126,815	165,720	40,352
- Pendapatan Hibah	453	513	652	548
- Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	115,389	126,301	165,068	39,804
- Pendapatan Lainnya				

Teknologi Informasi. Terkait pembangunan Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2012-2016 yang telah dicapai yaitu:

1. Terbangunnya infrastruktur jaringan intranet dengan jumlah 60 titik sambungan jaringan yang terdiri atas 55 titik sambungan jaringan OPD dan UPTD, 4 titik sambungan tempat umum dan 1 titik sambungan untuk asosiasi pengadaan barang dan jasa.
2. Kapasitas koneksi internet dengan kapasitas 12 Mbps untuk melayani 60 titik sambungan

3. Website dan portal Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat diakses melalui www.gorontaloprov.go.id dan www.gorontalo.go.id
4. Webmail untuk seluruh OPD, Kecamatan dan Desa dengan jumlah 3274 pengguna yang dapat diakses melalui <http://mail.gorontaloprov.go.id>
5. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan sistem informasi perpustakaan digital dengan jumlah 7851 database dan dokumen digital
6. Pengembangan Sistem Informasi Hukum dan Perundang-undangan dengan jumlah 19.793 database hukum dan perundang-undangan dalam bentuk dokumen digital.
7. Tersedianya 72 Pusat Layanan Internet Kecamatan dan 182 Desa Dering untuk layanan komunikasi.

Ketersediaan Data. Disamping itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berkualitas, efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan inovasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi maupun pengendalian dan evaluasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diterapkan beberapa layanan komunikasi dan informasi berbasis elektronik. Beberapa aplikasi berbasis elektronik yang diterapkan Pemerintah Provinsi, yakni antara lain :

1. www.gorontaloprov.go.id : merupakan website resmi pemerintah provinsi sebagai layanan informasi berbasis online;
2. LPSE : Layanan Pengadaan secara Elektronik;
3. E-Monev : aplikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintahan;
4. E-Renggar : Aplikasi untuk perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin konsistensi dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
5. E-Musrenbang : Aplikasi untuk mengefektifkan penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
6. Simda : Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
7. Simpede : Sistem Informasi Perjalanan Dinas;

8. E-data yang diintegrasikan dengan website bappeda: bappeda.gorontaloprov.go.id : merupakan aplikasi data dan informasi pembangunan daerah, serta media informasi kegiatan pemerintahan;
9. E-RTS : aplikasi Rumah Tangga Sasaran yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT), untuk fokus program penanggulangan kemiskinan.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, pada masing-masing masing-masing Tujuan merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Gorontalo 5 (lima

) tahun kedepan merupakan bagian kebijakanyang dirumuskan dengan mengacupada RPJMD 2017-2022. RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo tahun 2005-2025, dan merupakan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Selain itu juga diuraikan kebijakan berdasarkan program, kegiatan, dan indikator kegiatan untuk masing-masing program yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat daerah Provinsi Gorontalo telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang disesuaikan dengan Target Pencapaian TPB/SDGs berdasarkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan TPB/SDGs. Kebijakan akan diuraikan berdasarkan tujuan TPB/SDGs sebagai berikut:



TUJUAN 1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, Provinsi Gorontalo menetapkan 5 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari 1) Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi; 2) Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan; 3) menjamin masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro; 4) Membangun ketahanan masyarakat miskin dan kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana; 5) Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 1. Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan pada 8 (delapan) kebijakan utama, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia;
2. Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan SJSN;

3. Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan layanan kesehatan;
4. Pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan gizi serta
5. Penguatan institusi implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu;
6. Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
7. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan;
8. Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber pembiayaan, penerapan teknologi, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis), pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (*off-farm*) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

Program Tujuan 1. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Program Kesejahteraan Rakyat, kegiatan a) Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan, Sosial dan Ketahanan Keluarga, b) Pembinaan Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

2. Program Penanganan Fakir Miskin, kegiatan a) Penanganan Fakir Miskin Perdesaaan, b) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, c) Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir.
3. Program Pemberdayaan Sosial, kegiatan a) Pemberdayaan sosial fakir miskin, b) Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), c) Pemberdayaan melalui kemitraan sosial, d) Pembinaan Organisasi Kesejahteraan Sosial.
4. Program 1: ... dengan kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan PMKS
5. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, kegiatan a) Jamkesta, b) Pelayanan pasien miskin/tidak mampu.
6. Program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja, kegiatan a) Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial
7. Program Rehabilitasi sosial, kegiatan a) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
8. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, kegiatan a) Perlindungan jaminan sosial keluarga dan pendataan PMKS
9. Program Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, kegiatan: a) Pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, b. Pelayanan pasien miskin/tidak mampu
10. Program Peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan, kegiatan a) Ketersediaan akses dan mutu pelayanan kesehatan
11. Program Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, kegiatan a) Pendampingan Ibu hamil oleh Mitra dalam akselerasi penurunan AKI/AKB, b) Penanganan kegawat daruratan Ibu & Bayi
12. Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Jiwa, kegiatan a) Survelians PD3I dan monev pelaksanaan program imunisasi, b) Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)

13. Program Peningkatan Layanan KB, kegiatan a) Peningkatan pengguna alat kontrasepsi, b) Pelaksanaan grand design kependudukan dalam pencapaian cakupan KB aktif, c) Orientasi KB Pasca Persalinan, d) Orientasi fasilitator kesehatan reproduksi remaja.
14. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan a) Pengawasan dan penyehatan lingkungan
15. Program Pengembangan kinerja air minum dan sanitasi, kegiatan a) Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi.
16. Program Peningkatan Kawasan Permukiman, kegiatan Pembangunan Kawasan Permukiman.
17. Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, kegiatan a) Pembangunan unit sekolah/gedung baru SMA dan SMK, b) Revitalisasi/penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SLB dan SMK, c) Penyediaan meubelair SMA/SLB dan SMK, d) Bantun operasional pendidikan SMA dan SMK, e) Penyediaan media pembelajaran/alat praktek dan alat peraga siswa, f) Boarding school SMA/SLB, dan g) Pemanfaatan dana alokasi khusus
18. Program Pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk, kegiatan a) Fasilitasi pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan pencapil, b) Bimbingan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
19. Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, b) Pengembangan ketenagalistrikan daerah
20. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, kegiatan a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam,
21. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Kegiatan a) Sosialisasi PRB, b) Sosialisasi forum PRB di Kab/Kota, c) Pengadaan SARPRAS mitigasi dan peringatan dini, dan d) Fasilitasi Desa Tanggung Bencana (Destana).
22. Program Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, kegiatan a) Perlindungan sosial korban bencana sosial

23. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, kegiatan a) Identifikasi kerawanan bencana, b) Pemetaan desa/kel rawan bencana
24. Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, kegiatan a) Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Bencana
25. Program Program Kesejahteraan Rakyat, kegiatan a) Pembinaan penerima manfaat bantuan sosial
26. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, kegiatan a) Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan PMKS
27. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, kegiatan a) Jamkesta
28. Program pendidikan untuk rakyat, kegiatan a) Bantuan operasional Pendidikan SMA, b) Bantuan operasional Pendidikan SMK, c) Pemberian bantuan studi bagi mahasiswa miskin/berprestasi, dan d) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP.

Dalam bidang pendidikan, program yang akan dilakukan mencakup: (1) pendidikan untuk rakyat; (2) wajar 9 tahun pendidikan dasar; (3) manajemen pelayanan pendidikan; dan (4) pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan dukungan bagi masyarakat miskin untuk dapat hidup layak dan berkelanjutan akan dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan yang mencakup: (1) pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin; (2) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta kawasan pedesaan; (3) pengembangan koperasi dan UKM; (4) pengembangan usaha kecil dan menengah; (5) ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; (6) pengembangan kinerja air minum dan sanitasi; (7) peningkatan kawasan pemukiman; (8) penyediaan rumah hunian layak bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan provinsi; (9) pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; (10) rehabilitasi dan rekonstruksi; (11) penataan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil; dan (12) pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan (penyediaan listrik RT tidak mampu).

Target Indikator Tujuan 1. Target pencapaian indikator Tujuan 1 dapat dilihat pada Tabel 70. Beberapa indikator TPB/SDGs Tujuan 1 tidak tercantum dalam tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 1 dalam Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel 70. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	17.72	PM	PM	PM	PM	PM
		RPJMD	%	17.63	16.59	16.09	15.61	15.14	14.69
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Renstra Kemenkes dan Renstra Dinkes	%	80.25	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	12,208	22,049	24,254	26,680	29,348	32,282

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial dan P3A	Jiwa	215	237	350	365	390	310
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial dan P3A	RTM	30,495	63,407	80,000	PM	PM	PM
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS	%	79.96	PM	PM	PM	PM	PM
		SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	172.22	174.9	177	180	185	190
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Renstra Kemenkes dan Renstra Dinkes	%	84.34	< 95	< 95	< 95	< 95	< 95
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	207.89	155.9	158.9	161.9	165	168

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
		<u>2016:</u> Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 <u>2018-2019:</u> Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	68.20	61.1	61.3	PM	PM	PM
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS	%	39.98	PM	PM	PM	PM	PM
		RPJMD	%	71.59	75.21	77.09	79.02	81.00	83.02
		SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	130.40	147.2	152.7	160.0	167.0	175.0

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	BPS	%	59.19	PM	PM	PM	PM	PM
		RPJMD	%	59.85	62.88	64.45	66.06	67.71	69.41
		SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	129.46	137.7	143.0	148.3	154.7	160
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	BPS	%	20.14*	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	BPS	%	97.23	PM	PM	PM	PM	PM
	Kab. Pohuwato	RPJMD Kab. Pohuwato	%	97.00	97.10	97.15	97.20	97.25	PM
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab. Boalemo	%	92.25	93.00	94.03	95.00	96.00	98.00
	Kab. Bone Bolango	RPJMD Kab. Bone Bolango	%	88.68	91.57	93.01	94.46	PM	PM
	Kab. Gorontalo Utara	RPJMD Kab. Gorontalo Utara	%	100	100	PM	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
	Kab. Gorontalo	RPJMD Kab. Gorontalo	%	99.62	99.72	99.77	99.82	99.82	PM
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	95.25	98.00	99.00	PM	PM	PM
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	BPS	%	68.89	PM	PM	PM	PM	PM
	Kab. Pohuwato	RPJMD Kab. Pohuwato	%	78.10	78.82	79.67	80.19	80.71	PM
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab. Boalemo	%	77.23	79.00	81.00	81.92	82.32	85.00
	Kab. Bone Bolango	RPJMD Kab. Bone Bolango	%	54.61	59.20	61.49	63.79	PM	PM
	Kab. Gorontalo Utara	RPJMD Kab. Gorontalo Utara	%	80.62	83.26	PM	PM	PM	PM
	Kab. Gorontalo	RPJMD Kab. Gorontalo	%	74.55	78.27	80.13	81.99	81.99	PM
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	87.43	93.00	94.00	PM	PM	PM
1.4.1.(i)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat.	BPS	%	143.63	PM	PM	PM	PM	PM
		RPJMD	%	76.13	76.50	76.88	77.25	77.63	78.00

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	BPS	%	86.33	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Proposal Pemohon	Unit (Listrik PLN)	34.036	235	PM	PM	PM	PM
		Proposal Pemohon	Unit (Listrik Bukan PLN)	88	100	PM	PM	PM	PM
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.								
	Kab. Pohuwato	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Orang	5500	2700	2500	2300	2200	2100
	Kab. Boalemo			7500	5700	4500	3300	4200	3100
	Kab. Bone Bolango			2500	1700	1500	1300	1200	1100
	Kab. Gorontalo Utara			3500	2700	2500	2300	2200	2100
	Kab. Gorontalo			3500	2700	2500	2300	2200	2100
	Kota Gorontalo			7000	5700	4500	3300	2200	1100
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.								
	Kab. Pohuwato	Badan	Desa	44	20	10	10	10	10

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					
				2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.									
	Kab. Pohuwato	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Kec	4	3	2	2	2	1	
	Kab. Boalemo			3	2	2	2	2	2	
	Kab. Bone Bolango			1	1	1	1	1	1	
	Kab. Gorontalo Utara			1	1	1	1	1	1	
	Kab. Gorontalo			1	1	1	1	1	1	
	Kota Gorontalo			1	1	1	1	1	1	
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.									
	Kab. Pohuwato	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Kec	1	1	1	1	1	1	
	Kab. Boalemo			1	1	1	1	1	1	
	Kab. Bone Bolango			1	1	1	1	1	1	
	Kab. Gorontalo Utara			1	1	1	1	1	1	
	Kab. Gorontalo			1	1	1	1	1	1	
	Kota Gorontalo			1	1	1	1	1	1	
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.									
	Kab. Pohuwato	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Milyar Rupiah	15	15	15	15	15	15	
	Kab. Boalemo			25	15	13	12	10	9	
	Kab. Bone Bolango			15	15	15	15	15	15	
	Kab. Gorontalo Utara			15	15	15	15	15	15	

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
	Kab. Gorontalo	(BPBD)		15	15	15	15	15	15
	Kota Gorontalo	Provinsi		15	15	15	15	15	15
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.								
	Kab. Pohuwato	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi	Dokumen	1 (Belum diperbaharui)	1	1	1	1	1
	Kab. Boalemo				1	1	1	1	1
	Kab. Bone Bolango				1	1	1	1	1
	Kab. Gorontalo Utara				1	1	1	1	1
	Kab. Gorontalo				1	1	1	1	1
	Kota Gorontalo				1	1	1	1	1
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	-	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM	PM
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	RPJMD	Rupiah, Fungsi Pendidikan	86,535 milyar	101,498,737,689	111,477,373,151	124,074,639,393	138,819,466,246	157,135,280,763
			Rupiah, Fungsi Kesehatan	67,425 milyar	106,119,409,185	118,239,704,258	132,481,441,632	149,051,552,570	168,628,616,669

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
			Rupiah, Fungsi Perlindungan Sosial	6,992 milyar	50,015, 478,277	56,226, 004,194	63,029, 301,720	70,977, 553,278	81,179, 986,333



TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Provinsi Gorontalo menetapkan 4 target yang diukur melalui 13 indikator dalam mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030. Target-target tersebut terdiri dari 1) menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, 2) menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian, 3) mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional, dan 4) Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 2. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Tanpa Kelaparan, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan pada 6 (enam) kebijakan utama, yaitu:

1. Kebijakan Peningkatan produktivitas melalui:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan;
 - b. Revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi produksi tanaman pangan;
 - c. Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik,
 - d. Mengembangkan produksi pertanian melalui pola tumpang-sari antara tanaman kehutanan sebagai pelindung dan tanaman pertanian sebagai tanaman utama di lahan-lahan pertanian.
 - e. Peningkatan teknologi dan pola penanganan pasca panen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil termasuk pembangunan penggilingan padi
 - f. Mendorong pengembangan bibit lokal yang bernilai tinggi (padi dan jagung) melalui pengembangan Desa Mandiri Benih.
2. Kebijakan Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya melalui:
 - a. Penambahan populasi bibit sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya;
 - b. Pengembangan kawasan peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat;
 - c. Peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan untuk pengendalian penyakit terutama Zoonosis.
3. Kebijakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan, melalui:
 - a. Peningkatan produktifitas dan pengembangan perikanan tangkap;
 - b. Peningkatan produktifitas dan pengembangan kawasan sentra produksi garam
 - c. Pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasi-lokasi potensial;

- d. Pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan;
 - e. Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis;
 - f. Penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan,
 - g. Penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting.
4. Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui:
 - a. Pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan;
 - b. Pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan;
 - c. Mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan
 - d. Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan, petambak garam, pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.
 5. Kebijakan Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi:
 - a. Diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal;
 - b. Pendidikan gizi seimbang untuk keluarga;
 - c. Peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur);
 - d. Penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di masyarakat,
 - e. Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.
 6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan.

Program Tujuan 2. Sejumlah program peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang erat kaitannya dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs Tujuan 2 tertuang dalam Rencana Startegis Dinas/Lembaga, diantaranya: (1) peningkatan produksi pertanian/populasi ternak berkelanjutan; (2) penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH); (3) pengembangan

distribusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta penguatan cadangan pangan; (4) pengembangan diversifikasi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; (5) ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; dan (6) peningkatan nilai tambah hasil pertanian.

Sementara itu, program yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan gizi masyarakat yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 diantaranya adalah: (1) pelayanan kesehatan keluarga dan gizi bagi ibu hamil, bayi dan balita termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan, pemberian suplemen, serta peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan, gizi dan pola asuh; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberian imunisasi; (3) pembinaan keluarga balita dan anak guna meningkatkan pemahaman orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang balita dan anak; (4) peningkatan mutu Fasyankes untuk memfasilitasi penguatan program pelayanan kesehatan primer; (5) jaminan sosial bagi masyarakat miskin untuk menjamin akses terhadap pangan dan layanan sosial dasar.

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 dapat dilihat pada Tabel 71. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam dokumen Matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo Pilar Pembangunan Sosial. Adapun program dan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 2 dalam dokumen Matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel 71. Target Pencapaian Indikator Tujuan 2Tanpa Kelaparan

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Pangan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	15.6	14.75	14.33	13.90	13.48	13.05
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pangan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Pangan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	21.10	20.07	19.55	19.03	18.52	18.00
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	14.4	12.93	12.20	11.47	10.73	10.00
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	%	12.10	11.42	11.08	10.73	10.39	10.05
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	%	3.6	3.40	3.30	3.20	3.10	3.00
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	%	40.3	50.20	55.15	60.10	65.05	70.00
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	RPJMD	Skor	76.3	79.5	81.2	82.8	84.4	86
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.								

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS	Rupiah/ tenaga kerja	70.466	PM	PM	PM	PM	PM
2.5	Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.								
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Renstra Dinas Pertanian Provinsi	Varietas / Bibit	4 (3 tanaman & 1 hewan)	1	1	1	1	1
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	PKH Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI	Ternak	3 (Tidak berisiko : Ayam, Kambing, Sapi)	3	3	3	3	3



TUJUAN 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur melalui 39 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 3. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Kehidupan Sehat dan Sejahtera, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan pada 5 (lima) kebijakan utama, yaitu:

- a. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui:
 1. Peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan lansia,
 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit,
 3. Pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, yang didukung dengan perlindungan pelayanan kesehatan universal melalui Jamkesta,
 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan;
 5. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan memberikan informasi

secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan, peningkatan pelayanan dan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping.

Adapun kebijakan RPJMD dalam kaitannya dengan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi diarahkan pada: (1) peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out; (2) peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB; (3) pemberian pelayanan KB lanjutan; (4) peningkatan pelayanan dan penanganan KB pasca persalinan atau pasca keguguran; dan (5) penanganan komplikasi dan efek samping dari penggunaan KB.

Program Tujuan 3. Memperhatikan tujuan, target dan arah kebijakan TPB/SDGs Tujuan 3, maka sejumlah program dan kegiatan akan diimplementasikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Program-program tersebut mencakup: (1) kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; (2) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; (3) pencegahan, pengendalian penyakit dan masalah kesehatan jiwa; (4) peningkatan mutu Fansyankes; (5) kemitraan dan peningkatan pelayanan medik RS; (6) jaminan pemeliharaan kesehatan; (7) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan; (7) peningkatan layanan KB, kependudukan dan pembangunan keluarga; (8) sosialisasi pencegahan narkoba dan KKN bagi peserta didik; dan (9) rehabilitasi sosial.

Target Indikator Tujuan 3. Target pencapaian indikator Tujuan 3 dapat dilihat pada Tabel 72. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam dokumen Matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo Pilar Pembangunan Sosial. Adapun program dan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 3 dalam dokumen Matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel 72. Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Kematian per 100.000 KH	249.1	223.5	210.7	197.9	185.1	172.3
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	96.8	97.3	97.5	97.7	98.0	98.2
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS	%	79.96	PM	PM	PM	PM	PM
		SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	172.22	174.9	177	180	185	190
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Ribu Jiwa	12.5	12.0	11.8	11.5	11.3	11.0

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Ribu Jiwa	9.5	9.0	8.8	8.5	8.3	8.0
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Ribu Jiwa	11.2	10.8	10.6	10.4	10.2	10.0
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	94	96	97	98	99	100
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	Insiden per 100.000 penduduk	210	206.7	205	203.3	201.7	200
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	API per 1000 orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Jumlah Kab/Kota	6	6	6	6	6	6
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Jiwa	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Provinsi	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Kab/Kota	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	7.2	4.8	3.6	2.4	1.2	PM
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	31.7	21.1	15.9	10.6	5.3	PM
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	%	21.8	14.5	10.9	7.3	3.6	PM
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Kepolisian Daerah Gorontalo	Kematian per 100.000 penduduk	10	PM	PM	PM	PM	PM
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	SPM Dinas Kesehatan Provinsi	Kab/Kota	6	6	6	6	6	6
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	BNNP Provinsi Gorontalo	Orang	115	90	132	145	165	200

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	BNNP Provinsi Gorontalo	Orang	80	80a	120	130	145	160
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Dinas Sosial dan P3A	Jiwa	26	26	30	30	35	35
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	BNNP Provinsi Gorontalo	Lembaga	2	4	5	7	10	12
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNNP Provinsi Gorontalo	%	2.15	PM	PM	PM	PM	PM
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	BNNP Provinsi Gorontalo	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN (Dinas Kesehatan)	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	%	207.89	155.9	158.9	161.9	165	168

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
	berstatus kawin.	<u>2016:</u> Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 <u>2018-2019:</u> Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	68.2	61.1	61.3	PM	PM	PM
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	BKKBN (Dinas Kesehatan)	%	50.5	53.7	55.3	56.8	58.4	60
		<u>2016:</u> Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 <u>2018-2019:</u> Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	25.5	22.3	23.5	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Kelahiran per 1.000 perempuan umur 14-19 tahun	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	RPJMD	Jumlah anak per WUS 15-49 thn	2.6	2.56	2.5	2.48	2.45	2.4
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	RPJMD	Juta jiwa	219,249	205,584	205,584	205,584	205,584	205,584
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Renstra Kemenkes dan Renstra Dinas Kesehatan	%	80.25	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
		Provinsi							
3.9	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	BPS	%	27.26	PM	PM	PM	PM	PM
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	%	75	100	100	100	100	PM
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dokter umum per 1.000 penduduk	0.18	PM	PM	PM	PM	PM
		Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dokter spesialis per 1.000 penduduk	0.11	PM	PM	PM	PM	PM
		Dinas Kesehatan Kab/Kota	Bidan per 1.000 penduduk	0.77	PM	PM	PM	PM	PM



TUJUAN 4. Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 18 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 4. Sejalan dengan pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, kebijakan pencapaian TPB/SDGs yang berkaitan dengan pendidikan diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang bermutu; meningkatkan kualitas proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan; dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan kebudayaan dan olahraga.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan dalam RPJMD yang selaras dengan Tujuan 4 TPB/SDGs diantaranya:

1. Meningkatkan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas, peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.
2. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah

- (pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru); Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa; Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru, dan pemerataan distribusi guru.
 4. Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya budaya.
 5. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; mengembangkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu.

Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendorong pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs dibagi berdasarkan lingkup kewenangan pemerintah di Provinsi Gorontalo yaitu:

Provinsi, arah kebijakan yang akan dilakukan mencakup: (1) pendidikan menengah dan pendidikan khusus; (2) pembinaan guru dan tenaga kependidikan; (3) pendidikan untuk rakyat; dan (4) pengembangan perpustakaan dan minat baca.

Kabupaten/Kota, arah kebijakan yang akan dilakukan mencakup: (1) pendidikan anak usia dini (PAUD); (2) Wajar 9 tahun pendidikan dasar; (3) pendidikan non-formal; (4) manajemen pelayanan pendidikan; (5) pengembangan PAUD dan pendidikan non-formal yang berkualitas; dan (6) peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 dapat dilihat pada Tabel 73. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam dokumen Matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo Pilar Pembangunan Sosial. Adapun program dan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 4 dalam dokumen Matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel 73. Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.								
	Kab. Pohuwato	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	67	55	63	PM	PM	PM
	Kab. Boalemo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	59.7	64.7	69.7	74.7	79.7	84.7
	Kab. Bone Bolango	Profil Pendidikan Kab. Bone Bolango	%	85.71	n.a	83.44	85.38	87.32	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
	Kab. Gorontalo Utara	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	91.37	91.37	93.53	95.68	97.12	100
	Kab. Gorontalo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	53.81	56.19	58.57	60.95	PM
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	PM	50.86	95	PM	PM	PM
	MI	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	80.85	97.02	113.19	129.36	145.53
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.								
	Kab. Pohuwato	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	15	47	PM	PM	PM
	Kab. Boalemo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	58.73	63.73	68.73	73.73	78.73	83.73
	Kab. Bone Bolango	Profil Pendidikan Kab. Bone Bolango	%	71.43	n.a	76.64	80.50	86.37	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
	Kab. Gorontalo Utara	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	88.89	88.89	92.59	100	100	100
	Kab. Gorontalo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	61.24	68.99	76.74	84.5	PM
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	PM	47.62	95	PM	PM	PM
	MTs	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	85.51	102.61 2	119.71 4	136.81 6	153.91 8
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	9.50	27.74	25.22	22.70	20.18	17.66
	MA	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	85.37	102.44 4	119.51 8	136.59 2	153.66 6
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS	%	108.34	PM	PM	PM	PM	PM
	Kab. Pohuwato	RPJMD Kab. Pohuwato	%	105.1	104.06	103.45	103.21	103.07	PM
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab. Boalemo	%	96.04	96.04	97.01	98.98	99	100

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
	Kab. Bone Bolango	RPJMD Kab. Bone Bolango	%	105.09	110.38	113.03	115.67	PM	PM
	Kab. Gorontalo Utara	RPJMD Kab. Gorontalo Utara	%	113.42	115.17	PM	PM	PM	PM
	Kab. Gorontalo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	116.44	116.47	116.51	116.53	PM
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	114.34	100.00	120.00	PM	PM	PM
	MI	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	8.55	10.26	11.97	13.68	15.39
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	BPS	%	83.71	PM	PM	PM	PM	PM
	Kab. Pohuwato	RPJMD Kab. Pohuwato	%	102.18	101.69	101.10	100.50	100.02	PM
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab. Boalemo	%	97.73	98.08	98.95	99	100	100
	Kab. Bone Bolango	RPJMD Kab. Bone Bolango	%	83.08	86.34	87.97	89.61	PM	PM
	Kab. Gorontalo Utara	RPJMD Kab. Gorontalo	%	101.24	103.14	PM	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
		Utara							
	Kab. Gorontalo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	107.24	107.49	107.84	107.98	PM
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	115.19	100.00	120.00	PM	PM	PM
	MTs	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	19.31	23.172	27.034	30.896	34.758
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS	%	88.67	PM	PM	PM	PM	PM
		RPJMD Provinsi Gorontalo	%	93.07 (2017)	93.83	94.12	94.42	94.71	95.00
	MA	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	8.81	10.572	12.334	14.096	15.858
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	Tahun	7.12	7.2	7.35	7.5	7.7	7.9
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					
				2016	2018	2019	2020	2021	2022	
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).									
	Kab. Pohuwato	Renstra Dikpora Kab. Pohuwato	%	55.56	82.92	83.25	83.58	83.91	PM	
	Kab. Boalemo	RPJMD Kab. Boalemo	%	92.81	92.91	93.1	94	94.6	95	
	Kab. Bone Bolango	Renstra Dikpora Kab. Bone Bolango	%	95	97	98	100	PM	PM	
	Kab. Gorontalo Utara	-	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
	Kab. Gorontalo	RPJMD Kab. Gorontalo	%	62.5	70.61	74.65	78.7	82.74	PM	
	Kota Gorontalo	RPJMD Kota Gorontalo	%	65.19	75.00	80.00	PM	PM	PM	
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.									
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS	%	88.67	PM	PM	PM	PM	PM	
		RPJMD	%	93.07 (2017)	93.83	94.12	94.42	94.71	95.00	
	MA	Kanwil Kemenag	%	PM	8.81	10.572	12.334	14.096	15.858	

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					
				2016	2018	2019	2020	2021	2022	
		Provinsi Gorontalo								
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS	%	64.41	PM	PM	PM	PM	PM	PM
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.									
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat.	BPS	%	100.94	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat.	BPS	%	114.00	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat.	BPS	%	143.63	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio APK perempuan/laki-laki di PT.	BPS	%	136.57	PM	PM	PM	PM	PM
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	98.44	PM	PM	PM	PM	PM
		RPJMD	% (persentase keseluruhan)	99.81	99.86	99.90	99.94	99.98	100
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	BPS	% (umur 15-24 tahun)	99.61	PM	PM	PM	PM	PM
		BPS	% (umur 15-59 tahun)	99.43	PM	PM	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
		RPJMD	% (persentase keseluruhan)	99.81	99.86	99.90	99.94	99.98	100
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4.b	Pada tahun 2021, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.								
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Bidang GTK (Guru dan Tenaga Pendidikan) Dikbudpora Provinsi	Orang	855 (2017)	PM	PM	PM	PM	PM
		Bidang GTK (Guru dan Tenaga Pendidikan) Dikbudpora Provinsi	Orang	640 (2017)	PM	PM	PM	PM	PM



TUJUAN 5. Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 5. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Kesetaraan Gender, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan pada 5 (lima) kebijakan utama, yaitu:

1. Kebijakan Peningkatan Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan, Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
 - c. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, penegakan dan bantuan hukum.
2. Kebijakan Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, melalui:

- a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di daerah;
 - b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; Peningkatan partisipasi dan kesempatan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat, dan
 - c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
3. Kebijakan Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, melalui:
- a. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota tentang penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk data terpilah;
 - b. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - c. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
 - d. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta
 - e. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.
4. Peningkatan percepatan pencapaian Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan fokus penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender

(PUG), regulasi, dan pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum politik serta ekonomi,

5. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak dan Peningkatan pemenuhan hak perempuan dengan fokus pada pencegahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum secara khusus pada Kab/Kota dengan tingkat kerentanan tinggi, serta peningkatan kerjasama antar pelaku dan lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak.

Program Tujuan 5. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan PUG, kegiatan a) Pemberian bantuan usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) melalui usaha industri rumah tangga, b) Rembug Dudi (Dunia Usaha & Dunia Industri) untuk Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2. Program Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak, kegiatan a) Advokasi implementasi pencapaian kabupaten/kota layak anak, b) Pemberian layanan perlindungan khusus anak,
3. Program peningkatan layanan KB, kegiatan a) Pelaksanaan Grand Desain Kependudukan dalam Pencapaian Cakupan KB Aktif, b) Orientasi Fasilitator Kesehatan Reproduksi Remaja,
4. Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, kegiatan a) Pembangunan unit sekolah/gedung baru SMA dan SMK, b) Revitalisasi/penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SLB dan SMK, c) Penyediaan meubelair SMA/SLB dan SMK, d) Bantuan operasional pendidikan SMA dan SMK, e) Penyediaan media pembelajaran/alat

- praktek dan alat peraga siswa, e) Boarding school SMA/SLB, f) Pemanfaatan dana alokasi khusus
5. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Pendidikan Dasar, kegiatan a) Penyelenggaraan paket C setara SMA
 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, kegiatan a) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan
 7. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan PUG, kegiatan a) Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam bidang Politik dan Pengambilan Kebijakan
 8. Program Peningkatan Layanan KB, kegiatan a) Peningkatan pengguna alat kontrasepsi, b) Pelaksanaan *grand design* kependudukan dalam pencapaian cakupan KB aktif, c) Orientasi KB Pasca Persalinan, dan d) Orientasi fasilitator kesehatan reproduksi remaja.

Target Indikator Tujuan 5. Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada Tabel 74. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 5 tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 5 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel 74. Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Sosial P3A	Kebijakan	1	1	2	2	3	3
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	P2TP2A	Jiwa (korban kekerasan usia 13-59 thn)	212	68a	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	P2TP2A	Anak (usia 13-17 thn)	80	30a	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	P2TP2A	Jiwa (korban kekerasan an usia 13-59 thn)	212	68a	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	P2TP2A	Jiwa Korban Kekerasan	246	89a	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	BKKBN Provinsi Gorontalo	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN Provinsi Gorontalo	Tahun	PM	PM	PM	PM	PM	PM
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2016: Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016	%	45.96	40	38	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
		<u>2018-2019:</u> Renstra Program KKBPK 2014- 2019							
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS	%	88.67	PM	PM	PM	PM	PM
		RPJMD	%	93.07 (2017)	93.83	94.12	94.42	94.71	95.00
	MA	Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo	%	PM	8.81	10.572	12.334	14.096	15.858
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Setwan DRPD	Jiwa	DPR RI = 0a	0a	0a	Menin gkat	Meningk at	Menin gkat
			Jiwa	DPD RI = 1a	1a	1a	Menin gkat	Meningk at	Menin gkat

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
			Jiwa	DPRD Prov = 14a	14a	14a	Meningkat	Meningkat	Meningkat
			Jiwa	DPRD Kab/Kot a = 29a	29a	29a	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Renstra Badan Keungan Provinsi Gorontalo	Jiwa	Eselon I = 4a	4a	4a	Meningkat	Meningkat	Meningkat
			Jiwa	Eselon II = 4a	4a	4a	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	BKKBN Provinsi Gorontalo	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	<u>2016:</u> Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 <u>2018-2019:</u> Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	11.6	10.14	9.91	PM	PM	PM
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	<u>2016:</u> Hasil Survey Indikator Program KKBPK RPJMN 2016 <u>2018-2019:</u> Renstra Program KKBPK 2014-2019	%	16.6	50	70	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Kementrian Kesehatan, BKKBN, KPPPA	Dokumen	3 (UU = 2) (PP = 1)	PM	PM	PM	PM	PM
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	%	52.93	PM	PM	PM	PM	PM



TUJUAN 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 6. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Air Bersih dan Sanitasi Layak, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan pada 2 (dua) kebijakan utama, yaitu:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui:
 - a. Pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air;
 - b. Penurunan beban pencemaran dari limbah domestik;
 - c. Peningkatan mutu dan kelas air;
2. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

Program Tujuan 6. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: 1. **Program Pengembangan Kinerja Air Minum Sanitasi**, kegiatan a) Pembangunan Prasarana Air Minum, 2. Program ...kegiatan a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi, 3. Program ..., kegiatan a)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi, 4. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kegiatan a) Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Provinsi Gorontalo, 5. Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, kegiatan a) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sempadan Sungai (POKJA SADAR KONSERVASI SUNGAI) dalam mendukung Provinsi Konservasi, 6. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kegiatan a) Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Provinsi Gorontalo, b) Kegiatan Hutan Manunggal, c) Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan 6 dapat dilihat pada Tabel 75. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 6 tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 6 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel 75. Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Kesehatan	%	59.5	68	70	70	72	0
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Kesehatan	%	71.59	69	70	70	72	0
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PU/PDAM	liter	960	976	989	1001	1014	1027
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	%	50	57	59	62	63	0
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	RENSTRA 2017-2022 Dinas Kesehatan	%	69	69	72	75	0	0

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	RENSTRA 2017-2022 Dinas Kesehatan	%	0	60	75	90	0	0
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Kesehatan	%	62.6	41	44	47	50	0
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	∑	0	85	99	76	82	0
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	∑	0	25	20	24	25	0
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	RENSTRA PU 2017-2022	∑	0	3	3	3	3	0
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	RENSTRA DLHK 2017-2022	∑	1	1	1	1	1	1
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	RENSTRA DLHK 2017-2022	∑	53.4	51.382	51.254	51.126	50.998	0
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Database Balai Sungai & BMKG	∑	91	91	91	91	91	91
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	RENSTRA DLHK 2017-2022	∑	0	3950	4050	4150	4250	0
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dokumen pola dan RPSDA Wilayah Sungai	∑	3	3	3	3	3	3
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	SK Gub, SK Menteri, SK Bupati	∑	4	4	4	4	4	4
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	BPDAS	∑	0	179	229	279	329	0
6.6	Pada tahun 2021, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	RENSTRA DLHK 2017-2022	∑	1	1	1	1	1	1
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	RENSTRA DLHK 2017-2022	∑	1	1	1	1	1	1
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	RENSTRA DLHK 2017-2022	∑	1	1	1	1	1	1



TUJUAN 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Kebijakan Tujuan 7. Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 meliputi :

- a. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu peningkatan ketahanan energi juga menjadi salah satu bagian dari misi pertama pembangunan Provinsi Gorontalo yakni **Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan.**
- b. Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah, seperti pertanian dan pangan, energi baru dan terbarukan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek serta mengupayakan penyediaan sarana prasarana iptek.

Program dan kegiatan Tujuan 7. Program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Gorontalo yang mendukung pencapaian tujuan 7 tertuang pada Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan yang terdiri atas beberapa kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pengembangan ketenagalistrikan daerah
2. Kegiatan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
3. Kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum
4. Kegiatan pengawasan ketersediaan energi
5. Kegiatan pengembangan energi baru terbarukan

Target Indikator Tujuan 7. Target pencapaian untuk setiap indikator pada tujuan 7 dapat dilihat dalam Tabel 76. Daftar indikator yang ditampilkan adalah indikator yang datanya tersedia di level Provinsi. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 7 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo.



Tabel 76. Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	PLN	%	96.87	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	PLN	kWh	386.34	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Penanaman Modal-ESDMT	kWh	8520	9376	10162	10948	11734	12520



TUJUAN 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara nasional, jumlah target dan indikator yang terdapat pada tujuan ke-8 ini sebanyak 10 target utama dan 28 indikator. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan.

Kebijakan Tujuan 8. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua, arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 terdiri dari tiga sasaran utama yakni sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 : Meningkatkan wisatawan nusantara & mancanegara.** Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal;
 - 2) Pembangunan Destinasi Pariwisata fokus pada 3 kawasan destinasi wisata strategis provinsi Taman Laut Olele, Pantai Biluhu dan Bubohu

Wisata Religi dan destinasi pariwisata lainnya yang ditetapkan dalam RIPPDA dan KSPN Provinsi Gorontalo, dan;

- 3) Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata daerah dan peningkatan sumberdaya manusia pariwisata.

2. **Sasaran 2 : Meningkatkan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB.** Arah Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- 1) Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor;
- 2) Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan agro industri daerah;
- 3) Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan;
- 4) Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM.

3. **Sasaran 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.** Arah Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;
- 2) Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi serta jangkauan dan pemasaran produk UKM dan koperasi;
- 3) Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;

- 4) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
- 5) Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
- 6) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke sentra produksi pertanian dan perikanan;
- 7) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa tertinggal meliputi aspek peningkatan aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan keuangan desa;
- 8) Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah dan peningkatan infrastruktur unit yang menjadi sumber pendapatan daerah, dan;
- 9) Peningkatan investasi melalui promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah.

Program dan kegiatan Tujuan 8. Program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Gorontalo yang mendukung pencapaian tujuan 8 terdiri atas beberapa program utama antara lain :

1. Program Pengembangan Koperasi Dan UKM
2. Program Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah
3. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Daerah
4. Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
5. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
6. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Populasi Ternak Berkelanjutan

7. Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian
8. Program Penyediaan Pangan Asal Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Pah Asuh)
9. Program Pengembangan SDM Pertanian
10. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
11. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
12. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
13. Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
14. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi Dan Pengembangan Produktifitas Daerah.
15. Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
16. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
17. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
18. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
19. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
20. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Target Indikator Tujuan 8. Target pencapaian untuk setiap indikator pada tujuan 8 dapat dilihat dalam Tabel 77. Daftar indikator yang ditampilkan adalah indikator yang datanya tersedia di level Provinsi. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 8 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo.



Tabel 77. Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	Persen	9.81	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS, Dokumen RPJMD	Rupiah	27,650,000	27,820,514	27,903,976	27,987,688	28,071,651	28,155,866
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	Persen	39.6	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS (Sakernas)	Persen	8.54					
	Laki-Laki	BPS (Sakernas)	Persen	12.04	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Perempuan	BPS (Sakernas)	Persen	3.59	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS (Sakernas)	Persen	80.91	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS (Sakernas)	Persen	10.56	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	BPS (Sakernas)	Rupiah	11694.14	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, Dokumen RPJMD	Persen	4.281% (RPJMD) ; 2.76% (BPS)	3.65%	3.44%	3.23%	3.04%	2.86%
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	Persen	28.35% L : 22.21% P : 37.21%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	RPJMD, Renstra Dinas PM-ESDMT	Perusahaan	576	135	265	370	486	793

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	BPS dan Renstra Dispar	Orang	5,923 (BPS) ; 2,542 (RPJMD)	6,530	6,856	7,199	7,559	7,937
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS dan Renstra Dispar	Orang	566,394 (BPS) ; 313,286 (RPJMD)	624,45 0	655,67 2	688,45 6	722,87 9	759,02 3
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1*	Jumlah kantor bank 100.000 jumlah orang dewasa.	Bank Indonesia	Unit	13.9	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	Bank Indonesia	Unit	20.1	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	KER Bank Indonesia	Persen	27.148	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a



TUJUAN 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

Kebijakan Tujuan 9. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo periode 2017-2022. Adapun beberapa kebijakan yang terkait dengan upaya pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air.
2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
4. Perencanaan dan pengendalian tata ruang wilayah dan penyediaan tanah untuk pembangunan.
5. Pengembangan SDM jasa konstruksi.
6. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi.
7. Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM, kapasitas pengelolaan keuangan dan aset.

8. Peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan pemerintah kabupaten kota dan instansi pengawas.
9. Pemanfaatan IT dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur.
10. Pengembangan kemitraan untuk pengembangan SDM.
11. Pengembangan IKM daerah melalui Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Industri
12. Perluasan akses UKM dan Koperasi ke sumber-sumber pembiayaan dan penguatan kelembagaan UKM dan Koperasi

Adapun kebijakan untuk mendorong perkembangan industry yang inklusif dan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;
2. Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi serta jangkauan dan pemasaran produk UKM dan koperasi;
3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;
4. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;

Program dan kegiatan Tujuan 9. Program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Gorontalo yang mendukung pencapaian tujuan 9 terdiri atas beberapa program utama antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
3. Program peningkatan layanan transportasi
4. Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi
5. Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi
6. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa

7. Program Pengembangan Koperasi dan UKM
8. Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
9. Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
10. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
11. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
12. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Daerah.

Target Indikator Tujuan 9. Target pencapaian untuk setiap indikator pada tujuan 8 dapat dilihat dalam Tabel 78. Daftar indikator yang ditampilkan adalah indikator yang datanya tersedia di level Provinsi. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 9 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo.



Tabel 78. Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Satker P2JN	Persen	94	96	100	100	100	100
9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Dinas Perhubungan							
	Laut		Orang	204,627	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Udara		Orang	573,466	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	1	1	1
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	2	2	2	2	2	2
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	Unit	5	5	5	5	5	5
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS (DDA)	Persen	6.58	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS (Sakernas dan DDA)	Persen	16.06	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		Persen	0	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	BPS (Statistik Kesejahteraan Rakyat)	Persen	19.63	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS (Susenas)	Persen	52.93	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS (Susenas)	Persen	21.48	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a



TUJUAN 10. Berkurangnya Kesenjangan

Secara nasional, jumlah target dan indikator yang terdapat pada tujuan ke-8 ini sebanyak 10 target utama dan 11 indikator utama dan 14 indikator proksi. Untuk konteks Provinsi Gorontalo, jumlah target dan indikator yang bersesuaian dengan kondisi Provinsi Gorontalo hanya sebanyak 3 target dan 3 indikator.

Kebijakan Tujuan 10. Upaya pencapaian tujuan ini dituangkan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo terutama dalam sasaran menurunkan tingkat kemiskinan. Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar. Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia; Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan SJSN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan layanan kesehatan; pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan gizi serta Penguatan institusi implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu;
2. Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber pembiayaan, penerapan teknologi, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis),

pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

Program Tujuan 10. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung pencapaian tujuan ini antara lain :

1. Program Pengembangan Perdesaan
2. Program Pengembangan Kawasan Strategis
3. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan serta Kawasan Perdesaan
4. Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
5. Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin
6. Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi
7. Program Peningkatan Kawasan Permukiman
8. Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
9. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
10. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
11. Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
12. Program Penanganan Fakir Miskin
13. Program Pemberdayaan Sosial
14. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
15. Program Kesejahteraan Rakyat

Target Indikator Tujuan 10. Target pencapaian untuk setiap indikator pada tujuan 8 dapat dilihat dalam Tabel 79. Daftar indikator yang ditampilkan adalah indikator yang datanya tersedia di level Provinsi. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 10 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo.



Tabel 79. Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini.	RPJMD	Indeks	0.41	0.3938	0.3859	0.3782	0.3706	0.3632
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	RPJMD	%	17.72	16.588	16.090	15.608	15.140	14.685
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Kementerian PDT	Kabupaten	3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa	103	100	97	94	91	88
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Dinas PMD	Desa	3	3	3	3	3	3
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BPS	Persen	6.77	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS	%	21.01	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS (Statistik	Indeks	82.35	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
		Politik)							
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Kemenkumham	Perkara	2	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Kemenkumham	Perkara	2	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	RPJMD	Persen	1.651	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Milyar	26.35	50.016	56.226	63.029	70.978	81.18
		BPS	Persen	57.089	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
		RPJMD	Tenaga Kerja	12208	22049	24254	26680	29348	32280



TUJUAN 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 11. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan pada 1 (satu) kebijakan utama, yaitu:

1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kab/kotalayak anak.

Program Tujuan 11. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi
2. Program Peningkatan layanan transportasi,
3. Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi,
4. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana
5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Program Kedaruratan Dan Logistik

7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
8. Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Target Indikator Tujuan 11. Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada Tabel 80. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 11 tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 11 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel 80. Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR (Satker PBL)	∑	1	1	1	1	1	1
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	RPJMD	∑	0,60-0,94	0,54-0,88	0,48-0,83	0,43-0,77	0,37-0,71	0,3-0,65
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	RPJMD	∑	6	6	6	6	6	6
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	RPJMD	∑	0	26000	22880	23800	24880	25880
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PUPR (Satker PBL)	∑	3	3	3	3	3	3
11.b	Pada tahun 2021, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	∑	1	1	1	1	1	1



TUJUAN 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 1 target yang diukur melalui 2 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 12. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan kebijakan utama, yaitu:

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui, (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto; (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (viii) peningkatan tutupan lahan/hutan

Program Tujuan 12. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Target Indikator Tujuan 12. Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada Tabel 81. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 12 tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 12 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel 81. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
				2016	2018	2019	2020	2021	2022	
12.4	Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLHK	Kg	0	26000	22880	23880	24880	25880	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



TUJUAN 13. Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 3 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 13. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Penanganan Perubahan Iklim, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan pada 2 (dua) kebijakan utama, yaitu:

1. Kebijakan Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH;
 - b. Pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - d. Penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati;
 - e. Pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau, dan;
 - f. Pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

2. Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadansungai, danau, dan pantai.

Program Tujuan 13. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan
2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan
4. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana
5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Program Kedaruratan Dan Logistik
7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
8. Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 dapat dilihat pada Tabel 82. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 13 tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 13 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel 82. Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.								
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).			1	1	1	1	1	1



TUJUAN 14. Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 14. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Ekosistem Lautan, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan pada 1 (satu) kebijakan utama, yaitu:

1. Kebijakan Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui:
 - a. Pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air;
 - b. Penurunan beban pencemaran dari limbah domestik;
 - c. Peningkatan mutu dan kelas air;
 - d. Pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk);
 - e. Revitalisasi danau Limboto;
 - f. Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan;

Program Tujuan 14. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam, kegiatan a) Persentase kawasan konservasi pesisir dan jasa kelautan yang terkelola
2. Program Pengelolaan Konservasi Rehabilitasi dan Jasa Kelautan, kegiatan a) Luas kawasan konservasi perairan daerah
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
4. Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-pulau Kecil
5. Penyusunan PERDA RZWP#3K Provinsi Gtlo.

Target Indikator Tujuan 14. Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada Tabel 83. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 14 tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 14 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel 83. Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
14.5	Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	RENSTRA DKP, 2012-2017 dan Renstra 2018-2022	Ha	11948.7	11948.7	11948.7	11948.7	11948.7	11948.7
14.6	Pada thn 2021, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	RENSTRA DKP, 2012-2017 dan Renstra 2018-2022	Persen	70	72	75	78	82	86
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	RENSTRA DKP, 2012-2017 dan Renstra 2018-2022	∑ kerangka hukum	0	1	1	2	3	Bappeda Dinas KP

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
14.b.1.(a)	Jumlah kabupaten dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	RENSTRA DKP, 2012-2017 dan Renstra 2018-2022	∑ kabupaten	6	6	6	6	6	6
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Laporan Tahunan DKP, 2016; Renstra 2018-2022	∑ orang	12911	15824	17300	17816	20915	21431



TUJUAN 15. Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 10 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 15. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Ekosistem Daratan, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 diarahkan pada 8 (delapan) kebijakan utama, yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang dengan Kebijakan pengembangan kawasan lindung, melalui:
 - a. Pemulihan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah.
 - b. Pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 - c. Pemulihan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Pelestarian ekologi wilayah terutama dikawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, cagar alam, ruang terbuka hijau, dan taman edukasi lingkungan.
3. Penataan ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.

4. Pelestarian ekosistem dan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau
5. Kebijakan Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi;
6. Kebijakan Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan;
7. Kebijakan Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan;
8. Kebijakan Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan;

Program Tujuan 15. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
3. Program Pemanfaatan Potensial Sumberdaya Hutan
4. Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
6. Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
7. Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
8. Program Pengembangan kawasan Strategis

Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada Tabel 84. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 15 tercantum pada

tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 15 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.



Tabel 84. Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode	Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
15.1	Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	RENSTRA DLHK 2017-2022; Neraca SD Hutan/tahun	%	63	63	63	63	63	63
15.2	Pada tahun 2021, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	RTKRHL		0	6.228	4.671	3.114	1.557	0
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	RTKRHL	Ha	600	994.62	994.62	1044.62	1144.62	1244.62
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	RENSTRA DLHK 2017-2022	∑	9	9	9	9	9	9
15.3	Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.								
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan			0.91%	4.51%	5.01%	5.51%	6.01%	6.51%

	keseluruhan.								
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.								
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Laporan Perkara; Putusan Pengadilan terhadap perkara	∑	0	2	2	2	2	2
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	Laporan MONEV BKSDA	∑	30	55	61	71	81	91
15.a	Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.								
15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	BKSDA	Juta rupiah	0	0	100	0	0	0



TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 TPB/SDGs Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 27 indikator

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama (enabling) dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 mengacu pada tiga isu utama yaitu adanya perdamaian (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*), serta keberadaan institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Dalam kaitannya ketiga isu utama tersebut, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo berupaya untuk mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan. Di bidang penegakan rule of law, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo telah berupaya dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan dengan ditunjukkan pada pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif juga menjadi modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Indonesia menekankan pada upaya pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, selain menjaga iklim demokrasi.

Kebijakan Tujuan 16. Arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, pada masing-masing masing-masing Tujuan merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Gorontalo 5 (lima) tahun kedepan merupakan bagian kebijakanyang dirumuskan dengan mengacupada RPJMD 2017-2022. RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo

tahun 2005-2025, dan merupakan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) .Selain itu juga diuraikan kebijakan berdasarkan program, kegiatan, dan indikator kegiatan untuk masing-masing program yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat daerah Provinsi Gorontalo telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 telah mengakomodir tujuan 16 TPB/SDG's yaitu dalam Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai landasan pembangunan disegala bidang.

Program Tujuan 16. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 terkait pengentasan kekerasan dan tata kelola pemerintahan baik ditunjang oleh beberapa program dalam memenuhi target jangka menengah yaitu :

1. Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan indikator program yaitu Jumlah dokumen Perencanaan, Evaluasi dan laporan keuangan
2. Program Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum indikator program yaitu Persentase pendampingan kasus terkait penyelenggara Pemerintahan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah indikator program yaitu Prosentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah

4. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi indikator program yaitu Jumlah kasus korupsi
5. Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan indikatornya yaitu Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Program Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak indikatornya yaitu Persentase Forum Anak yang dibentuk serta lembaga Layanan Perlindungan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif
7. Program Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin
8. Program Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum
9. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Program Pengendalian Pembangunan
11. Program Peningkatan Layanan Pengadaan
12. Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
13. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial
14. Program Pendidikan Politik

Selain program yang terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 serta Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), beberapa program yang menunjang tercapainya target/indikator pada tujuan 16 termuat pada Rencana Strategis Kepolisian Daerah Gorontalo T.A 2015-2019 serta Rencana Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Gorontalo yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
2. Pengembangan Hukum Kepolisian
3. Program Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin

Berdasarkan uraian program yang telah diakomodir baik pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RENSTRA OPD, maupun RENSTRA beberapa instansi vertikal di Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa

target/indikator pada tujuan/goals 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang belum didukung oleh program sehingga perlu adanya upaya untuk menginisiasi kebijakan dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Target 16.2 , Indikator 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

Belum tersedianya data spesifik yang menerangkan berapa proporsi laki-laki/perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam kelompok umur mengharuskan untuk adanya upaya untuk menyediakan data berdasarkan kelompok umur. Selanjutnya dapat diupayakan program/kegiatan baik secara preventif maupun represif untuk menanggulangi kekerasan seksual berdasarkan kelompok umur. Program dapat berupa sosialisasi/penyuluhan pendidikan seksual yang edukatif bagi anak usia sekolah dalam rentan umur 18-24 tahun. Selain itu untuk upaya penanganan korban harus ada pendampingan dari pendamping yang telah mendapatkan pelatihan advokasi kasus kekerasan seksual.

2. Target 16.10, Indikator 16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perlu mengefektifkan fungsi Komisi Informasi Publik (KIP) agar lebih efektif dan proaktif dalam menangani kasus sengketa informasi publik atau minimal memiliki deskripsi kondisi informasi publik di Provinsi Gorontalo.

3. Target 16.7, Indikator 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam upaya meningkatkan peran/partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, tidak sebatas hanya memberikan penguatan pada partai politik namun lebih lanjut harus ada program/kegiatan untuk meningkatkan

kapasitas anggota legislatif perempuan yang lebih intens agar kritis serta partisipatif nyata dapat dilihat pada saat pengambilan keputusan di lembaga legislatif sehingga meningkat secara kuantitas maupun kualitas.

Target Indikator Tujuan 16. Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada Tabel 85. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 16 tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 5 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.



Tabel 85. Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda Gorontalo	Kasus	16	PM	PM	PM	PM	PM
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS	Persentase	0.97%	PM	PM	PM	PM	PM
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Modul Hansos BPS	Persentase	PM	NA	NA	NA	NA	NA
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									

16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	P2TP2A	Persentase	0,036	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	BPS	Persentase	NA	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun

Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Polda Gorontalo	Persentase	13,33	PM	PM	PM	PM	PM
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Kemenkumham Wil.Gorontalo	Orang	106	184	270	385	NA	NA
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Biro Hukum dan Organisasi	Persentase	NA	100%	100%	100%	100%	100%

16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kemenkumham Wil.Gorontalo	Persentase	NA	NA	NA	NA	NA	NA
-------------	--	------------------------------	------------	----	----	----	----	----	----

Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	Indeks	Tidak Ada di Level Provinsi					
------------	--------------------------------------	-----	--------	-----------------------------	--	--	--	--	--

Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Keuangan	Persentase	92,93	NA	NA	NA	NA	NA
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Badan keuangan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Biro Hukum dan Organisasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	(SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).								
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>Eprocurement</i> terhadap Belanja pengadaan.	Biro P2LP	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Inspektorat	Jumlah instansi	Tidak tersedia di level OPD					
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo	Persentase	50,12%	80%	100%	NA	NA	NA

Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan	KPU	Persentase	19.4%	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per-5 Tahun				
------------	-------------------------	-----	------------	-------	---	--	--	--	--

	perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).								
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Diklat	Persentase	30	1	2	3	3	5
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	Indeks	74,42	NA	NA	NA	NA	NA
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	Indeks	82,35	NA	NA	NA	NA	NA
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS	Indeks	75,54	NA	NA	NA	NA	NA

Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40%	BPS	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	berpendapatan bawah.								
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	BPS	Persen	86,34	NA	NA	NA	NA	NA

Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Kemenkumham Wil.Gorontalo	Kasus	2	NA	NA	NA	NA	NA
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Polda Gorontalo	Jumlah Penanganan	236	NA	NA	NA	NA	NA
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Publik (KIP)	Jumlah	1	1	1	1	1	1
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi	KIP	Persentase						

dan/atau ajudikasi non litigasi.

16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat
)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

	KIP	Jumlah							
--	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--

16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

	Jumlah	NA	NA	NA	NA	NA	NA
--	--------	----	----	----	----	----	----



TUJUAN 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 3 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator. Untuk konteks Provinsi Gorontalo, jumlah target dan indikator yang bersesuaian dengan kondisi Provinsi Gorontalo hanya sebanyak 3 target dan 7 indikator.

Kelima target tersebut adalah : (i) mobilisasi sumber daya domestik, (ii) kerjasama regional dalam peningkatan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi ; (iii) peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ; (iv) peningkatan ekspor ; (v) pengembangan kapasitas statistika.

Kebijakan Tujuan 17. Untuk mendukung pencapaian target-target dalam tujuan menguatkan sarana pelaksanaan untuk pembangunan berkelanjutan , arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 meliputi :

- a. Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); pementapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian

kinerja pelayanan publik, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.

- b. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah lainnya; membangun hubungan kemitraan untuk pembangunan daerah dengan lembaga-lembaga nasional maupun international.

Program dan kegiatan Tujuan 17. Program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Gorontalo yang mendukung pencapaian tujuan 17 tertuang pada Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan yang terdiri atas beberapa kegiatan antara lain :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
2. Program Kerjasama Pembangunan Daerah
3. Program Penataan MOU dan Perjanjian Kerja sama
4. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah
6. Program Pengembangan Data dan Informasi
7. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
9. Program Pengendalian Ekonomi

Target Indikator Tujuan 17. Target pencapaian untuk setiap indikator pada tujuan 17 dapat dilihat dalam Tabel 86. Daftar indikator yang ditampilkan adalah indikator yang datanya tersedia di level Provinsi. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 17 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo.



**Tabel 86. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17
 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Kode	Target/ Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		Persen	0.0713	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	PDRB	BPS	Triliun	23.5072	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Pendapatan Pemerintah	RPJMD	Triliun	1.67601	1.82	2.02	2.27	2.58	2.99
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		Persen	0.04449	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	RPJMD, Rentra Badan Keuangan	Persen	0.183	0.18454	0.18365	0.18277	0.18188	0.181
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	PT. Telkom	Persen	100	100	100	100	100	100

Kode	Target/ Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
				2016	2018	2019	2020	2021	2022
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	BPS	Persen	0.19631	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2018 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS (Susenas)	Persen	0.2731	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
17.11	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2021.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas.	BPS	Persen	-0.863	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Renstra PMD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS		8192	12487.2	14581.6	16676	18770.4	20864.8

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari waktu ke waktu, diharapkan lebih terarah dan mencapai target sesuai dengan tahapan tahunan yang direncanakan. Untuk memastikan pencapaian tersebut, mekanisme pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang bertujuan menjamin tahapan SDGs berjalan sesuai dengan rencana. Siklus pelaksanaan pencapaian SDGs yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Gorontalo oleh pemangku kepentingan di daerah, yang diikuti dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di daerah.

Landasan Hukum. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB yang dikoordinasikan oleh Kementerian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan bunyi pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 15 ayat 2).

Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut. Setiap Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional. Terkait dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan organisasi non pemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan pencapaian setiap tahap TPB dari waktu ke waktu, sesuai target tahun pencapaian. Pemantauan ditekankan pada pengukuran

kemajuan pencapaian dan perubahan atas setiap kegiatan yang diprogramkan pada setiap Target dan Indikator TPB. Sistem pemantauan dan evaluasi digunakan untuk mengukur kuantitas, kualitas dan penargetan keluaran (*outputs*) yang disepakati berdasarkan komitmen serta guna mengukur hasil dan dampak dari keluaran tersebut.

Prestasi dan kendala pencapaian Target dan Indikator tertentu serta penggunaan anggaran yang telah direalisasikan dalam APBN dan APBD juga menjadi objek materi pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik dan waktu tertentu. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan di tahun atau periode waktu berikutnya. Selain itu pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Indonesia dalam mensukseskan pembangunan berkelanjutan global.

Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. Lingkup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilakukan pada tujuan dan target serta indikator yang sesuai dengan kondisi spesifik Provinsi Gorontalo, termasuk organisasi perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab kegiatan SDGs di daerah. Lingkup pemantauan dan evaluasi mengacu kepada Lampiran Perpres 59/2017 menjabarkan tujuan global, target global, target nasional dan daerah yang dapat menjadi bagian yang sesuai kepentingan dan kapasitas dari seluruh stakeholder di Provinsi Gorontalo yang tercermin dalam RPJMD 2018-2022 Provinsi Gorontalo.

Tabel 87. Jumlah Tujuan, Target dan Indikator SDGs Provinsi Gorontalo

Tujuan	Target	Indikator	Program	Kegiatan
17	81	196	243	615

Lingkup pemantauan dan evaluasi mencakup 17 Tujuan, 81 Target dan 196 indikator, yang terdiri atas 243 program dan 615 kegiatan. Keseluruhan Tujuan, Target dan Indikator serta Program dan Kegiatan tersebut dikategorikan ke dalam 4 Pilar. Berdasarkan Pilar SDGs, jumlah Tujuan, Target, Indikator, Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 88 Jumlah Tujuan, Target, Indikator SDGs, Program dan Kegiatan Berdasarkan Pilar SDGs Provinsi Gorontalo

Pilar	Jumlah				
	Tujuan	Target	Indikator	Program	Kegiatan
Pembangunan Sosial	5	33	107	130	345
Pembangunan Ekonomi	5	20	50	58	203
Pemb. Hukum dan Tata Kelola	1	8	18	17	38
Pembangunan Lingkungan	6	20	40	38	29
Total	17	81	215	243	615
Jumlah Indikator Ganda			19		
Jumlah Indikator (Provinsi Gorontalo)			196		

Berdasarkan matriks yang dapat diselesaikan oleh Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo dan merujuk kepada konsep dan cara pengukurannya, terdapat 17 Tujuan dan 81 Target serta 215 Indikator dan 19 indikator diantaranya sama yang tersebar pada Tujuan TPB tertentu sehingga total indikator TPB Provinsi Gorontalo sebanyak 196 indikator yang dapat dipetakan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

- a. Pertama, Indikator nasional sebagai proksi indikator global berjumlah 94 Indikator;
- b. Ketiga, Indikator nasional sebagai tambahan indikator global sebanyak 59 indikator
- c. Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global sebanyak 54 indikator.

Selain jenis indikator di atas, terdapat 2 (dua) indikator yang terisi dalam matriks yakni indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan sebanyak 7 indikator dan indikator global yang akan dikembangkan, sebanyak 1 indikator. Jumlah tersebut terpetakan ke dalam masing-masing target, indikator, Program dan kegiatan yakni Pilar Pembangunan Sosial sebanyak 33 target dan 107 indikator, 130 Program dan 345 kegiatan. Pilar Pembangunan Ekonomi sebanyak 20 target dan 50 indikator, 58 Program dan 203 kegiatan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola sebanyak 8 target dan 18 indikator, 17 Program dan 38 kegiatan serta Pilar Pembangunan Lingkungan sebanyak 20 target dan 40 indikator, 38 program dan 29 kegiatan.

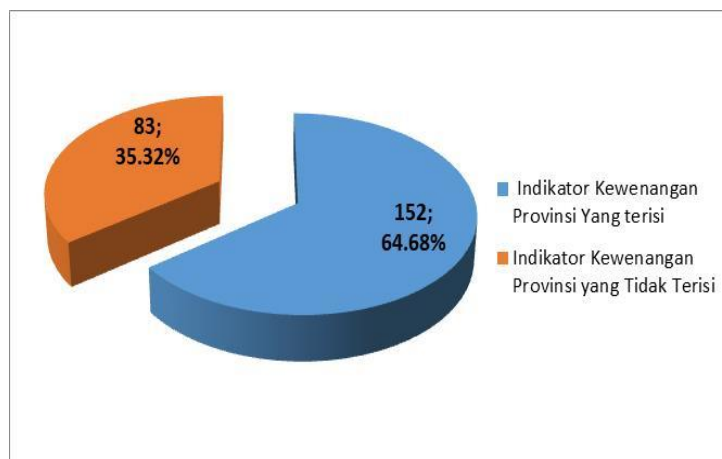
Kesesuaian Indikator SDGs dengan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lain di Provinsi Gorontalo

Hasil pemetaan indikator SDGs dengan matrisk KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dari Kementerian Dalam Negeri diperoleh 235 indikator SDGs menjadi kewenangan Provinsi dari total 319 indikator SDGs secara nasional.

Berdasarkan hasil tersebut kemudian dilakukan mapping kesesuaian antara indikator SDGs di Provinsi Gorontalo dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lain di lingkungan Provinsi Gorontalo. Hasil pemetaan adalah sebagai berikut :

1) Ketersediaan Indikator yang sesuai dengan Kewenangan Provinsi

Dari 235 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi, sebanyak 152 indikator datanya tersedia dan berhasil diperoleh. Sementara jumlah indikator yang merupakan kewenangan provinsi namun datanya tidak tersedia/diperoleh sebanyak 83 indikator.



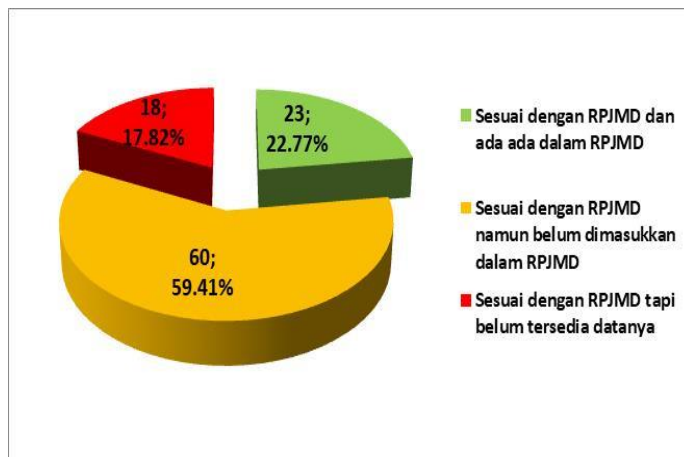
Gambar 35.
Ketersediaan
Indikator yang
sesuai dengan
Kewenangan
Provinsi

2) Kesesuaian Indikator SDGs dengan Indikator RPJMD

Dari 235 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi, sebanyak 101 indikator bersesuaian dengan RPJMD (Hasil pemetaan KLHS). Untuk Provinsi Gorontalo, dari 101 indikator tersebut diperoleh hasil pemetaan sebagai berikut:

- a) Sebanyak 23 indikator telah berhasil diperoleh datanya dan telah dimasukkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo,

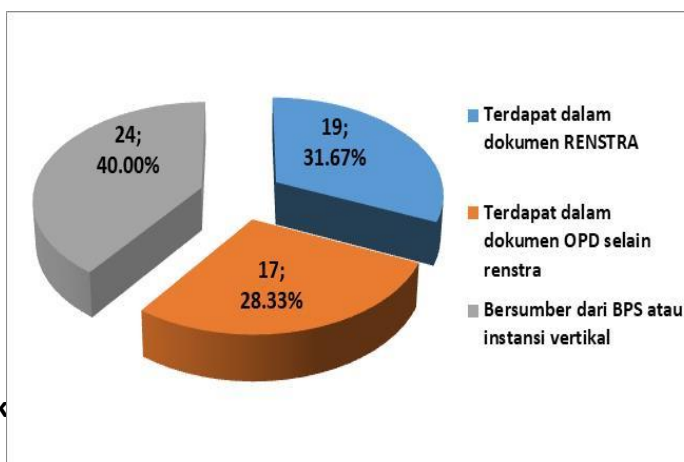
- b) Sebanyak 60 indikator sesuai dengan RPJMD namun belum dimasukkan dalam dokumen RPJMD
- c) Sebanyak 18 indikator yang sesuai dengan RPJMD namun belum tersedia datanya.



Gambar 36.
Kesesuaian
Indikator SDGs
dengan
Indikator
RPJMD

Dari 60 indikator yang telah sesuai dengan RPJMD namun belum dimasukkan dalam dokumen RPJMD dilakukan pemetaan lagi sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Sebanyak 19 indikator terdapat dalam dokumen renstra OPD
- b) Sebanyak 17 indikator terdapat dalam dokumen lain OPD selain renstra (profil, LAKIP, dll)
- c) Sebanyak 24 indikator datanya berasal dari BPS dan instansi vertikal lain (Telkom, BPJS, BPDAS, Balai Jalan, Bank Indonesia, dll)

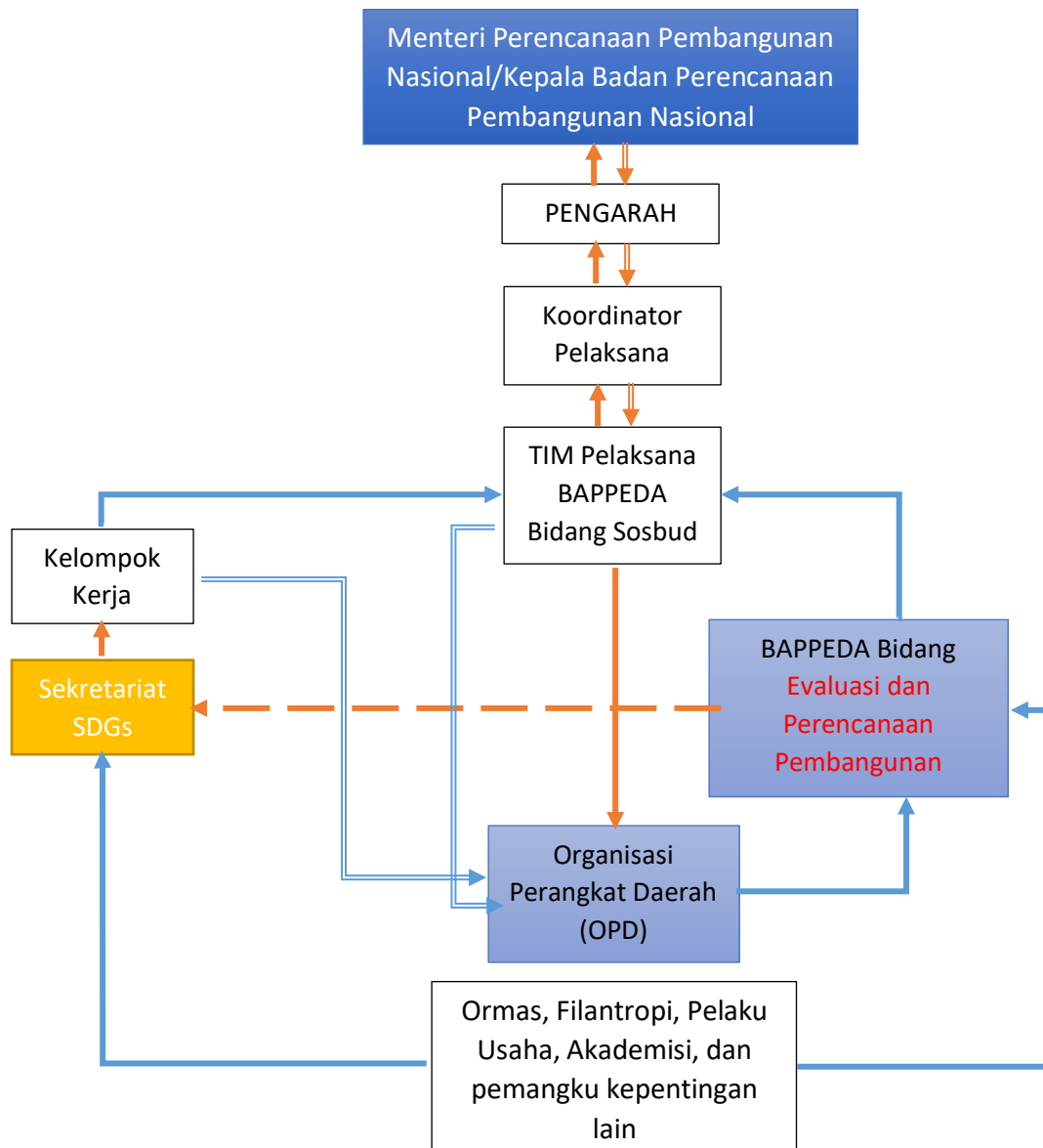


Gambar 37.
Sumber data
indikator SDGs
Provinsi
Gorontalo

4.1. Mekanisme

1. Mekanisme Pemantauan RAD

Alur pemantauan dan evaluasi mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Perpres 59/2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2018 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022. Diagram berikut ini menggambarkan alur pemantauan dan evaluasi untuk lingkup daerah (RAD) Provinsi Gorontalo.



Gambar 38. Alur Informasi Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (Matriks RAD)

Tahap alur informasi pemantauan RAD Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

a. Alur Laporan

- Langkah 1

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Kepala Bappeda c.q. Kepala Bidang Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan.

- Langkah 2

Kepala Bidang Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan selanjutnya akan mengolah dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pelaksana SDGs melalui Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda. Dalam proses pelaporan dan penyajian laporan tersebut Kepala Bidang Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan berkoordinasi dengan Sekretariat SDGs.

- Langkah 3

Sekretariat SDGs akan menyampaikan masukan terkait Laporan OPD dan stakeholder lainnya kepada Kelompok Kerja: Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Hukum dan Tata Kelola terkait kelengkapan data, kepatuhan jadwal dan kepatuhan format.

- Langkah 4

Kelompok Kerja ke 4 Pilar SDGs akan bekerja mengkaji dan memvalidasi atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh OPD dan stakeholder lainnya dan kemudian menyampaikan hasil kajian dan validasi tersebut kepada Tim Pelaksana (BAPPEDA Bidang Sosial Budaya).

- Langkah 5

Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian ke dalam suatu laporan yang utuh dan selanjutnya menyampaikannya kepada Koordinator Pelaksana yang dalam hal ini Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

- Langkah 6

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target SDGs tingkat daerah kepada Gubernur Provinsi Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

- Langkah 7

Selama 6 (enam) bulan setiap tahun, Gubernur Provinsi Gorontalo selaku pengarah pelaksanaan dan pencapaian SDGs akan melaporkan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta tantangan dan hambatan yang ditemukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selaku koordinator pelaksanaan dan pencapaian SDGs ditingkat nasional dan daerah seluruh Indonesia,

b. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memudahhi proses perbaikan atau peningkatan kualitas data indikator yang dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses umpan balik dilakukan pada:

- Langkah 1

Pokja akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.

- Langkah 2

Umpan balik dari Pengarah/Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian SDGs dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi panduan kebijakan bagi proses pemantauan pencapaian periode berikutnya

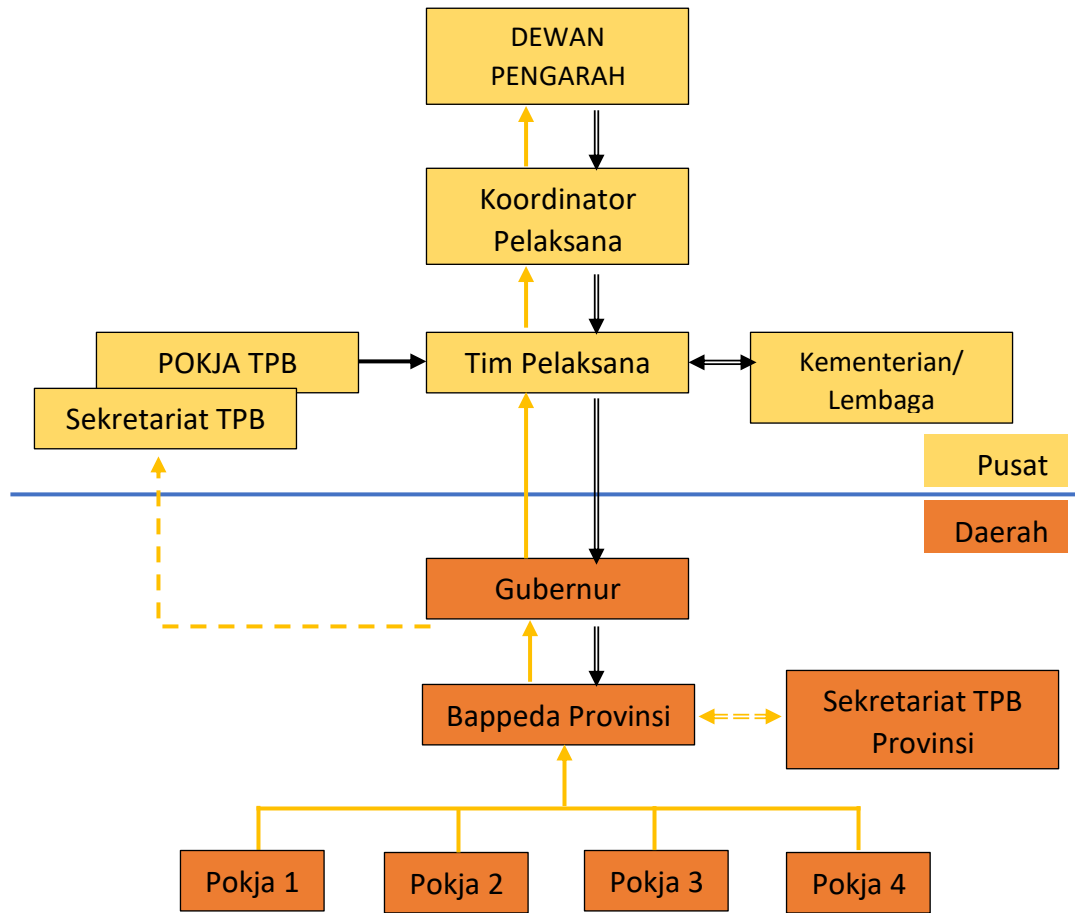
- Langkah 3

Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana dan hasil kajian dan validasi dari Pokja terkait pencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh OPD. Muatan umpan balik terutama difokuskan kepada indikator yang mengalami penurunan angka pencapaian. Umpan balik jenis ini akan terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam siklus penyusunan RKA OPD tahun berikutnya.

2. Alur Informasi Pemantauan RAD

Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Laporan pencapaian

atas pelaksanaan Target TPB disampaikan oleh Gubernur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator Pelaksana TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2.



Keterangan:

- : Alur Pelaporan
- ← : Alur Umpan Balik
- - - → : Alur Koordinasi

Gambar 39. Alur Informasi Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tingkat Nasional dan Daerah

Alur pemantauan sebagai berikut:

a. Alur Laporan

- Langkah 1

Setiap enam bulan sekali, Bappeda Propinsi mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap Target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.

- Langkah 2

Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur oleh Bappeda Propinsi.

- Langkah 3 dan 4

Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Propinsi.

- Langkah 5

Pokja TPB akan bekerja untuk melakukan kajian dan validasi atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur dan kemudian menyampaikan hasil kajian dan validasi tersebut kepada Tim Pelaksana.

Pokja melalui sekretariat TPB akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Bappeda propinsi sebagai bagian dari tugas koordinasi dan fasilitasi yang disebutkan dalam pasal 7 Perpres 59/2017.

- Langkah 6

Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas kemudian akan mengolah dan menyampaikan hasil konsolidasi laporan dari seluruh Propinsi kepada Tim Pelaksana melalui Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas.

Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian ke dalam suatu laporan yang utuh dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB.

- Langkah 7

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat daerah kepada Presiden / Ketua Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017.

b. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memudahkan proses perbaikan atau peningkatan kualitas pencapaian indikator TPB yang dilaporkan oleh Gubernur. Proses umpan balik dilakukan pada langkah-langkah berikut:

- Langkah 8 dan 9

Umpan balik dari Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi panduan kebijakan bagi proses pemantauan pencapaian periode berikutnya.

- Langkah 10

Laporan umpan balik tersebut diberikan juga kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk ditindak lanjuti dalam rapat Tim Pelaksana TPB nasional.

- Langkah 11

Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana, hasil kajian dan validasi dari Pokja, masukan dari K/L terkait tentang pencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh Gubernur. Muatan umpan balik terutama difokuskan kepada indikator yang mengalami penurunan angka pencapaian. Umpan balik jenis ini akan terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam siklus penyusunan RAPBD tahun berikutnya.

- Langkah 12

Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana TPB nasional, masing-masing Gubernur memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran untuk mendapatkan kesepakatan dari DPRD dan kepada Bappeda sebagai arahan penyusunan RKA-SKPD periode berikutnya.

3. Mekanisme Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dua kali dalam periode 5 tahun sesuai dengan periode kaji ulang RPJMD (kaji ulang pertengahan dan akhir) dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Panel Evaluator Independen yang terdiri dari para pakar dibidangnya serta wakil-wakil dari setiap unsur platform yaitu: unsur pemerintah, unsur organisasi non pemerintah, unsur akademisi dan unsur komunitas bisnis.

Mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada tingkat daerah (RAD) tampak pada diagram berikut ini:

a. Alur Laporan Evaluasi

- Langkah 1 dan 2

Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB dilakukan oleh BPS melalui berbagai survai skala lokal daerah dan juga berbagai survai sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan evaluasi tersebut disampaikan ke BAPPEDA Bidang Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan untuk dikonsolidasikan.

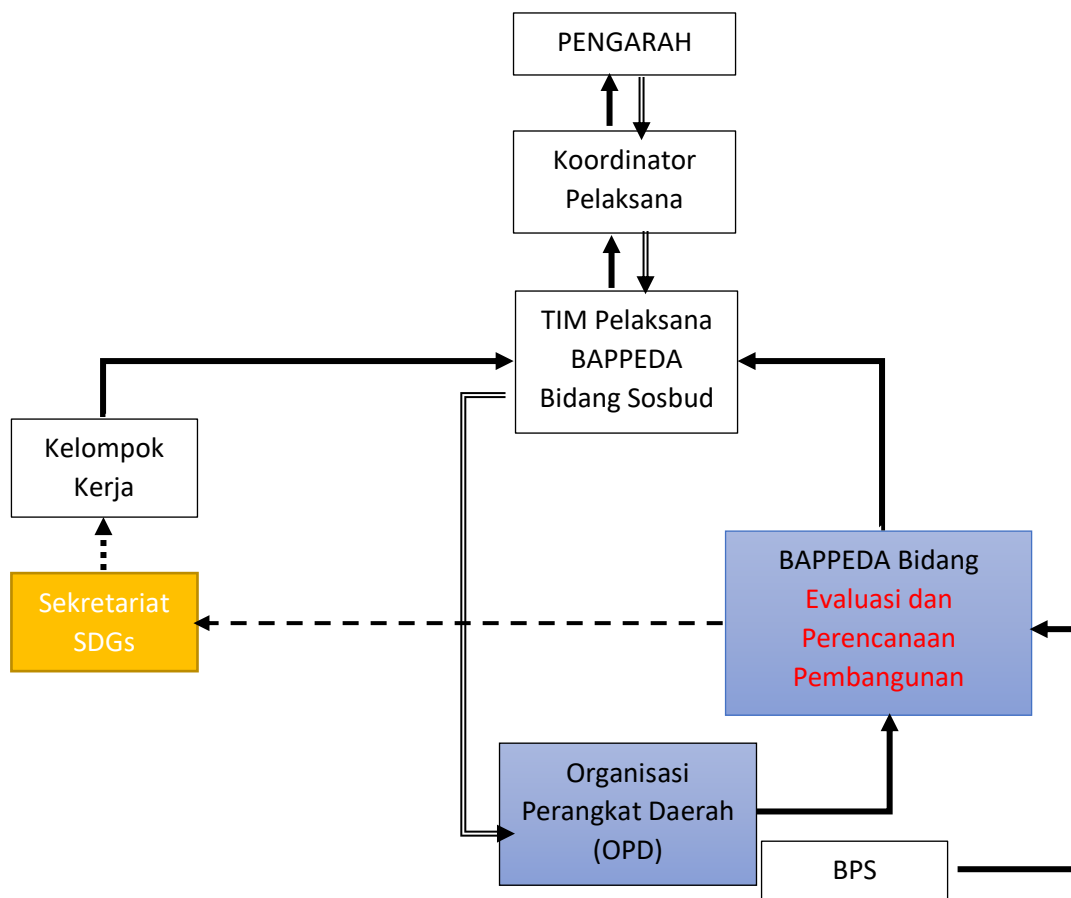
- Langkah 3

BAPPEDA Bidang Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada TIM Pelaksana BAPPEDA Bidang Sosial Budaya. Selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Pelaksana. Dalam rangka

menyusun laporan evaluasi TPB ini BAPPEDA Bidang Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan berkoordinasi dengan Sekretariat TPB.

• Langkah 4

Kelompok Kerja melakukan kajian atas laporan evaluasi untuk mengetahui status pencapaian setiap Target dan Indikator dua kali dalam kurun waktu 5 tahun (evaluasi pertengahan dan evaluasi akhir). Selain itu, Kelompok Kerja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional yang tercantum dalam RPJMD dan RPJMN.



Keterangan:

- : Alur Pelaporan
- ← : Alur Umpan Balik
- - - - -> : Alur Koordinasi

Gambar 40. Alur Informasi Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Matriks 1

• Langkah 5

Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB Daerah Provinsi Gorontalo.

- Langkah 6

Koordinator TPB Daerah melaporkan Laporan Evaluasi TPB Provinsi Gorontalo kepada Pengarah yakni Gubernur Provinsi Gorontalo setelah melalui pembahasan oleh Tim Pelaksana.

b. Alur Umpan Balik

- Langkah 7

Koordinator Pelaksana mendapatkan arahan kebijakan dari Gubernur sebagai Pengarah terkait hasil evaluasi TPB Provinsi Gorontalo untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.

- Langkah 8

Koordinator Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berikutnya kepada Tim Pelaksana.

- Langkah 9

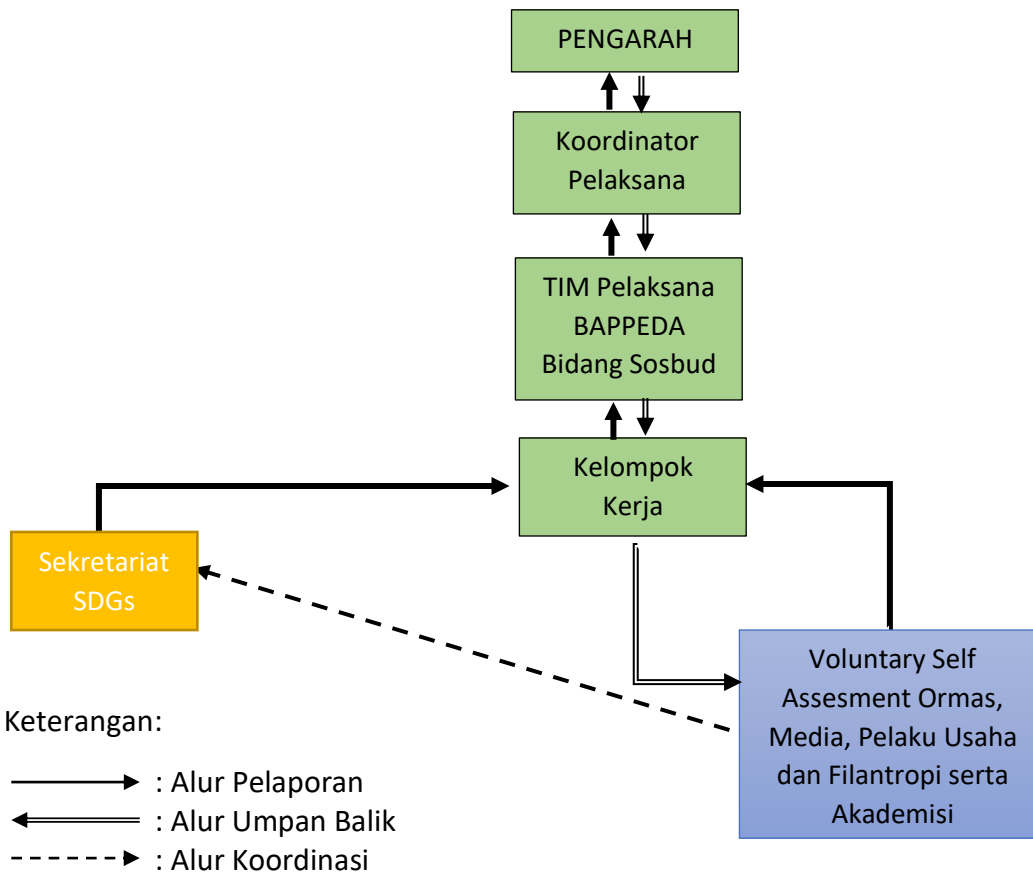
Tim Pelaksana merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan pada setiap program dan kegiatan oleh masing-masing OPD .

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Non Pemerintah

Mekanisme monitoring dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian SDGs bersifat sukarela (voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannya pun juga bersifat sukarela. Akan tetapi, meskipun bersifat sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Organisasi non pemerintah jumlahnya mencapai ribuan dengan kapasitas yang sangat beragam, oleh karena itu perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang

sederhana dan efisien, namun tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 41. Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah

Alur informasi monitoring dari organisasi non pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Alur Laporan

- Langkah 1

Organisasi Non Pemerintah melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assesment tool*, lalu dilaporkan pada Kelompok Kerja dan disampaikan juga kepada Sekretariat SDGs.

- Langkah 2

Kelompok Kerja menerima laporan dari Organisasi Non Pemerintah yang telah dikumpulkan dan dikompilasi oleh Sekretariat SDGs dengan format yang ditetapkan, untuk diolah dan divalidasi. Selanjutnya direkapitulasi dan disampaikan kepada Tim Pelaksana.

- Langkah 3

Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian ke dalam suatu laporan yang utuh dan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai Koordinator Pelaksana.

- Langkah 4

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat daerah kepada Gubernur Provinsi Gorontalo selaku Pengarah, 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

b. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memwadahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja yaitu :

- Langkah 5

Kelompok Kerja dibantu Sekretariat akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Non Pemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.

- Langkah 6

Umpan balik dari Pengarah atau Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi panduan arahan bagi pencapaian berikutnya.

- Langkah 9

Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana dan hasil kajian dan validasi dari Kelompok

Kerja terkait hal strategis untuk pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Non Pemerintah.

Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Organisasi Non Pemerintah itu sendiri yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari stakeholder berkaitan. Pada akhirnya, yang paling mengetahui tentang seluk beluk aktivitas adalah mereka sendiri yang telah lama bergelut di bidang berkaitan dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan demikian, paling tidak akan ada tiga (3) forum atau tim independen yang dibentuk secara ad hoc untuk menilai stakeholder organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi. Forum atau tim tersebut juga melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain bila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dll.

Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian akan diserahkan kepada Tim Pelaksana. Tim Pelaksana akan menyampaikan kepada Koordinator Pelaksana sebagai bagian hasil evaluasi keseluruhan dari para stakeholder. Lalu, Koordinator Pelaksana akan menyampaikan hasil tersebut kepada Pengarah.

Pengarah/Koordinator Pelaksana akan memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para stakeholder untuk pencapaian SDGs yang lebih optimal. Tim Pelaksana akan memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Pengarah/Koordinator Pelaksana untuk Kelompok Kerja, yang akan dilanjutkan disampaikan kepada stakeholder terkait Organisasi Non Pemerintah.

4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs 2018-2022

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

Pembuatan dokumen RAD dan pengisian matriks dimulai pada bulan Nopember 2017. Enam bulan setelah Perpres 59/2017 diberlakukan Rencana Aksi Daerah 2018-2022 harus dapat disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo selaku Koordinator Pelaksana TPB kepada Gubernur Gorontalo, yaitu sekitar Januari 2018 sedangkan Rencana Aksi Daerah harus dilaporkan setelah satu tahun Perpres 59/2017 diundangkan.

Batas waktu penyerahan RAD TPB provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres tersebut juga mengamanatkan bahwa Peta Jalan TPB 2017 -2030 harus sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan. Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAD akan dilakukan pada bulan Januari 2019 - Januari 2022. Hasil Laporan pemantauan dari OPD dan Gubernur dapat disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.



Gambar 42. Diagram Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB 2017-2022 Provinsi Gorontalo

4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian SDGs dapat dilihat dari laman pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yakni

www.gorontalo.go.id dan Kementerian PPN/Bappenas melalui laman www.sdgs.bappenas.go.id.

Secara lebih khusus Bappeda Provinsi Gorontalo bersama tim sekretariat SDGs juga akan mempublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian SDGs melalui laman <https://bappeda.gorontalopro.go.id>. Laman tersebut sebagai media publik untuk melakukan disseminasi informasi terkait dengan Peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik lainnya. Laman ini akan terus dikembangkan diupdate sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi, hasil pemantauan dan evaluasi berkala atas kemajuan pencapaian TPB Provinsi Gorontalo.

BAB V

PENUTUP

5.1 Upaya dan Proses yang Dilakukan dalam Penyusunan RAD TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dokumen penting yang disusun dalam upaya mengantisipasi tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Gorontalo dalam era pembangunan berkelanjutan. Sehingga bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, upaya yang akan dilaksanakan dalam pembangunan berkelanjutan dapat menuntun secara bertahap bagi daerah khususnya Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang bermartabat dan berwawasan kedepan.

Penyusunan RAD ini tidak lain merupakan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo termasuk kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dalam mendukung tercapainya target-target SDGs di tingkat Nasional dan Global sesuai Roadmap Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia sampai tahun 2030.

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2018-2022 berisi program dan kegiatan berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yakni upaya-upaya yang terukur, yang akan dilakukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Pemerintah dan non Pemerintah secara bersama-sama dengan menekankan pada prinsip TPB/SDGs yaitu *integrasi dan no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Baik upaya pemerintah maupun non-pemerintah secara signifikan akan berkontribusi dalam pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Provinsi Gorontalo secara khusus, dan Indonesia secara lebih umum, bahkan secara global.

Setiap indikator yang dituangkan dalam dokumen RAD, yang juga disusun dalam matriks TPB/SDGs mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga pencapaian target setiap tujuan dan indikator akan menentukan dan

berpengaruh pada upaya pencapaian dari target yang lain. Keterkaitan antar Tujuan menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs, maka pelaksanaan dari setiap upaya atau aksi juga menjadi penarik dari upaya lain sehingga pencapaian target setiap indikator akan terus-menerus diselaraskan dan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Untuk itu mekanisme monitoring yang inklusif juga diterapkan baik untuk program pemerintah maupun non pemerintah.

5.2 Keterlibatan Berbagai Pihak

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022 ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka dan memungkinkan untuk dikaji ulang dan lebih mendalam dalam rangka memberi peluang yang besar terhadap pencapaian setiap target indikator SDGs. Keterlibatan pihak pemerintah dan non-pemerintah dalam perencanaan aksi SDGs dapat menentukan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga konsultasi dan partisipasi publik baik secara online dan offline sangat diharapkan.

Pada sisi perencanaan pembangunan di daerah, Dokumen RAD SDGs harus dapat mengintegrasikan seluruh aspek perencanaan daerah yang tertuang dalam setiap dokumen perencanaan, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD serta beberapa dokumen perencanaan lainnya (RKPD dan Renja). Oleh karena itu keberhasilan implementasi RAD SDGs sangat ditentukan oleh dukungan penganggaran baik melalui APBN maupun APBD setiap tahunnya. Dukungan eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan untuk pencapaian indikator SDGs. Demikian pula seluruh elemen masyarakat termasuk Organisasi massa, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan pemangku kepentingan lain diharapkan mampu membangun partisipasi aktif dan bersinergi guna mempersiapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo yang lebih baik dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

TUJUAN 1

BPS Provinsi Gorontalo (2016) Data cakupan akses air minum layak dan sanitasi layak Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

BPS Provinsi Gorontalo (2016) Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

BPS Provinsi Gorontalo (2016) Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016

BPS Provinsi Gorontalo (2016) Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016 Provinsi Gorontalo

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Gorontalo (2016) Jumlah PMKS yang tertangani di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Gorontalo (2016) Jumlah PMKS Penerima Bantuan di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

TUJUAN 2

Data Pertanian Provinsi Gorontalo (2017) Peningkatan Luas Areal (Ha) Sesuai Komoditi Unggulan Tahun 2012-2016

Dinas Pangan Provinsi Gorontalo (2016) Perkembangan dan Sasaran PPH Ketersediaan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (2016) Perkembangan Produksi Daging di Gorontalo Tahun 2012-2016

TUJUAN 3

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo - Angka Kematian Ibu yang Disebabkan PTM di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2017

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare Di Kabupaten/Kota Tahun 2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Jumlah dan persentase kesembuhan dan jumlah penemuan kasus baru TB BTA+ Provinsi Gorontalo tahun 2012 s/d 2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Penderita HIV/AIDS Provinsi Gorontalo Tahun 2012 s/d 2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Rasio Perawat Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo Per 100.000 Kelahiran Hidup, Tahun 2012-2016

DLHK Provinsi Gorontalo (2016) Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo Hasil Pemantauan Tahun 2016

TUJUAN 4

Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender (2016) Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Dikpora Provinsi Gorontalo - Capaian Prestasi Siswa SD/MI Provinsi Gorontalo Tahun 2011

Dikpora Provinsi Gorontalo - Capaian Prestasi Siswa SMA/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2018

Dikpora Provinsi Gorontalo - Capaian Prestasi Siswa SMP/MTs Provinsi Gorontalo Tahun 2011

Dikpora Provinsi Gorontalo – Rekap Guru Bersertifikat Pendidik Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2018

Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo (2016) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/KB Tahun 2016

Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo (2016) Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo (2017) Angka Melek Huruf Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo (2017) Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (2017) Jenjang Pendidikan Guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2016

Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (2017) Persentase Sekolah dengan Kondisi Baik

TUJUAN 5

Badan Kepegawaian Prov. Gorontalo (2016) Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Pemerintah Provinsi Tahun 2016

Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo (2016) Eksistensi Perempuan Dalam Lembaga DPRD Prov dan Kab/Kota Periode 2014-2019

Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender (2016) Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender (2016) Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Data Kepolisian Daerah Gorontalo (2016) Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tahun 2014-2016

TUJUAN 7

EVALUASI RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas PM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022,

TUJUAN 8

Rencana Strategis Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional. Februari 2018

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2015

BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo 2017

BPS. Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2017

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2017

Evaluasi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022,

TUJUAN 9

Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo, 2017-2022

BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2015

BPS. Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2017

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2017

Evaluasi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Permukiman Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas PM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022,

TUJUAN 10

Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional. Februari 2018

BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo 2017

BPS. Statistik Politik 2017

BPS. Statistik Potensi Desa Provinsi Gorontalo 2014

Evaluasi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Permukiman Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022,

TUJUAN 16

Gorontalo Dalam Angka Tahun 2016-2017

Laporan Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Profil Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Renja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo Tahun 2018-2019

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022

Renstra Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Renstra Polda Gorontalo T.A 2015-2019

TUJUAN 17

Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional. Februari 2018

BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2015

BPS. Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2017

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2017

BPS. Statistik Potensi Desa Provinsi Gorontalo 2014

Evaluasi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

DAFTAR PUSTAKA

TUJUAN 1

BPS Provinsi Gorontalo (2016) Data cakupan akses air minum layak dan sanitasi layak Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

BPS Provinsi Gorontalo (2016) Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

BPS Provinsi Gorontalo (2016) Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016

BPS Provinsi Gorontalo (2016) Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016 Provinsi Gorontalo

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Gorontalo (2016) Jumlah PMKS yang tertangani di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Gorontalo (2016) Jumlah PMKS Penerima Bantuan di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

TUJUAN 2

Data Pertanian Provinsi Gorontalo (2017) Peningkatan Luas Areal (Ha) Sesuai Komoditi Unggulan Tahun 2012-2016

Dinas Pangan Provinsi Gorontalo (2016) Perkembangan dan Sasaran PPH Ketersediaan Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (2016) Perkembangan Produksi Daging di Gorontalo Tahun 2012-2016

TUJUAN 3

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo - Angka Kematian Ibu yang Disebabkan PTM di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2017

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare Di Kabupaten/Kota Tahun 2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Jumlah dan persentase kesembuhan dan jumlah penemuan kasus baru TB BTA+ Provinsi Gorontalo tahun 2012 s/d 2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Penderita HIV/AIDS Provinsi Gorontalo Tahun 2012 s/d 2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Rasio Perawat Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2016) Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo Per 100.000 Kelahiran Hidup, Tahun 2012-2016

DLHK Provinsi Gorontalo (2016) Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo Hasil Pemantauan Tahun 2016

TUJUAN 4

Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender (2016) Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Dikpora Provinsi Gorontalo - Capaian Prestasi Siswa SD/MI Provinsi Gorontalo Tahun 2011

Dikpora Provinsi Gorontalo - Capaian Prestasi Siswa SMA/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2018

Dikpora Provinsi Gorontalo - Capaian Prestasi Siswa SMP/MTs Provinsi Gorontalo Tahun 2011

Dikpora Provinsi Gorontalo – Rekap Guru Bersertifikat Pendidik Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2018

Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo (2016) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/KB Tahun 2016

Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo (2016) Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo (2017) Angka Melek Huruf Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo (2017) Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016

Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (2017) Jenjang Pendidikan Guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2016

Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (2017) Persentase Sekolah dengan Kondisi Baik

TUJUAN 5

Badan Kepegawaian Prov. Gorontalo (2016) Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Pemerintah Provinsi Tahun 2016

Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo (2016) Eksistensi Perempuan Dalam Lembaga DPRD Prov dan Kab/Kota Periode 2014-2019

Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender (2016) Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender (2016) Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2015

Data Kepolisian Daerah Gorontalo (2016) Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tahun 2014-2016

TUJUAN 7

EVALUASI RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas PM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022,

TUJUAN 8

Rencana Strategis Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional. Februari 2018

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2015

BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo 2017

BPS. Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2017

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2017

Evaluasi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022,

TUJUAN 9

Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo, 2017-2022

BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2015

BPS. Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2017

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2017

Evaluasi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Permukiman Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas PM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022,

TUJUAN 10

Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional. Februari 2018

BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo 2017

BPS. Statistik Politik 2017

BPS. Statistik Potensi Desa Provinsi Gorontalo 2014

Evaluasi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Permukiman Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022,

TUJUAN 16

Gorontalo Dalam Angka Tahun 2016-2017

Laporan Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Profil Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Renja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo Tahun 2018-2019

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022

Renstra Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Renstra Polda Gorontalo T.A 2015-2019

TUJUAN 17

Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional. Februari 2018

BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2015

BPS. Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2017

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2016

BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2017

BPS. Statistik Potensi Desa Provinsi Gorontalo 2014

Evaluasi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo, 2017-2022

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022



The image shows a circular official stamp of the Governor of Gorontalo. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "GUBERNUR GORONTALO" at the top and "GORONTALO" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "USLI HABIBIE" is printed in a bold, black, sans-serif font.